



BADAN
PANGAN
NASIONAL

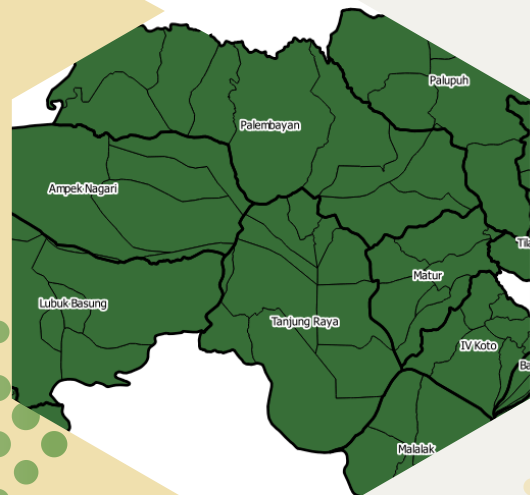
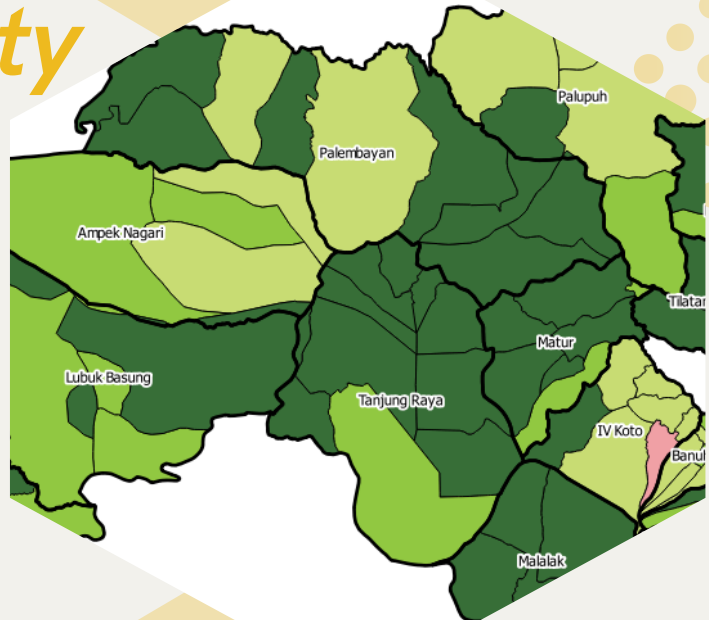
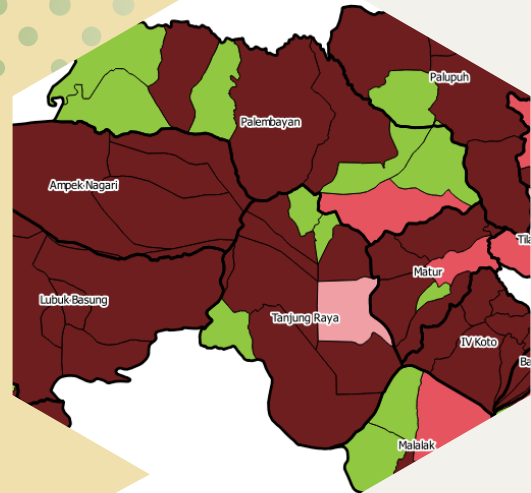
NATIONAL
FOOD
AGENCY

PETA KETAHANAN DAN KERAWANAN PANGAN (*Food Security and Vulnerability Atlas*)

KABUPATEN
AGAM

2025

DISUSUN OLEH :
DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN AGAM



Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
(Food Security and Vulnerability Atlas)

KABUPATEN AGAM

2025



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 389 TAHUN 2025
T E N T A N G
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
TAHUN 2025
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif di wilayah Kabupaten Agam perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan bagi Pemerintah Kabupaten Agam dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

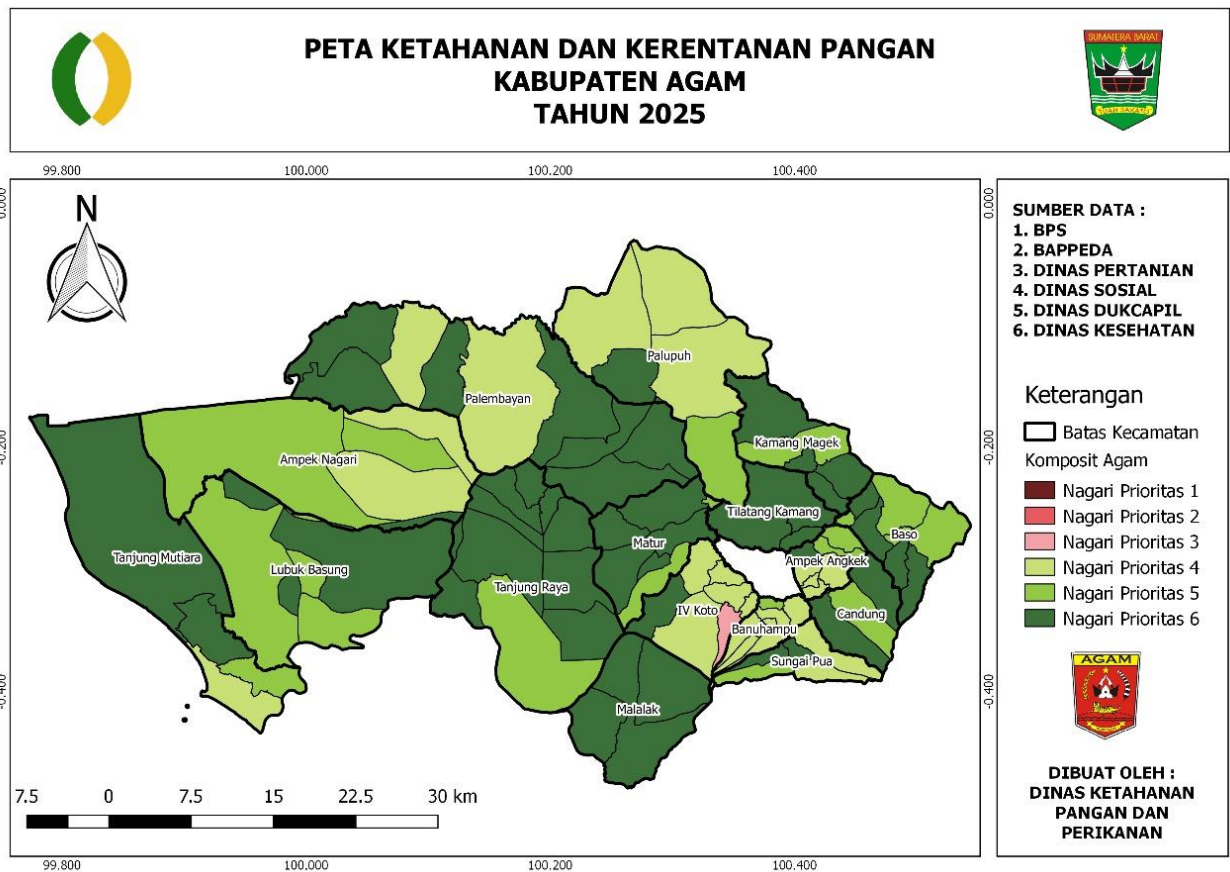
Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 389 TAHUN 2025
TENTANG
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN
PANGAN TAHUN 2025



- a. Prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 merupakan wilayah rentan pangan, dengan klasifikasi:
1. prioritas 1 tingkat sangat rentan pangan;
 2. prioritas 2 tingkat rentan pangan; dan
 3. prioritas 3 tingkat agak rentan pangan.
- b. Prioritas 4, prioritas 5, dan prioritas 6 merupakan wilayah tahan pangan, dengan klasifikasi:
1. prioritas 4 tingkat agak tahan pangan;
 2. prioritas 5 tingkat tahan pangan ; dan
 3. prioritas 6 tingkat sangat tahan pangan.

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS



BUPATI AGAM

SAMBUTAN



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita semua masih terus diberi kesempatan untuk berkarya dalam segala tindakan nyata untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Agam yang kita cintai ini kearah yang lebih baik khususnya berbagai pemikiran dan upaya telah sama-sama diarahkan disegala tingkatan, baik di provinsi maupun kabupaten untuk memberikan kontribusi yang besar bagi upaya menjadikan rakyat lebih sejahtera sejalan Visi pembangunan Kabupaten Agam 2025 – 2029 adalah : **“Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera”**.

Dengan diluncurkannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Agam 2025 ini dapat menjadi arahan dan pegangan dalam penyusunan program, strategi, dan kegiatan pada setiap tahapan di lokasi-lokasi yang digambarkan dalam peta ini. Strategi yang diambil kedepannya dapat menuntaskan permasalahan pangan dan gizi serta lebih fokus dan berkesinambungan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam payung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Mengingat penuntasan masalah pangan dan gizi adalah bersifat multi-dimensional yang tidak dapat dilakukan secara sendiri dan terpisah namun harus dalam satu tatanan koordinasi yang tepat, cepat, terarah, menyeluruh dan berkesinambungan, maka Saya juga berharap dokumen ini dapat menjadi penghubung lintas sektor antar Perangkat Daerah dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten Agam.

Saya memberikan penghargaan yang tinggi atas kerja keras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, sehingga berhasil meluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Kabupaten Agam 2025 ini.

Pada akhirnya, semoga peta ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT memberkati segala usaha kita.



KATA PENGANTAR



Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Kabupaten Agam 2025 merupakan sebuah analisa yang menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dari berbagai dimensi yang dirinci hingga pada tingkat nagari.

Secara teknis dapat dijelaskan bahwa persoalan pangan wilayah sangat bergantung pada banyak aspek (multi-dimensional) sehingga indikator yang dipergunakan untuk menggambarkan kondisi ini terdiri dari 6 (enam) indikator dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan dan Pemanfaatan Pangan. Sehingga kedepannya diharapkan dapat menuntaskan permasalahan dan kondisi ketahanan pangan sesuai rujukan dan gambaran yang diberikan pada tingkat wilayah nagari.

Secara khusus pada kesempatan ini kami Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku Penanggung Jawab Tim FSVA Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan atas dukungan dari Tim FSVA Kabupaten Agam serta peran aktif dari staf Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam proses penyusunan dari tahap pengumpulan data sampai pada penyelesaiannya. Kedepan kami tetap berharap kerjasama ini terus di tingkatkan untuk menjadikan kondisi ketahanan pangan Kabupaten Agam lebih tangguh.

Akhirnya, kami sangat mengharapkan peta ini dapat dijadikan salah satu dokumen perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan kecamatan dalam menjawab permasalahan yang ditunjukkan oleh peta ini baik secara individu maupun komposit pangan agar permasalahan ini dapat terselesaikan secara cepat, tepat dan berkesinambungan. Kami menyadari bahwa peta ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya saran dan kritik sangat kami perlukan.



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN

Rosva Deswira, S.Pi, M.Si

UCAPAN TERIMA KASIH

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Kabupaten Agam Tahun 2025 ini merupakan pemutakhiran dari kondisi ketahanan dan kerentanan Kabupaten Agam yang pernah dianalisa pada Tahun 2024 yang lalu. Peta ini telah diluncurkan tepat pada waktunya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Secara khusus terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ir. H. Benni Warlis, M.M DT. Tan Batuah, selaku Bupati Agam, kepada Rosva Deswira, S.Pi, M.Si, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta kepada Fitriani, S.Tr.Keb selaku Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.

Terima kasih juga kepada Tim FSVA Kabupaten Agam yakni Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, BPS, dan BAPPEDA atas kerja kerasnya dan dukungan Perangkat Daerah terkait yang telah mendukung ketersediaan data-data yang dibutuhkan, sehingga buku ini dapat dipublikasikan dan akan terus diupayakan untuk disosialisasikan untuk pemanfaatannya ke depan. Peran serta dari berbagai pihak yang telah membantu juga sangat kami hargai.

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

Tim Penyusun

Pengarah

Rosva Deswira, S.Pi, M.Si

Ketua

Fitriani, S.Tr.Keb

Sekretaris

Ediarta Isra Bastin, S.Hut, M.Si

Anggota

Novis Zeni Putri, S.ST, M.Si
Rita Delfianti, S.Pt
Zufren, SP, MP
Daryulia Ningsih, S.Pi, M.Si
Fauziah Nurchaulia Edelwis, S.T
Miswarni, SP
Zufren, SP, MP
Ade Suryani Saldy, AMG
Irianti, Aks
Veny Elfionna Shofi, S.TP
Nofia Natalia, SE
Wira Yulina, SKM

Dan



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
1. Latar Belakang.....	x
2. Temuan Utama.....	xiii
3. Tantangan Ketahanan Pangan	xvi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Dasar Pemikiran dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5
1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	7
1.3 Metodologi	12
BAB II_KETERSEDIAAN PANGAN.....	18
2.1 Lahan Pertanian dan Produksi	19
2.2 Produksi	21
2.3 Sarana Dan Prasarana Penyedia Pangan	32
2.4 Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	34
BAB III_KETERJANGKAUAN PANGAN.....	37
3.1 Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Rendah	38
3.2 Akses Transportasi	42
3.3 Peternakan.....	45
3.4 Strategi Peningkatan Akses Pangan	46
BAB IV_PEMANFAATAN PANGAN	48
4.1 Akses Terhadap Akses Air Bersih.....	49
4.2 Rasio Tenaga Kesehatan	50
4.3 Dampak (<i>Outcome</i>) Dari Status Kesehatan.....	52
4.4 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan.....	56
BAB V_KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	61

5.1	Kondisi Ketahanan Pangan	61
5.2	Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	62
BAB VI REKOMENDASI KEBIJAKAN		65
6.1	Akses Ekonomi	68
6.2	Dampak terhadap Gizi	69
6.3	Perubahan Iklim	71
6.4	Implikasi Kebijakan.....	72
6.5	Tantangan Ketahanan Pangan	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75
LAMPIRAN		76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	9
Gambar 1.2 Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi	10
Gambar 2.1 Grafik Produksi Serealisa Pokok dan Ubi-Umbian 2020-2024 (Ton)	22
Gambar 2.2 Grafik Produksi Total Serealisa per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi per Kecamatan (2020-2024)	24
Gambar 2.3 Grafik Produksi Padi per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi per Kecamatan (2020-2024)	26
Gambar 2.4 Grafik Produksi Jagung per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi per Kecamatan (2020-2024)	28
Gambar 2.5 Grafik Produksi Ubi Kayu per Kecamatan 2020-2024 (Ton)	29
Gambar 2.6 Grafik Produksi Ubi Jalar per Kecamatan 2020-2024 (Ton).....	31
Gambar 2.7 Peta Komposit Indikator Luas Lahan Pertanian	32
Gambar 2.8 Peta Komposit Indikator Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan	33
Gambar 3.1 Grafik Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Agam ...	40
Gambar 3.2 Peta Komposit Indikator Penduduk Tidak Sejahtera	42
Gambar 3.3 Peta Komposit Indikator Akses Penghubung.....	45
Gambar 4.1 Peta Komposit Indikator Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	50
Gambar 4.2 Peta Komposit Indikator Tenaga Kesehatan.....	52
Gambar 4.3 Grafik Jumlah Penderita Gizi Buruk 2020-2024	54
Gambar 4.4 Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Hamil, Melahirkan, dan Nifas per Kecamatan	55
Gambar 5.1 Peta Komposit Kabupaten Agam	62
Gambar 5.2 Grafik Komposit Ketahanan Pangan 2025	64
Gambar 5.3 Grafik Perbandingan Komposit Ketahanan Pangan Tahun 2023-2025	64
Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator FSVA Kabupaten 2024	13
Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu.....	15
Tabel 2.1 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-Umbian 2020-2024 (Ton)	22
Tabel 2.2 Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi per Kecamatan (2020-2024)	23
Tabel 2.3 Produksi Padi per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi per Kecamatan (2020-2024)	25
Tabel 2.4 Produksi Jagung per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2020-2024)	27
Tabel 2.5 Produksi Ubi Kayu per Kecamatan 2020-2024 (Ton)	28
Tabel 2.6 Produksi Ubi Jalar per Kecamatan 2020-2024 (Ton).....	30
Tabel 2.7 Sebaran rasio luas baku lahan pertanian terhadap total lahan berdasarkan prioritas	31
Tabel 2.8 Sebaran rasio sarana prasarana pangan berdasarkan prioritas	33
Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Agam	39
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Miskin pada Desil 1.....	40
Tabel 3.3 Persentase Penduduk Tingkat Kesejahteraan Rendah pada Desil 1 Persentil 141	
Tabel 3.4 Sebaran Nagari dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas	42
Tabel 3.5 Panjang Jalan dan Jenis Jalan.....	43
Tabel 4.1 Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih per Kecamatan.....	49
Tabel 4.2 Sebaran Nagari Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas	50
Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kesehatan	51
Tabel 4.4 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di Nagari Berdasarkan Skala Prioritas	51
Tabel 4.5 Jumlah Penderita Gizi Buruk per Kecamatan Tahun 2020-2024	53
Tabel 4.6 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Hamil, Melahirkan, dan Nifas per Kecamatan	54
Tabel 5.1 Sebaran Jumlah Nagari Berdasarkan Prioritas.....	62

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan daerah, karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi secara berkelanjutan dengan jumlah yang tepat dan cukup. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan secara nasional maupun lokal, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan pangan yang cukup, bergizi, beragam, aman, dan terjangkau. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat wilayah yang menghadapi permasalahan **kerawanan pangan**, yang ditandai dengan rendahnya produksi pangan, terbatasnya akses transportasi dan ekonomi masyarakat, serta tingginya prevalensi masalah gizi, termasuk stunting.

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan

pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dilakukan untuk memetakan kondisi ketahanan dan kerawanan pangan secara spasial melalui tiga pilar utama, yaitu **ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan**. Dengan pendekatan ini, FSVA mampu menggambarkan tingkat kerentanan pangan di tiap wilayah sehingga dapat diidentifikasi daerah yang masuk kategori rentan hingga sangat rawan pangan.

Hasil pemetaan FSVA menunjukkan bahwa masih terdapat kecamatan dan/atau desa yang memiliki tingkat kerawanan pangan tinggi. Wilayah tersebut umumnya ditandai dengan produktivitas pertanian yang rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi, akses infrastruktur dan pasar yang terbatas, serta kondisi kesehatan dan gizi masyarakat yang belum optimal. Selain itu, faktor risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor semakin memperburuk kondisi ketahanan pangan di daerah tersebut.

Keberadaan FSVA sangat penting sebagai **alat analisis dan perencanaan** bagi pemerintah daerah. Peta kerawanan pangan yang dihasilkan menjadi dasar dalam penentuan **lokasi prioritas intervensi** program pangan dan gizi. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat diarahkan secara lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya pada kelompok masyarakat rentan.

FSVA juga berfungsi sebagai **instrumen strategis** untuk mendukung pengambilan kebijakan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperkuat upaya penanggulangan kerawanan pangan secara berkelanjutan. Melalui pemetaan yang terukur dan berbasis data, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun strategi ketahanan pangan yang komprehensif, mulai dari penguatan produksi pangan lokal, peningkatan akses dan distribusi, penyediaan cadangan pangan, hingga perbaikan pola konsumsi dan status gizi masyarakat.

Dengan adanya FSVA, diharapkan pembangunan ketahanan pangan di daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.

Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada keterjangkauan pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.

Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 tingkat rentan pangan sedang, dan prioritas 3 tingkat rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

2. Temuan Utama

a. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dan Gizi

Desa (selanjutnya disebut nagari)/kelurahan dikelompokkan berdasarkan pencapaian terhadap 6 indikator yang meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan pencapaian tersebut, maka nagari-nagari tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok prioritas yang mencerminkan situasi ketahanan pangan dan gizi, yaitu dari yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi (Prioritas 1) sampai dengan kelompok yang relatif tahan pangan dan gizi (Prioritas 6).

- Berdasarkan hasil analisis FSVA tahun 2025 dari 92 nagari di 16 kecamatan di Kabupaten Agam dikelompokkan kedalam enam kelompok prioritas sebagai berikut : Prioritas 1 dan Prioritas 2 tidak ada nagari yang masuk, sedangkan pada prioritas 3 terdapat 1 nagari yaitu Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto (1,09 persen) dan 24 nagari pada prioritas 4 (26,09 persen), 20 nagari pada Prioritas 5 (21,74 persen), 47 nagari pada Prioritas 6 (51,09 persen). Jika dilihat dari persentase tersebut, maka terdapat 1 nagari di Kabupaten Agam yang tergolong dalam nagari yang rawan pangan.
- Dari hasil FSVA 2025, tidak terdapat nagari dengan prioritas 1, namun masih terdapat beberapa tantangan utama seperti naiknya angka balita *stunting* di sebagian besar wilayah pada tahun 2024 menjadi 78 balita yang sebelumnya pada tahun 2023 terdapat 55 balita penderita *stunting* sehingga terjadi kenaikan sebesar 41,82 persen. Selain itu terjadi kenaikan persentase kemiskinan dari tahun 2023 sebesar 6,60 persen menjadi 6,83 persen di tahun 2024.

b. Ketersediaan Pangan

- Secara umum, produksi sereal dan umbi-umbian di Kabupaten Agam di tahun 2024 terus menurun lima tahun terakhir. Produksi padi menurun sebesar 19,76 persen, jagung menurun sebesar 15,52 persen, ubi jalar menurun sebesar 52,23 persen, sedangkan ubi kayu terjadi kenaikan sebesar 32,42 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Agam yang mengalami pertumbuhan pada tahun 2021-2024 sebesar 1,6 persen.

c. Keterjangkauan Pangan

- Akses rumah tangga terhadap pangan memiliki korelasi tinggi dengan status kemiskinan. Di Kabupaten Agam, tingkat kemiskinan meningkat dari 6,6 persen (2023) menjadi 6,83 persen (2024). Hal ini menunjukkan masih terdapat 34.820 ribu jiwa dinyatakan miskin atau setara dengan 6,83 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Agam sebanyak 533.234 jiwa (Disdukcapil, 2024).
- Dukungan sarana penghubung sangat penting untuk menentukan tingkat konektivitas antar nagari yang menentukan aksesibilitas, distribusi serta harga pangan. Semua nagari memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali di seluruh nagari di Kecamatan Palupuh pada kondisi tertentu seperti saat turun hujan lebat, longsor, pasang, dan lain – lain.

d. Pemanfaatan Pangan

- Berdasarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam pada tahun 2024, seluruh rumah tangga di Kabupaten Agam telah memiliki akses terhadap air bersih. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014

tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pada Pasal 3 Ayat 2 mengatakan pilar STBM terdiri atas perilaku : (1) Stop Buang Air Besar Sembarangan, (2) Cuci Tangan Pakai Sabun, (3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, (4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga, dan (5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga. Untuk mencapai pilar STBM dilakukan edukasi, advokasi, dan koordinasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.

- Secara umum, akses terhadap fasilitas kesehatan dan tersedianya tenaga kesehatan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya investasi pemerintah daerah untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2024 dari 1.334 menjadi 1.337.(Diskominfo, 2025)

e. Situasi Gizi dan Kesehatan

- Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Agam mengalami kenaikan dari 55 orang pada tahun 2023 menjadi 78 orang pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 23 balita penderita gizi buruk. Jumlah penderita gizi buruk tertinggi ditemukan di Kecamatan Tanjung Raya (13 balita), dan terendah di Kecamatan Sungai Pua dan Palupuh (0 balita).

FSVA Kabupaten Agam tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun 2024 untuk nagari rawan pangan pada prioritas 3 masih sama yaitu 1 nagari di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto, sedangkan untuk prioritas 4 tahun 2025 terjadi peningkatan menjadi 24 nagari yang semula dari tahun 2024 sebanyak 21 nagari.

3. Tantangan Ketahanan Pangan

Tantangan utama bagi ketahanan pangan di Kabupaten Agam, diantaranya adalah :

- Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Agam dari tahun 2021-2024 mencapai 1,6 persen, sementara pertumbuhan produksi tanaman pangan dalam lima tahun terakhir hanya 1,87 persen untuk padi, -14,46 persen untuk jagung, -34,43 persen untuk ubi kayu, - 39,23 persen untuk ubi jalar. Rendahnya atau bahkan menurunnya produksi tanaman pangan ini ditengarai karena beberapa faktor seperti fluktuasi curah hujan dan terus berkurangnya lahan pertanian yang tersedia.
- Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian juga merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Tingginya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan perumahan dapat mengurangi luasan lahan pertanian, khususnya pangan dari tahun ke tahun.
- Rata - rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Agam pada tahun 2023 adalah sekitar 0,72 hektar per rumah tangga petani (ST 2023). Dengan luas lahan yang sangat kecil tersebut, maka peningkatan produktivitas lahan tetap menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Agam untuk mengamankan produksi padi/beras dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan peningkatan daya saing komoditas pertanian.
- Selain itu, tingginya persentase petani gurem berisiko mempengaruhi ketahanan pangan di Kabupaten Agam. Berdasarkan ST 2023 hampir 70,2 persen (57.926 rumah tangga) dari 82.505 rumah tangga usaha pertanian merupakan rumah tangga petani gurem (BPS, 2025).

Pertumbuhan ekonomi yang kuat serta didukung dengan kapasitas lembaga keuangan yang ada, Kabupaten Agam memiliki potensi yang positif

untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada beberapa tahun mendatang. Hal ini membutuhkan program yang lebih fokus pada pengurangan kemiskinan dan program bermuatan gizi serta diversifikasi makanan.

<https://www.agamkab.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Agam terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 92 (sembilan puluh dua) nagari dengan jumlah penduduk 533.254 jiwa. Luas Kabupaten Agam adalah 2.226,27 km² dengan kecamatan terluas yaitu Kecamatan Palembayan dengan luas 349,77 km² dan kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Banuhampu dengan luas 28,48 km² (BPS, Kabupaten Agam dalam Angka, 2025). Secara Geografis Kabupaten Agam terletak antara 00001'34'' – 00028'43'' Lintang Selatan dan 99046'39'' – 100032'50'' Bujur Timur. Berada pada ketinggian antara 0 – 2.877 meter di atas permukaan laut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, sebelah selatan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar, sebelah timur dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.



Nilai PDRB Kabupaten Agam atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 adalah 26.139,10 milyar rupiah dan tahun 2024 naik menjadi 27.975,68 milyar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan, dari 16.275,98 milyar rupiah pada tahun 2023, naik menjadi 16.946,60 milyar rupiah pada tahun 2024. Struktur ekonomi Kabupaten Agam pada tahun 2024 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha jasa lainnya, serta lapangan usaha informasi dan komunikasi. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Agam sebesar 35,19 persen. Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 4,82 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 yakni 8,26 persen. Berikutnya adalah lapangan usaha jasa Lainnya, yang memberikan kontribusi sebesar 11,0 persen, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,14 persen. Sedangkan lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 6,09 persen, juga menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 7,01 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Agam tahun 2024 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (53,36 persen), diikuti pembentukan modal tetap bruto (29,71 persen). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam pada tahun 2024 sebesar 4,12 persen mengalami percepatan dibandingkan 2023 sebesar 4,52 persen. Ini diakibatkan karena aktivitas ekonomi semakin membaik setelah pandemi Covid-19 pada 2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 8,9 persen dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar 11,06 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,79 persen (BPS, 2025).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 mencapai 73,26 persen. Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat,

Kota Padang merupakan kota dengan IPM tertinggi pada tahun 2024 sebesar 83,29 persen, diikuti Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Solok. IPM Kabupaten Agam pada tahun 2024 sebesar 73,29 persen, ini merupakan IPM tertinggi bersama IPM Kabupaten Tanah Datar jika dibandingkan dengan 12 kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan IPM terendah di Provinsi Sumatera Barat berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 62,19 persen (BPS, 2025).

Selain pencapaian diatas, terdapat beberapa indikator di Kabupaten Agam, yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals – MDG*), yang perlu mengalami perbaikan, yaitu:

1. Dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 558.963/kapita/bulan pada tahun 2024, terdapat sebesar 34,82 ribu jiwa di Kabupaten Agam yang dinyatakan miskin atau setara dengan 6,83 persen penduduk Kabupaten Agam. Dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,50 poin dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,07 poin (BPS, 2025).
2. Pendapatan antar penduduk sudah mulai merata kembali, hal ini ditunjukkan di tahun 2024 koefisien gini sebesar 0,249 terjadi sedikit penurunan dari tahun 2023 sebesar 0,255 (BPS, 2025).
3. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu terdapat 10 kejadian AKI selama tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang terdapat 11 kejadian (BPS, 2025).
4. Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Agam pada tahun 2024 sebanyak 78 balita dan terjadi kenaikan jumlah dari 55 balita di tahun 2023. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Tanjung Raya (13 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan Sungai Pua dan Palupuh (0 balita).
5. Akses sanitasi yang layak (jamban keluarga) sudah 100 persen pada akhir

tahun 2024, dimana sebelumnya pada Juni 2024 Kabupaten Agam sudah dinyatakan sebagai kabupaten yang ODF (*Open Defecation Free*) atau sudah Stop Buang Air Besar Sembarang melalui rapat pleno ODF Kabupaten Agam oleh Tim Verifikasi Provinsi Sumatera Barat (Dinas Kesehatan, 2025).

6. Ketersediaan lapangan pekerjaan masih belum maksimal di Kabupaten Agam, hal ini terlihat dari data yang ada jumlah penduduk yang tidak bekerja pada tahun 2024 adalah 128.910 jiwa. Hal ini signifikan dipengaruhi tingkat pendidikan, dimana penduduk Kabupaten Agam yang tidak sekolah sebanyak 119,128 jiwa. Jumlah rata-rata jiwa per keluarga, secara nasional adalah 4 jiwa per KK, namun di Kabupaten Agam dari jumlah penduduk 533.254 jiwa dengan jumlah keluarga 164.558, maka rata-rata per keluarga adalah 3,2 jiwa. Seharusnya tingkat kebutuhan pangan per kepala keluarga bisa terpenuhi, namun dikarenakan tingkat pendidikan yang masih cukup rendah serta banyaknya penduduk yang tidak bekerja mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat masih belum maksimal.

Selain indikator-indikator diatas, peningkatan produktivitas juga sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur di satu daerah. Pada tahun 2024 terdapat 2.021,72 km jalan di Kabupaten Agam pada tahun 2024 dimana sepanjang 138,56 km merupakan jalan negara yang berstatus baik dengan permukaan hotmix; 188,53 km jalan provinsi yang keseluruhannya telah dihotmix; dan berstatus baik dan 1.694,63 km sisanya merupakan jalan kabupaten dengan 18,09 persennya masih kerikil dan tanah dan 8,15 persen jalannya masih berstatus rusak berat (BPS, 2025).

Sebagai kabupaten yang sangat rawan bencana, Agam juga menghadapi dampak perubahan iklim, yang beresiko terhadap meningkatnya kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi yang bersifat transien dan kronis di Kabupaten Agam. Dengan kondisi tersebut, ditambah dengan meningkatnya jumlah penduduk, dan kebutuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang

bergerak lambat, maka ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Agam harus terus menjadi perhatian utama.

1.1 Dasar Pemikiran dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk *monitoring* ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

Peta ketahanan dan kerentanan pangan selanjutnya dimanfaatkan dan digunakan untuk: (1) dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan, dan (2) penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang Pangan. Dengan adanya perubahan kelembagaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, mulai tahun 2022 supervisi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Sebagai dasar pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10

Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peraturan tersebut memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mendefinisikan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada Pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

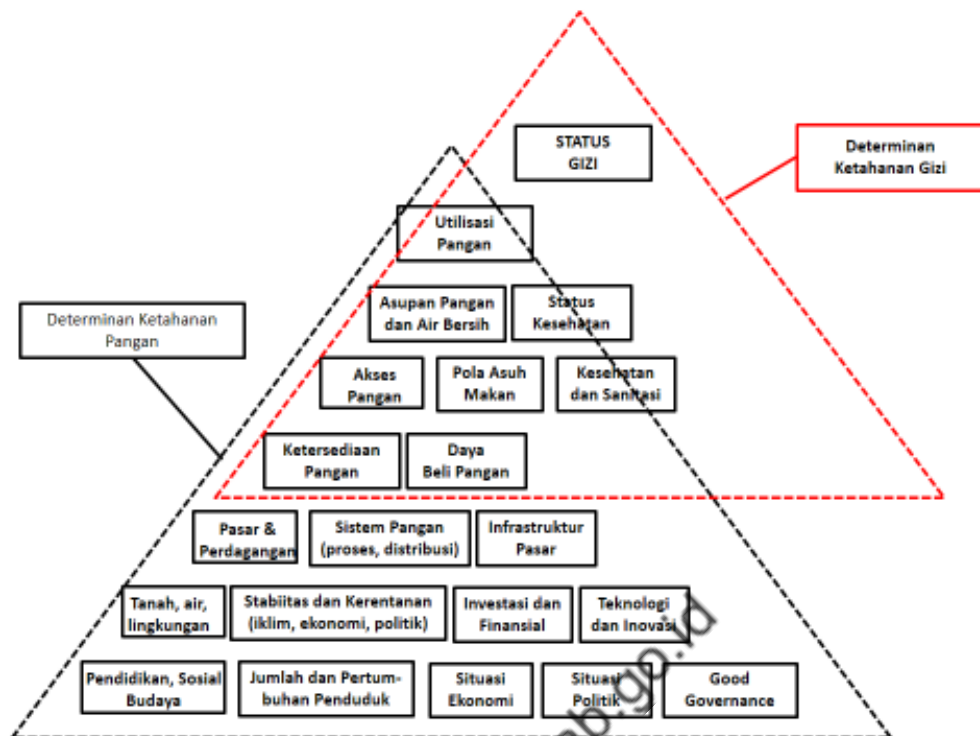
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh Undang-Undang Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security*

yang diajukan oleh UNICEF pada awal tahun 1990-an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah *United Nations* (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

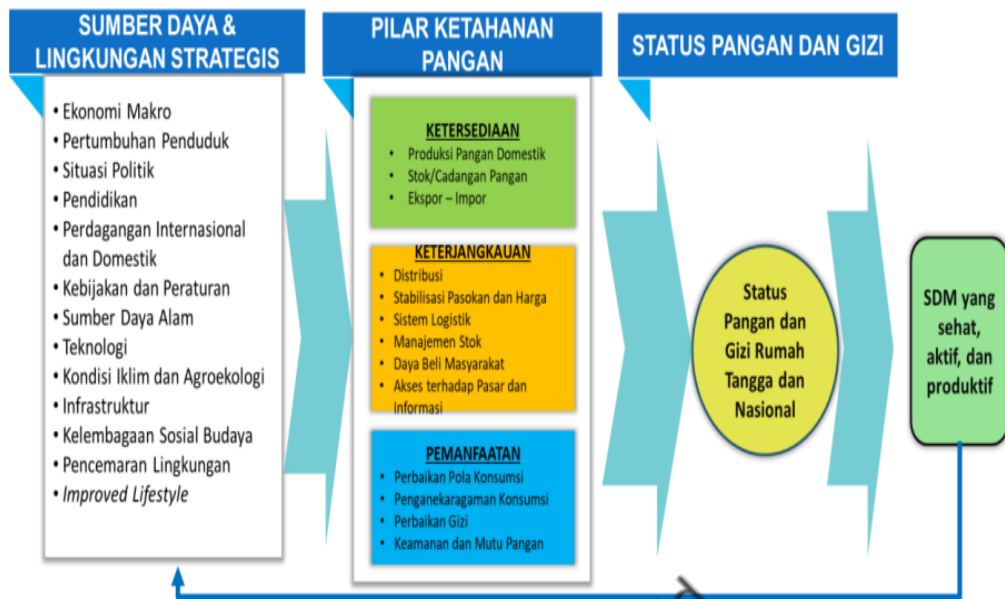
² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York



Gambar 1.1 Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual Ketahanan Pangan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2025 (Gambar 1.2) dibangun berdasarkan 3 (tiga) pilar Ketahanan Pangan: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan keamanan pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Pilar ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi

Pilar Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Pilar Keterjangkauan/Akses Pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pilar Pemanfaatan Pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi

kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat, dan lain-lain.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis

tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3 Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multidimensi yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

a. Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil revidi terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1 Indikator FSVA Kabupaten 2024

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas baku lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas baku lahan pertanian dibandingkan jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - BPS, 2024 - Dinas Pertanian, 2024 - Dinas Perikanan, 2024
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Desa (Podes), 2024 - BPS, 2024 - Dinas Perdagangan, 2024 - Sensus Penduduk (SP) 2020 (Proyeksi 2024) BPS
B. Aspek Keterjangkauan Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan yang rendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	<ul style="list-style-type: none"> - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos atau Dinas Sosial, 2024 - Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), 2024 - Sensus Penduduk (SP) 2020 (Proyeksi 2024) BPS - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan mempertimbangkan prasarana dan sarana transportasi darat, air atau udara, dengan kriteria: (1) dapat dilalui sepanjang tahun; (2) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu ketika turun hujan, pasang, dll; (3) dapat dilalui selama musim kemarau; (4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Desa (Podes) 2024, BPS - Dinas Pekerjaan Umum, 2024 - Dinas Perhubungan, 2024
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air	Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda, 2024 - Dinas Kesehatan, 2024

Indikator	Definisi	Sumber Data
bersih terhadap jumlah rumah tangga	isi ulang, leding/PAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindungin serta mata air terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga di desa	<ul style="list-style-type: none"> - Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), 2024 - Sensus Penduduk (SP) 2020 (Proyeksi 2024) BPS - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah kepadatan penduduk desa	Jumlah penduduk desa pertenaga kesehatan terdiri atas : dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, pranata laboratorium, ahli gizi, sanitarian, sarjana kesehatan masyarakat, asisten apoteker, perawat gigi, pelaksana kesehatan, penata rontgen, dan tenaga kesehatan lain dibandingkan dengan kepadatan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan, 2024 - Potensi Desa (Podes) BPS, 2024 - Sensus Penduduk (SP) 2020 (Proyeksi 2024) BPS - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

b. Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2022) dan *Global Hunger Index* (*Concern Worldwide, WHH and IFHV, 2024*). Goodridge

(2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^6 a_i x_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-l pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6

4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

c. Mengelompokan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{i=1}^6 a_i c_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi (sangat rentan) daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik (sangat tahan). Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

<https://www.agamkab.go.id>

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.



Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1 Lahan Pertanian dan Produksi

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan³. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

a. Hortikultura

Produksi sayuran di Kabupaten Agam didominasi oleh terung, tomat, bawang merah, cabai rawit, dan buncis. Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2023, pada tahun 2024 beberapa komoditi mengalami penurunan dan kenaikan produksi. Penurunan produksi terdapat pada tomat pada tahun 2023 yakni 77.755 kuintal menjadi 75.681,38 kuintal di tahun 2024 dan bawang merah pada tahun 2023 dari 55.366 kuintal menjadi 50.641,70 kuintal di tahun 2024. Sedangkan komoditi yang mengalami kenaikan terdapat pada terung yakni 108.702 kuintal di tahun 2023 menjadi 113.360,30 kuintal di tahun 2024, selain itu pada cabai rawit dari 46.665 kuintal di tahun 2023 menjadi 49.526,85 kuintal di tahun 2024, serta pada buncis dari 44.881 kuintal di tahun 2023 menjadi 45.748,85 kuintal di tahun 2024.

³ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan

Produksi buah-buahan juga terbanyak pada tahun 2024 di Kabupaten Agam adalah jeruk siam, pisang, alpukat, manggis, dan durian. Komoditi tersebut mengalami penurunan dan kenaikan produksi. Penurunan terjadi pada komoditi alpukat yang pada tahun 2023 sebanyak 93.668 kuintal menjadi 73.082,35 kuintal di tahun 2024 dan jeruk siam dari 153.783 kuintal di tahun 2023 menjadi 74.037,6 kuintal di tahun 2024. Sedangkan komoditi yang mengalami kenaikan adalah durian dari 19.880 kuintal di tahun 2023 menjadi 19960,19 kuintal di tahun 2024, manggis dari 40.063 kuintal di tahun 2023 menjadi 45.977,3 kuintal di tahun 2024, dan pisang dari 134.283 kuintal di tahun 2023 menjadi 174.214,78 kuintal di tahun 2024.

b. Perkebunan

Komoditi perkebunan dengan luas tanam paling besar di Kabupaten Agam tahun 2024 adalah kelapa sawit dan kelapa. Dari seluruh jenis perkebunan tahun 2024 tercatat luas tanam kelapa sawit seluas 19.869 hektar dengan produksi 18.891,210 ton dan kelapa 10.272 hektar dengan produksi 11.518,33 ton. Tanaman kelapa sawit paling banyak diusahakan oleh masyarakat di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Nagari, sedangkan tanaman kelapa paling banyak diusahakan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara.

c. Tanaman Pangan

Pada tahun 2024 terdapat sebesar 27.297 hektar lahan tegal/kebun, 14.228 hektar lahan ladang huma, dan 7.479 hektar lahan yang sementara tidak di usahakan di Kabupaten Agam. Sebanyak 69,177.6 hektar padi sawah di panen pada tahun 2024 dengan menghasilkan 347.740 ton padi. Kecamatan dengan luas panen terluas adalah Lubuk Basung sebesar 9.415 hektar, Palembayan sebesar 9.018 hektar dan Tanjung Raya sebesar 6.239 hektar. Sementara itu produksi padi terbesar terdapat di Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 45.653,3 ton, Palembayan sebanyak 43.647,1 ton, dan Tilatang

Kamang sebanyak 31.564,3 ton.

Sebanyak 13,789.5 hektar lahan jagung yang di panen pada tahun 2024 dengan total produksi sebanyak 100,162.5 ton. Penyumbang terbesar produksi jagung di Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Lubuk Basung sebesar 43.996,9 ton dan Kecamatan Ampek Nagari sebesar 39,570.6 ton. Kecamatan Baso merupakan kecamatan dengan produksi ubi kayu terbanyak pada tahun 2024 yaitu sebesar 2,234.0 ton, sementara itu untuk komoditas ubi jalar, produksi terbanyak juga terdapat di Kecamatan Baso yaitu sebesar 3,037.5 ton.

2.2 Produksi

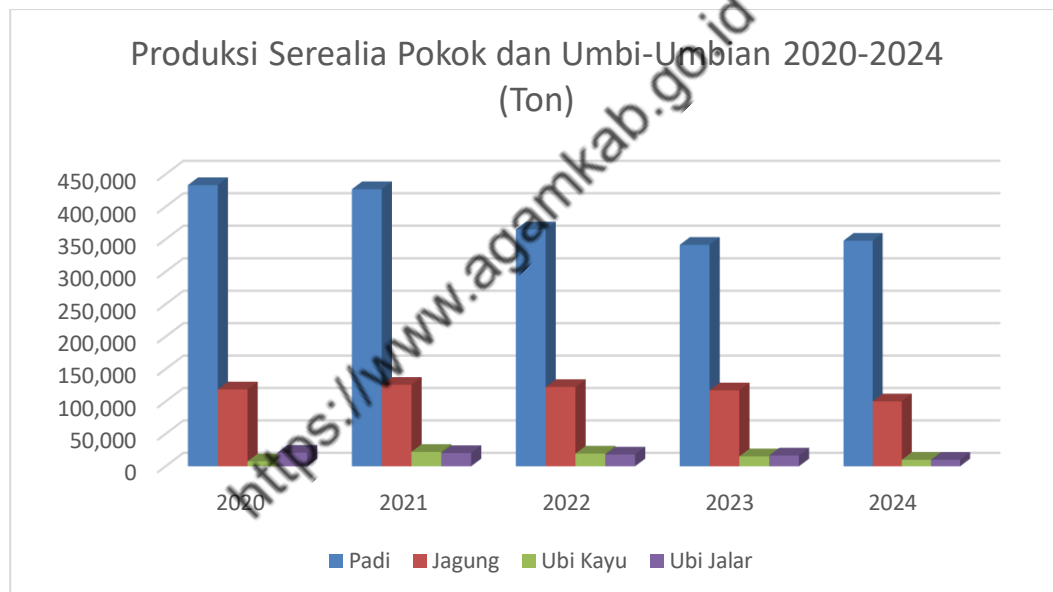
Pemerintah Kabupaten Agam telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 28,26 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Agam pada tahun 2024 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Agam yang menyumbang hampir 95,7 % dari total produksi serealial kabupaten. Berdasarkan Tabel 2.1 dan Gambar 2.1, produksi umbi-umbian di Kabupaten Agam mengalami peningkatan dan penurunan sejak tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas tanam komoditi pangan dari pada tahun sebelumnya. Produksi padi menurun 19,76 % selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 433.359 ton tahun 2020 menjadi 347.740 pada tahun 2024.

Tabel 2.1 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-Umbian 2020-2024 (Ton)

Serealia	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata 5 tahun
Padi	433.359	427.076	365.022	341.353	347.740	382.910
Jagung	118.562	125.612	122.292	117.098,90	100.163	116.746
Ubi Kayu	7.575	22.230	19.569,90	15.299,00	10.031	14.941
Ubi Jalar	20.962	20.408	18.102,30	16.666,45	10.013	17.230
Total	580.458	595.326	524.986	490.417	467.947	531.827

Sumber: (BPS, Kabupaten Agam dalam Angka, 2021-2025)

Gambar 2.1 Grafik Produksi Serealia Pokok dan Umbi-Umbian 2020-2024 (Ton)



Tahun 2024, total produksi serealia dan umbi-umbian mencapai 347.740 ton padi, 100.163 ton jagung, 10.031 ton ubi kayu, dan 10.013 ton ubi jalar.

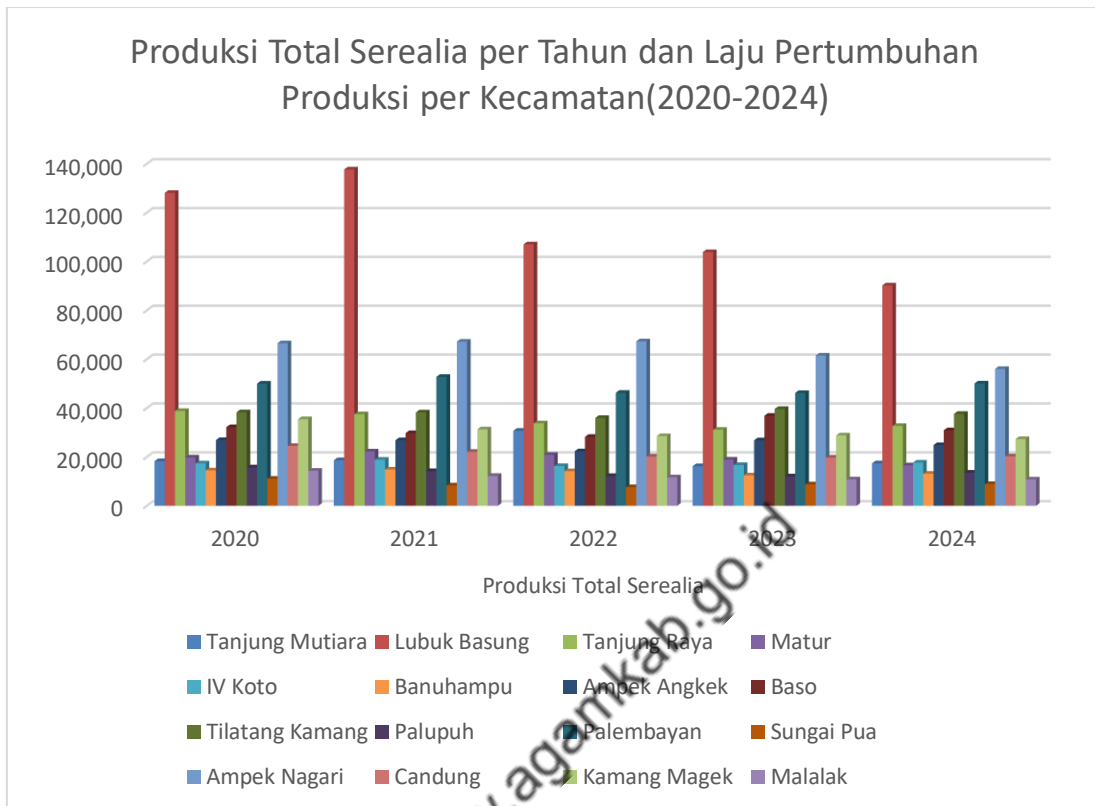
Total produksi serealia dan laju pertumbuhan produksi tahun 2020-2024 menunjukkan penurunan sebesar 15,21 %, yaitu dari total produksi tahun 2020 sebesar 551.921 ton menjadi 467.949 ton pada tahun 2024. Sebaran total produksi serealia selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 552.654 ton dan terkecil pada tahun 2024 yaitu sebesar 467.949. Produksi serealia pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Produksi Total Sereal per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi per Kecamatan (2020-2024)

Kecamatan	Produksi Total Sereal					Laju Pertumbuhan 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Tanjung Mutiara	18.267	18.654	30.698	16.226,30	17.414	-4,67
Lubuk Basung	128.081	137.670	107.021	103.851,50	90.183	-29,59
Tanjung Raya	38.817	37.463	33.744	31.126,70	32.669	-15,84
Matur	19.793	22.249	20.886	18.917,40	16.573	-16,27
IV Koto	17.353	18.881	16.250	16.682,13	17.706	2,03
Banuhampu	14.508	14.847	14.169	12.464,03	13.113	-9,62
Ampek Angkek	26.921	26.833	22.314	26.821,80	24.838	-7,74
Baso	32.177	29.742	28.200	36.836,45	30.896	-3,98
Tilatang Kamang	38.285	38.222	35.950	39.626,84	37.648	-1,66
Palupuh	15.739	14.188	12.193	12.036	13.578	-13,73
Palembayan	50.013	52.757	46.268	46.164,80	50.089	0,15
Sungai Pua	11.093	8.349	7.633	8.783,40	8.912	-19,66
Ampek Nagari	66.546	67.186	67.299	61.496,60	56.008	-15,84
Candung	24.513	22.098	20.164	19.761,90	20.218	-17,52
Kamang Magek	35.451	31.285	28.499	28.807,50	27.322	-22,93
Malalak	14.364	12.230	11.650	10.814,00	10.782	-24,94
Jumlah	551.921	552.654	502.938	490.417,35	467.949	-15,21

Sumber: (BPS, Kabupaten Agam dalam Angka, 2021-2025)

Gambar 2.2 Grafik Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi per Kecamatan (2020-2024)



a. Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Agam selama 5 tahun terakhir (2020-2024) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.3. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2024 di 11 kecamatan dan masih mengalami penurunan di 5 kecamatan dibandingkan tahun 2023 yang terjadi penurunan di seluruh kecamatan. Peningkatan produksi padi tahun 2024 disebabkan peningkatan luas panen dan produktivitas padi dimana peningkatan terbesar terdapat pada Kecamatan Ampek Nagari sebesar 30,23 persen dari tahun 2023, sedangkan penurunan terjadi disebabkan banyaknya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan jagung dan perumahan dimana pada Kecamatan Matur mengalami penurunan terbesar yakni 12,62 persen. Produksi padi tertinggi di Kecamatan Lubuk Basung sebesar 79.160 ton pada tahun 2021 dan

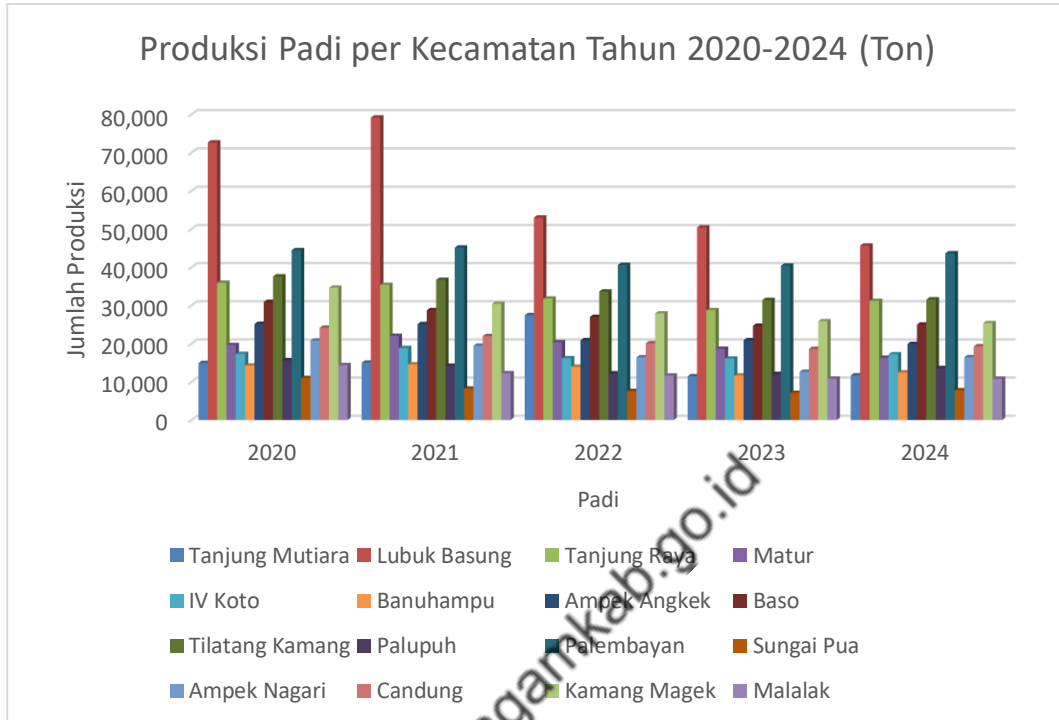
produksi padi terendah di Kecamatan Sungai Pua sebesar 7.070 ton pada tahun 2023. Rincian produksi padi tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel 2.3 dan grafik produksi padi tahun 2020-2024 dalam grafik 2.3.

Tabel 2.3 Produksi Padi per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi per Kecamatan (2020-2024)

Kecamatan	Padi					Laju Pertumbuhan 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Tanjung Mutiara	14.935	14.986	27.456	11.457	11.679	-21,80
Lubuk Basung	72.624	79.160	53.001	50.409	45.653	-37,14
Tanjung Raya	35.920	35.373	31.793	28.755	31.195	-13,15
Matur	19.615	22.028	20.376	18.631	16.279	-17,01
IV Koto	17.284	18.812	16.161	16.065	17.193	-0,53
Banuhampu	14.254	14.545	13.923	11.630	12.438	-12,74
Ampek Angkek	25.166	25.100	20.884	20.901	19.905	-20,91
Baso	30.896	28.744	26.977	24.672	24.964	-19,20
Tilatang Kamang	37.583	36.683	33.655	31.399	31.564	-16,02
Palupuh	15.662	14.188	12.185	12.036	13.578	-13,31
Palembayan	44.476	45.143	40.605	40.432	43.647	-1,86
Sungai Pua	10.962	8.226	7.574	7.070	7.765	-29,16
Ampek Nagari	20.811	19.446	16.419	12.621	16.437	-21,02
Candung	24.166	21.958	20.083	18.613	19.311	-20,09
Kamang Magek	34.641	30.422	27.903	25.848	25.350	-26,82
Malalak	14.364	12.231	11.650	10.814	10.782	-24,94
Jumlah	433.359	427.045	380.645	341.353	347.740	-19,76

Sumber: (BPS, Kabupaten Agam dalam Angka, 2021-2025)

Gambar 2.3 Grafik Produksi Padi per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi per Kecamatan (2020-2024)



b. Jagung

Sebanyak 13.791 hektar lahan jagung yang di panen pada tahun 2024 dengan total produksi sebanyak 100,162.5 ton. Penyumbang terbesar produksi jagung di Kabupaten Agam secara berturut turut yaitu Kecamatan Lubuk Basung sebesar 43.997 ton dan Kecamatan Ampek Nagari sebesar 39.571 ton.

Pada tahun 2024, produksi jagung mencapai 100.163 ton. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 14,5 % dari tahun sebelumnya. Penurunan produksi pada tahun 2024 disebabkan kondisi iklim dan serangan OPT yang menyebabkan produktivitas dari tanaman jagung menurun. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 43.997 ton di Kecamatan Lubuk Basung, menyusul Kecamatan Ampek Nagari sebesar 39.571 ton dan terendah yakni Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Malalak sebesar 0 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.4 dan

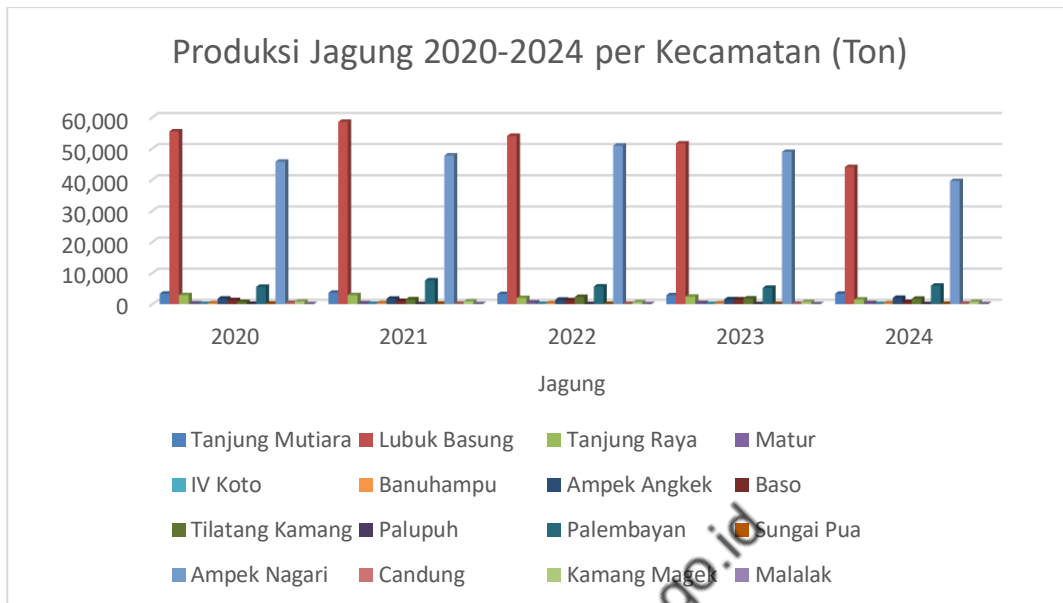
grafik produksi jagung per kecamatan disajikan pada grafik 2.4.

Tabel 2.4 Produksi Jagung per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2020-2024)

Kecamatan	Jagung					Laju Pertumbuhan 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Tanjung Mutiara	3.332	3.668	3.242	2.849	3.357	0,75
Lubuk Basung	55.457	58.510	54.020	51.583	43.997	-20,66
Tanjung Raya	2.897	2.897	1.951	2.372	1.474	-49,12
Matur	178	222	510	286	294	65,17
IV Koto	69	70	89	42	22	-68,12
Banuhampu	254	302	246	222	225	-11,42
Ampek Angkek	1.755	1.733	1.430	1.541	1.980	12,82
Baso	1.281	998	1.223	1.486	660	-48,48
Tilatang Kamang	702	1.539	2.295	1.820	1.718	144,73
Palupuh	77	0	8	0	0	-100,00
Palembayan	5.537	7.614	5.663	5.213	5.909	6,72
Sungai Pua	131	124	59	29	89	-32,06
Ampek Nagari	45.735	47.741	50.880	48.876	39.571	-13,48
Candung	347	140	81	107	150	-56,77
Kamang Magek	810	863	596	674	718	-11,36
Malalak	0	0	0	0	0	0,00
Jumlah	118.562	126.421	122.293	117.099	100.164	-15,52

Sumber: (BPS, Kabupaten Agam dalam Angka, 2021-2025)

Gambar 2.4 Grafik Produksi Jagung per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi per Kecamatan (2020-2024)



c. Ubi Kayu

Produksi ubi kayu meningkat dari 7.575 ton pada tahun 2020 menjadi 10.031 ton pada tahun 2024. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2024 yaitu kecamatan Tilatang Kamang sebesar 2.836 ton, Kecamatan Tanjung Mutiara sebesar 2.378 ton, dan Kecamatan Baso sebesar 2.234 ton. Rincian produksi ubi kayu tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.5 dan grafik produksi ubi kayu tahun 2020-2024 disajikan pada grafik 2.5.

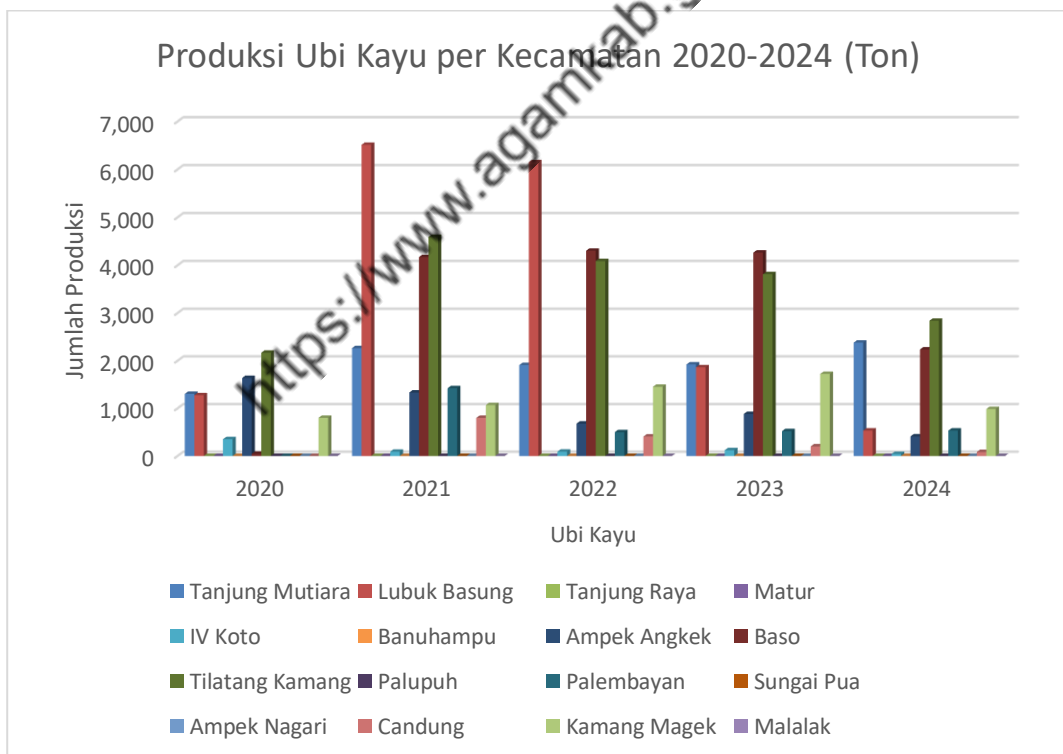
Tabel 2.5 Produksi Ubi Kayu per Kecamatan 2020-2024 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanjung Mutiara	1.303	2.262	1.908	1.920	2.378
Lubuk Basung	1.274	6.512	6.149	1.860	533
Tanjung Raya	-	-	-	-	-
Matur	-	-	-	-	-
IV Koto	352	89	90	120	41
Banuhampu	-	-	-	-	-
Ampek Angkek	1.636	1.331	679	880	410
Baso	44	4.169	4.302	4.264	2.234

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tilatang Kamang	2.166	4.590	4.085	3.813	2.836
Palupuh	-	-	-	-	-
Palembayan	-	1.421	498	520	533
Sungai Pua	-	-	-	-	-
Ampek Nagari	-	-	-	-	-
Candung	-	799	408	200	82
Kamang Magek	800	1.067	1.452	1.722	984
Malalak	-	-	-	-	-
Jumlah	7.575	22.240	19.570	15.299	10.031

Sumber: (BPS, Kabupaten Agam dalam Angka, 2021-2025)

Gambar 2.5 Grafik Produksi Ubi Kayu per Kecamatan 2020-2024 (Ton)



d. Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 7.390 ton di Kecamatan Baso. Pada

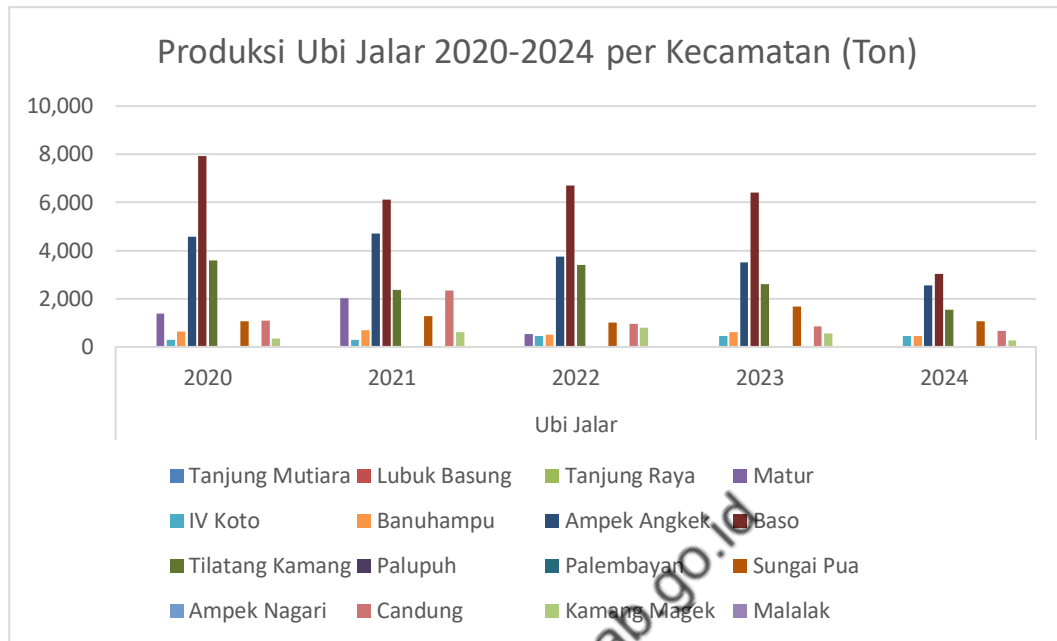
tahun 2024 terjadi penurunan produksi ubi jalar sebesar 39,91 % dari pada tahun sebelumnya, Kecamatan Baso merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 3.038 ton, Kecamatan Ampek Angkek sebesar 2.543 ton, Kecamatan Tilatang Kamang sebesar 1.530 ton dan Kecamatan Sungai Pua sebesar 1.058 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.6. dan grafik produksi ubi jalar tahun 2020-2024 disajikan pada grafik 2.6.

Tabel 2.6 Produksi Ubi Jalar per Kecamatan 2020-2024 (Ton)

Kecamatan	Ubi Jalar				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanjung Mutiara	0	0	0	0	0
Lubuk Basung	0	0	0	0	0
Tanjung Raya	0	0	0	0	0
Matur	1.390	2.015	524	0	0
IV Koto	292	293	455	455	450
Banuhampu	646	682	507	612,33	450
Ampek Angkek	4.586	4.720	3.745	3.500	2.543
Baso	7.930	6.104	6.695	6.414,15	3.038
Tilatang Kamang	3.594	2.357	3.400,8	2.594,44	1.530
Palupuh	0	0	0	0	0
Palembayan	0	0	0	0	0
Sungai Pua	1.067	1.269	1.017,9	1.684,8	1.058
Ampek Nagari	0	0	0	0	0
Candung	1.101	2.350	948	842,40	675
Kamang Magek	356	618	810	563	270
Malalak	0	0	0	0	0
Jumlah	20.962	20.408	18.102,30	16.666,45	10.014

Sumber: (BPS, Kabupaten Agam dalam Angka, 2021-2025)

Gambar 2.6 Grafik Produksi Ubi Jalar per Kecamatan 2020-2024 (Ton)



Dari produksi di atas dapat dilihat hasil analisa sebagai berikut :

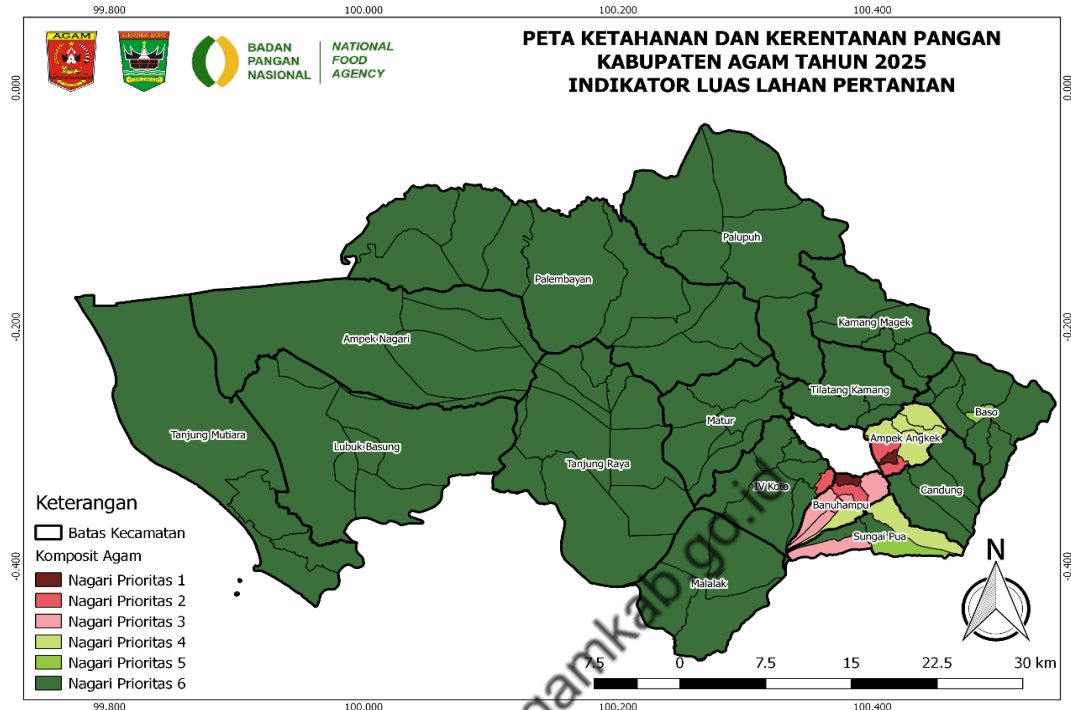
Tabel 2.7 Sebaran rasio luas baku lahan pertanian terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio luas lahan	Jumlah Nagari	Persentase
1	$\leq 0,0253$	2	2,17
2	$> 0,0253 - 0,0399$	5	5,43
3	$> 0,0399 - 0,0525$	4	4,35
4	$> 0,0525 - 0,0748$	6	6,52
5	$> 0,0748 - 0,0900$	2	2,17
6	$> 0,0900$	73	79,35

Dari 92 nagari di Kabupaten Agam, 2 nagari masuk dalam prioritas 1 (2,17 %), 5 nagari prioritas 2 (5,43 %) dan 4 nagari prioritas 3 (4,35 %), sedangkan 81 nagari lainnya masuk pada prioritas 4-6. Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Banuhampu yaitu Nagari Pakan Sinayan, Nagari Sungai Tanang, Nagari Padang Lua, Nagari Ladang Laweh, Nagai Taluak Ampek Suku, dan Nagari Kubang

Putiah.

Gambar 2.7 Peta Komposit Indikator Luas Lahan Pertanian



2.3 Sarana Dan Prasarana Penyedia Pangan

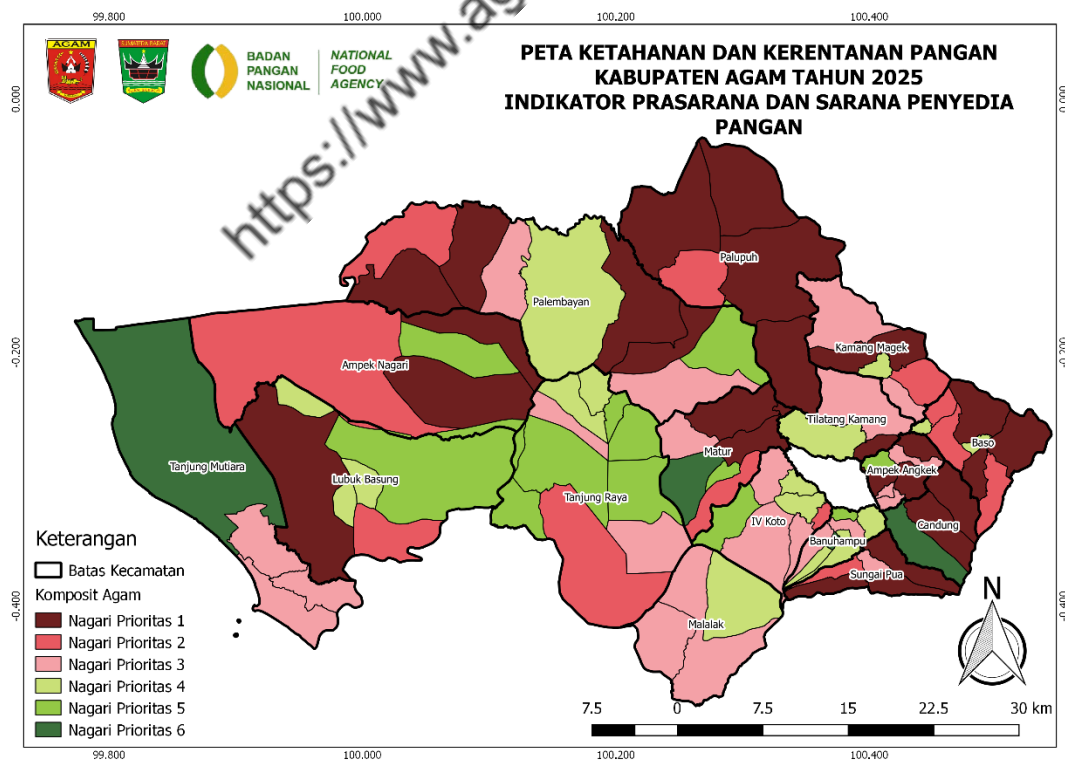
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di nagari. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di nagari maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di nagari tersebut. Secara rinci prasarana dan sarana penyedia pangan dapat dilihat pada tabel 2.8 dan peta pada gambar 2.8.

Tabel 2.8 Sebaran rasio sarana prasarana pangan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio Sarana Pangan	Jumlah Nagari	Persentase
1	$\leq 0,0348$	26	28,26
2	$> 0,0348 - 0,0427$	12	13,04
3	$> 0,0427 - 0,0627$	23	25,00
4	$> 0,0627 - 0,0864$	15	16,30
5	$> 0,0864 - 0,1075$	12	13,04
6	$> 0,1705$	4	4,35

Dari 92 nagari di Kabupaten Agam, 26 nagari masuk dalam prioritas 1 (28,26 %), 12 nagari prioritas 2 (13,04 %) dan 23 nagari prioritas 3 (25,00 %). Sedangkan 31 nagari masuk dalam prioritas 4 – 6. Kecamatan Palupuh memiliki Prioritas 1 lebih dominan pada jumlah prasarana dan sarana penyedia pangan.

Gambar 2.8 Peta Komposit Indikator Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan



2.4 Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Agam dari tahun 2021-2024 mencapai 1,6 %, sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mencapai 19,76 % dan 15,52 %. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 65,86 %. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, terdapat beberapa strategi pemerintah dalam peningkatan ketersediaan pangan melalui :

- a. Penganekaragaman pangan;
- b. Peningkatan produksi bibit dan benih dalam negeri;
- c. Pembinaan petani dalam pembudidayaan bibit dan benih;
- d. Bantuan pemasaran;
- e. Pemberian subsidi untuk benih dan bibit; dan
- f. Penanggulangan krisis pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan pangan pemerintah dan Cadangan pangan pemerintah daerah, mobilisasi Cadangan pangan Masyarakat, mengerakka partisipasi Masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.

Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Agam 2021-2026, sektor pertanian, yaitu :

- a. Penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan pertanian, irigasi;
- b. Optimasi lahan dengan pengendalian alih fungsi lahan dan pemanfaatan lahan terlantar;

- c. Penguatan kelembagaan seperti kelompok tani;
- d. Penyediaan teknologi dan informasi dan jaringan untuk mendukung akses pemasaran dan sarana produksi;
- e. Fasilitasi pemasaran dan akses modal;
- f. Fasilitasi penyediaan teknologi tepat guna dan teknologi pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah; dan
- g. Fasilitasi penyediaan sarana prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran.

Serta beberapa program yang terkait dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, yaitu :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian khususnya padi, jagung, cabe, dan bawang merah;
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor peternakan;
- c. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor perkebunan; dan
- d. Pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan pengendalian penyakit hewan menular.

Dinas Pertanian Agam melalui rencana strategis periode 2021-2026 telah menyusun beberapa strategi terkait dalam peningkatan ketersediaan pangan.

Strategi tersebut adalah :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman-tanaman pangan (serealia, aneka kacang dan umbi);
- b. Peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna;
- c. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan;
- d. Peningkatan swasembada pangan dan daging berkelanjutan;

- e. Perlindungan sumber daya lahan, air irigasi, sarana dan kelembagaan;
- f. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur pertanian;
- g. Peningkatan efisiensi, kualitas, jumlah olahan produk pertanian dan pemasaran hasil;
- h. Peningkatan mutu hasil, pengembangan pengelolaan pasca panen, promosi dan pemasaran; dan
- i. Memacu perkembangan kawasan pertanian dan peternakan yang terintegrasi.

<https://www.agamkab.go.id>

BAB III

KETERJANGKAUAN PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.



3.1 Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Rendah

a. Penduduk

Penduduk Kabupaten pada tahun 2024 adalah sebanyak 533.254 jiwa. Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 85.093 jiwa, Ampek Angkek sebanyak 45.608 jiwa, dan Banuhampu sebanyak 38.864 jiwa merupakan tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Agam. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Malalak dengan 10.756 jiwa. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin di Kabupaten Agam pada tahun 2024 sebesar 101 (setiap 100 penduduk wanita terdapat 101 penduduk pria)

b. Ketenagakerjaan

Sebanyak 69,48 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Agam pada tahun 2024 merupakan angkatan kerja, 4,96 persen diantaranya merupakan pengangguran (14.230 jiwa). Sebanyak 79,6 persen pengangguran berpendidikan SMA ke atas. Sebanyak 29,58 persen penduduk yang bekerja di Kabupaten Agam hanya memiliki ijazah tertinggi yang ditamatkan setingkat SD saja, sebanding dengan pekerja dengan pendidikan tertinggi di level SMA sederajat yaitu sebanyak 32,45 persen. Berdasarkan status pekerjaan, sebanyak 31,09 persen penduduk berusaha sendiri, 32,81 persen sebagai buruh/karyawan, dan 5,42 persen sebagai pekerja keluarga/buruh tidak dibayar.

Selama tahun 2024, tercatat sebanyak 1.342 jiwa laki-laki dan 1.600 jiwa perempuan yang terdaftar mencari kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam. Sebanyak 465 jiwa diantaranya merupakan tamatan SMA sederajat. Sebagian besar pencari kerja berada pada rentang usia 20–29 tahun, yaitu sebanyak 1.464 jiwa.

Secara global, seseorang yang hidup di bawah ambang batas US\$ 1,25

– *Purchasing Power Parity* (PPP) Bank Dunia per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin. PPP ditentukan menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Di Kabupaten Agam, garis kemiskinan sebesar Rp. 530.290/kapita/bulan pada tahun 2024, terdapat sebesar 34.820 ribu jiwa di Kabupaten Agam yang dinyatakan miskin atau setara dengan 6,83 persen penduduk Kabupaten Agam.

Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (IKP, 2022). Kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan kerentanan pangan di suatu wilayah. Jika harga pangan tidak berbanding lurus dengan pendapatannya maka keluarga miskin akan semakin tertekan, sehingga akan berpengaruh ke kebutuhan lain seperti Pendidikan dan Kesehatan.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Agam. Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Agam mengalami penurunan di tahun 2022-2023 dan kenaikan dari 6,75% (33.310 ribu jiwa) tahun 2020 menjadi 6,83 % (34.820 ribu jiwa) tahun 2024. Secara rinci persentase populasi di bawah garis kemiskinan Kabupaten Agam dapat disajikan dalam tabel 3.1, sedangkan persentase penduduk miskin pada desil 1 dapat dilihat pada tabel 3.2, dan tabel 3.3 terkait persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah pada desil 1 persentil 1.

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Agam

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk miskin	6,75	6,85	6,22	6,6	6,83

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2025, BPS

Gambar 3.1 Grafik Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Agam



Tabel 3.2 Persentase Penduduk Miskin pada Desil 1

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Tanjung Mutiara	5095	34557	14,74
2	Lubuk Basung	8395	85093	9,87
3	Tanjung Raya	3778	38599	9,79
4	Matur	2357	19697	11,97
5	IV Koto	4519	26707	16,92
6	Banuhampu	3009	38864	7,74
7	Ampek Angkek	1770	45608	3,88
8	Baso	2578	37833	6,81
9	Tilatang Kamang	2571	37657	6,83
10	Palupuh	3327	15422	21,57
11	Palembayan	4611	35369	13,04
12	Sungai Pua	1464	27986	5,23
13	Ampek Nagari	5660	30915	18,31
14	Candung	1565	25948	6,03
15	Kamang Magek	1335	22243	6,00
16	Malalak	678	10756	6,30
Jumlah		52712	533254	9,88

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Tingkat Kesejahteraan Rendah pada Desil 1 Persentil 1

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tingkat Kesejahteraan Terendah	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Tanjung Mutiara	289	34557	0,84
2	Lubuk Basung	579	85093	0,68
3	Tanjung Raya	167	38599	0,43
4	Matur	145	19697	0,74
5	IV Koto	447	26707	1,67
6	Banuhampu	172	38864	0,44
7	Ampek Angkek	48	45608	0,11
8	Baso	97	37833	0,26
9	Tilatang Kamang	71	37657	0,19
10	Palupuh	369	15422	2,39
11	Palembayan	262	35369	0,74
12	Sungai Pua	48	27986	0,17
13	Ampek Nagari	492	30915	1,59
14	Candung	50	25948	0,19
15	Kamang Magek	87	22243	0,39
16	Malalak	17	10756	0,16
Jumlah		3340	533254	0,63

Pada tingkat nagari berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2024 terdapat 52 nagari yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 0,0027 (56,52%) Prioritas 1. Sebanyak 10 nagari (10,87%) masuk prioritas 2, dan 4 nagari (4,35%) masuk Prioritas 3. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar nagari di wilayah kabupaten masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Ketimpangan tingkat kesejahteraan ini juga mencerminkan perlunya penguatan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif dan terarah.

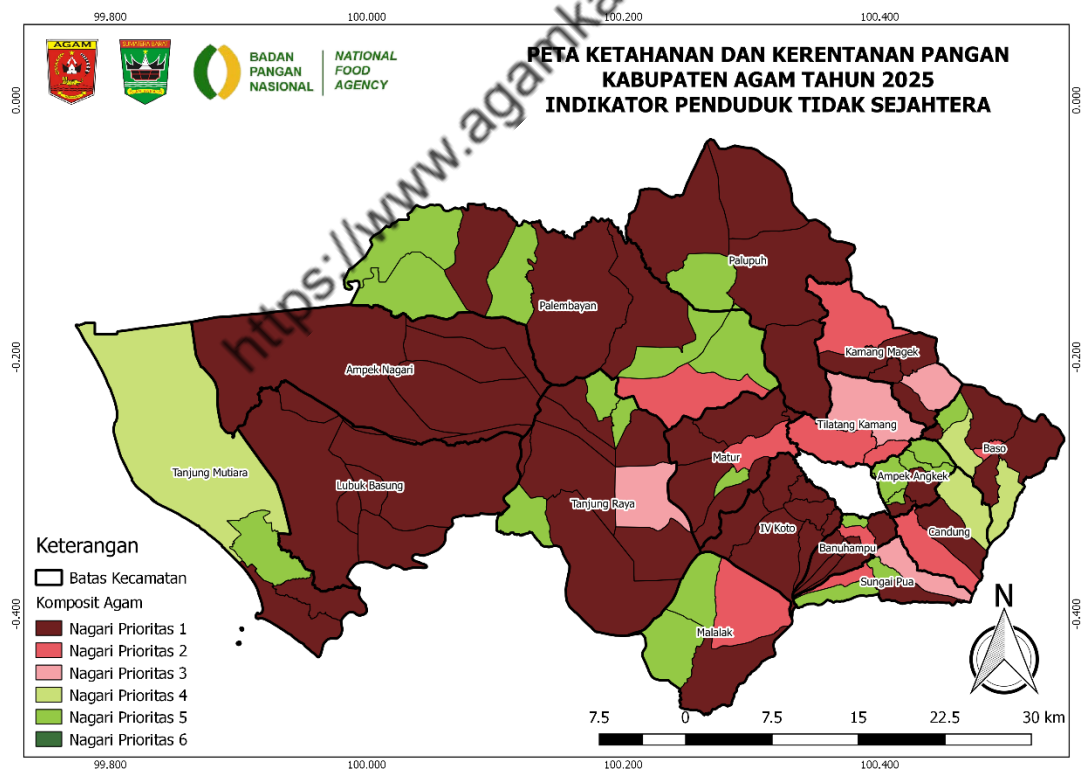
Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan di kabupaten ke depan perlu terus ditingkatkan, dengan fokus utama diarahkan pada 66 nagari prioritas tersebut, sebanyak 26 nagari berada pada prioritas 4 dan 5. Secara rinci nagari dengan tingkat kesejahteraan rendah dapat dilihat pada

tabel 3.4. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses penghapusan kemiskinan ekstrem, meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial ekonomi yang memadai.

Tabel 3.4 Sebaran Nagari dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Nagari	Persentase
1	$\geq 0,0026$	52	56,52
2	$0,0015 < 0,0026$	10	10,87
3	$0,0008 < 0,0015$	4	4,35
4	$0,0003 < 0,0008$	4	4,35
5	$0,0000 < 0,0003$	22	23,91
6	$< 0,0000$	0	0,00

Gambar 3.2 Peta Komposit Indikator Penduduk Tidak Sejahtera



3.2 Akses Transportasi

Terdapat 2.021,72 km jalan di Kabupaten Agam pada tahun 2024

dimana sepanjang 138,56 km merupakan jalan negara yang berstatus baik dengan permukaan hotmix; 188,53 km jalan provinsi yang keseluruhannya telah di hotmix; dan berstatus baik dan 1.694,63 km sisanya merupakan jalan kabupaten dengan 18,09 persennya masih kerikil dan tanah, selain itu 8,15 persen jalannya masih berstatus rusak berat. Kabupaten Agam dengan kondisi geografis yang dilalui oleh banyak sungai dan anak sungai, membutuhkan jembatan sebagai penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dari catatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tercatat sebanyak 320 jembatan di Kabupaten Agam, yang tersebar di semua kecamatan yang ada. Kecamatan Lubuk Basung merupakan kecamatan yang memiliki jumlah jembatan terbanyak yaitu sebanyak 68 jembatan, diikuti oleh Kecamatan Ampek Nagari dengan 32 jembatan.

Tabel 3.5 Panjang Jalan dan Jenis Jalan

No	Kecamatan	Panjang Jalan (km)	Jenis Permukaan Jalan Terluas	Dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
1	Tanjung Mutiara	213,5	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
2	Lubuk Basung	300,63	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
3	Tanjung Raya	103,8	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
4	Matur	69,35	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
5	IV Koto	54,75	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
6	Banuhampu	59	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
7	Ampek Angkek	82,1	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
8	Baso	107,96	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
9	Tilatang Kamang	115,15	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
10	Palupuh	101,65	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
11	Palembayan	164,6	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
12	Sungai Pua	48,5	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
13	Ampek Nagari	104,2	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
14	Candung	85,54	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
15	Kamang Magek	63,15	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
16	Malalak	20,75	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
Total		1694,63		

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menjadi salah satu penyebab

kemiskinan, karena masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

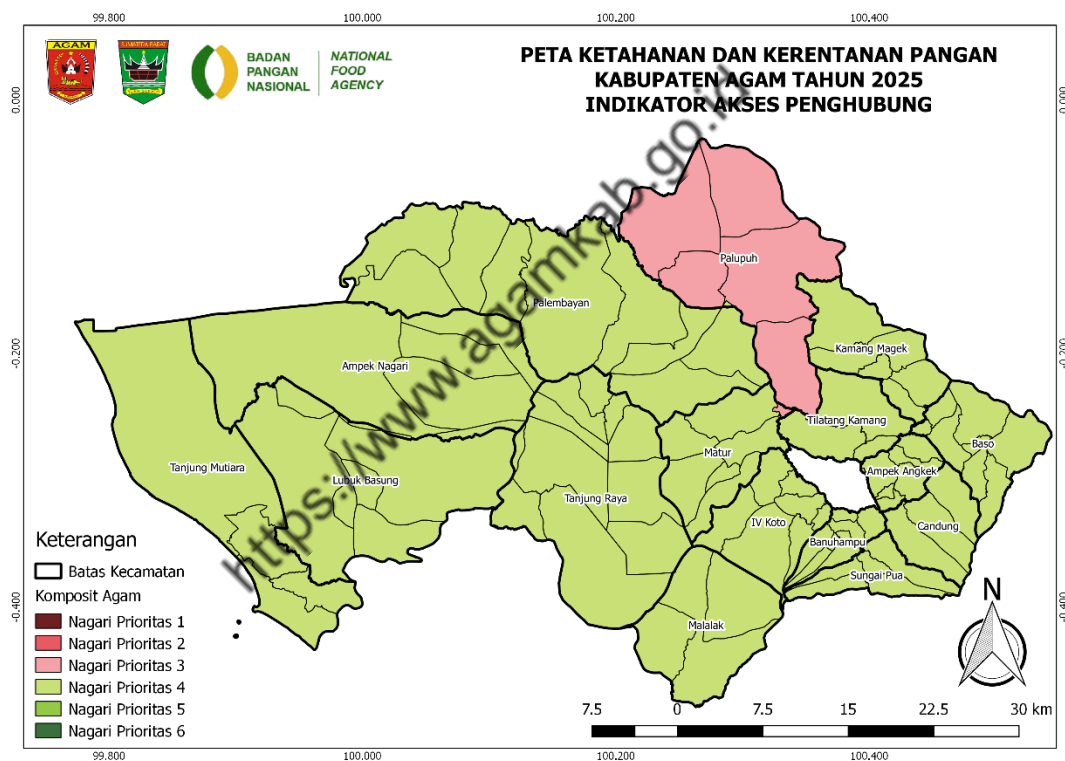
Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk memasarkan hasil pertanian dari desa-desa surplus ke wilayah lain. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa disertai dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar

pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2024, BPS, di Kabupaten Agam, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) terdapat di semua nagari di Kecamatan Palupuh.

Gambar 3.3 Peta Komposit Indikator Akses Penghubung



3.3 Peternakan

Produksi ternak terbesar di Kabupaten Agam pada tahun 2024 yakni populasi sapi potong sebanyak 31.785 ekor, kambing sebanyak 12.971 ekor, dan kerbau sebanyak 12.693 ekor. Produksi daging terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu daging sapi sebanyak 2.076.858 kg pada tahun 2023 menjadi 1.727.376 kg pada tahun 2024, daging kerbau potong sebanyak 41.454 kg pada

tahun 2023 menjadi 34.398 kg pada tahun 2024, dan daging kambing terjadi peningkatan pada tahun 2024 sebanyak 110.640 kg dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 40.020 kg.

Produksi telur juga terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu telur ayam dari 2.181.348 kg pada tahun 2023 menjadi 1.617.940,80 kg pada tahun 2024, telur itik 932.782,68 kg pada tahun 2023 menjadi 891.949,08 kg pada tahun 2024, telur ayam bukan ras 208.786,41 kg pada tahun 2023 menjadi 204.372 kg, dan telur puyuh terjadi peningkatan pada tahun 2024 sebanyak 75.228 kg dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 69.740 kg.

Total produksi susu sapi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 232.650 liter pada tahun 2023 menjadi 174.611,70 liter pada tahun 2024. Sedangkan susu kerbau mengalami kenaikan tahun pada 2024 sebanyak 660,19 liter disbanding pada tahun 2023 sebanyak 640 liter.

3.4 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Pemerintah Kabupaten Agam memiliki strategi-strategi seperti yang termuat dalam RPJMD 2021-2026, diantaranya :

- a. Meningkatkan kinerja lapangan usaha yang dominan diusahakan Masyarakat, antara lain :
 - Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang memiliki kemampuan dan keberdayaan secara sosial maupun secara ekonomi; dan
 - Meningkatkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan.
- b. Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat penyandang masalah

sosial.

- c. Meningkatkan infrastruktur dasar pendukung kegiatan ekonomi Masyarakat.
- d. Meningkatkan konektivitas antar kawasan, antara lain :
 - Strategi peningkatan kondisi jalan dan jembatan;
 - Strategi meningkatkan jaringan dan layanan transportasi umum; dan
 - Strategi peningkatan layanan jaringan internet.
- e. Meningkatkan realisasi investasi.
- f. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Selain infrastruktur, adaptasi terhadap anomali iklim (*Climate Change Adaptation*) akan menjadi salah satu faktor kunci untuk menjamin kesinambungan perbaikan akses pangan dan penghidupan rumah tangga yang miskin ataupun rentan. Petani kecil harus terlindungi dari besarnya peluang gagal panen yang disebabkan adanya anomali iklim melalui inisiatif perlindungan yang inovatif

BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.



4.1 Akses Terhadap Akses Air Bersih

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak⁴. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih per Kecamatan

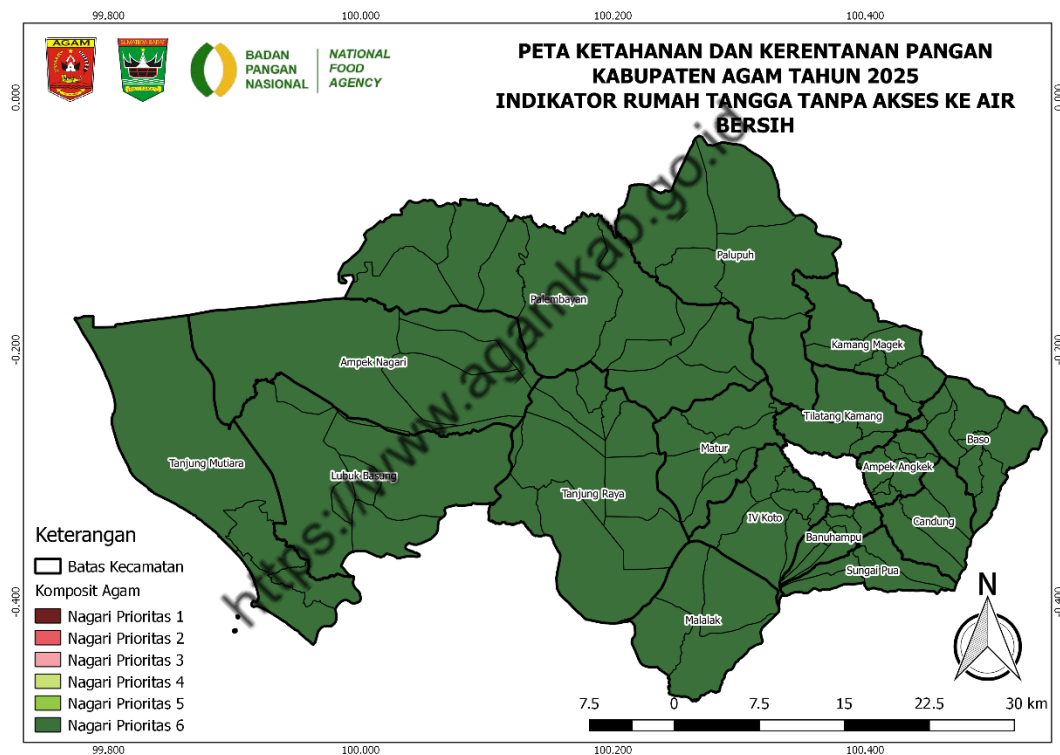
No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	Rasio
1	Tanjung Mutiara	9851	0	100
2	Lubuk Basung	25985	0	100
3	Tanjung Raya	12192	0	100
4	Matur	6462	0	100
5	IV Koto	8703	0	100
6	Banuhampu	11675	0	100
7	Ampek Angkek	13997	0	100
8	Baso	12232	0	100
9	Tilatang Kamang	12207	0	100
10	Palupuh	4825	0	100
11	Palembayan	10603	0	100
12	Sungai Pua	8152	0	100
13	Ampek Nagari	8671	0	100
14	Candung	8115	0	100
15	Kamang Magek	7321	0	100
16	Malalak	3567	0	100
Total		164558	0	100

⁴ Permenkes 416 Tahun 1990

Tabel 4.2 Sebaran Nagari Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Nagari	Persentase
1	$\geq 0,2824$	0	0
2	$0,1824 < 0,2824$	0	0
3	$0,0854 < 0,1824$	0	0
4	$0,0406 < 0,0854$	0	0
5	$0,0183 < 0,0406$	0	0
6	$< 0,0183$	92	100

Gambar 4.1 Peta Komposit Indikator Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih



4.2 Rasio Tenaga Kesehatan

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas)

dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

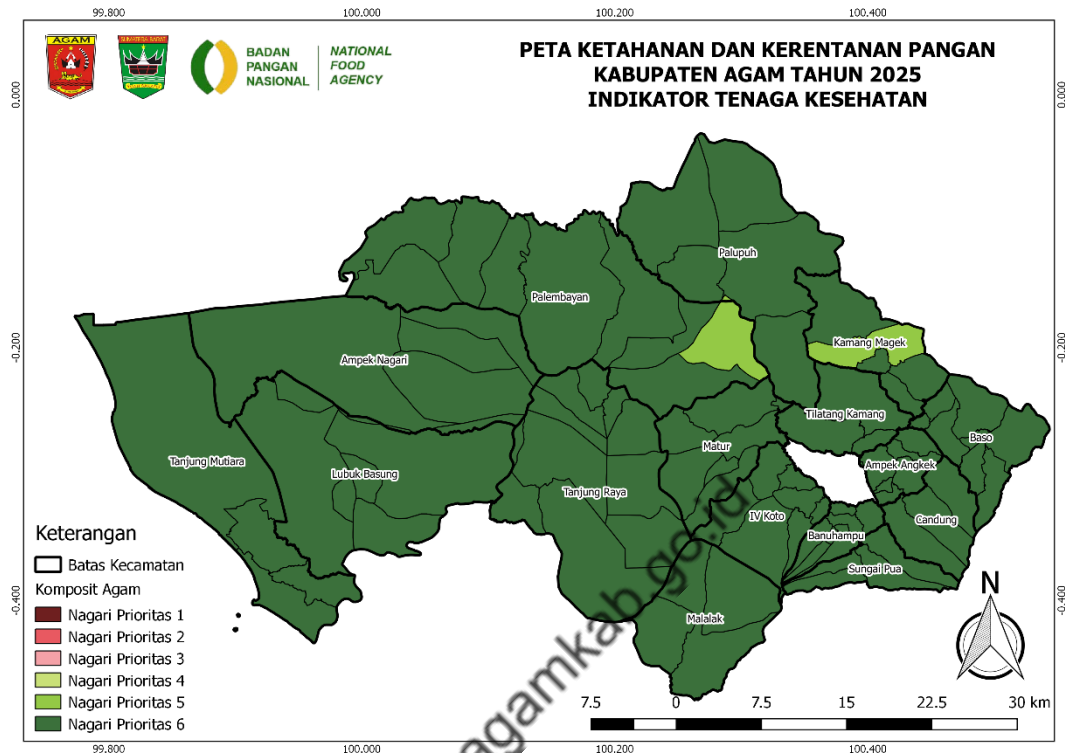
Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah Tenaga Kesehatan	Rasio
1	Tanjung Mutiara	34557	167,97	49	29,17
2	Lubuk Basung	85093	173,86	207	119,06
3	Tanjung Raya	38599	158,17	58	36,67
4	Matur	19697	210,24	29	13,79
5	IV Koto	26707	388,64	31	7,98
6	Banuhampu	38864	1366,05	150	10,98
7	Ampek Angkek	45608	1487,54	100	6,72
8	Baso	37833	538,17	53	9,85
9	Tilatang Kamang	37657	392,83	125	31,82
10	Palupuh	15422	65,25	18	27,59
11	Palembayan	35369	101,12	82	58,35
12	Sungai Pua	27986	631,88	22	3,48
13	Ampek Nagari	30915	115,06	48	41,72
14	Candung	25948	496,23	51	10,28
15	Kamang Magek	22243	212,02	30	14,15
16	Malalak	10756	102,94	19	18,46
Total		533254	6607,97	1072	15,87

Tabel 4.4 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di Nagari Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Nagari	Persentase
1	$\geq 11,4800$	0	0,00
2	$6,2500 < 11,4800$	0	0,00
3	$2,8909 < 6,2500$	0	0,00
4	$0,8194 < 2,8909$	0	0,00
5	$0,3213 < 0,8194$	2	2,17
6	$< 0,3213$	90	97,83

Gambar 4.2 Peta Komposit Indikator Tenaga Kesehatan



4.3 Dampak (*Outcome*) Dari Status Kesehatan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan

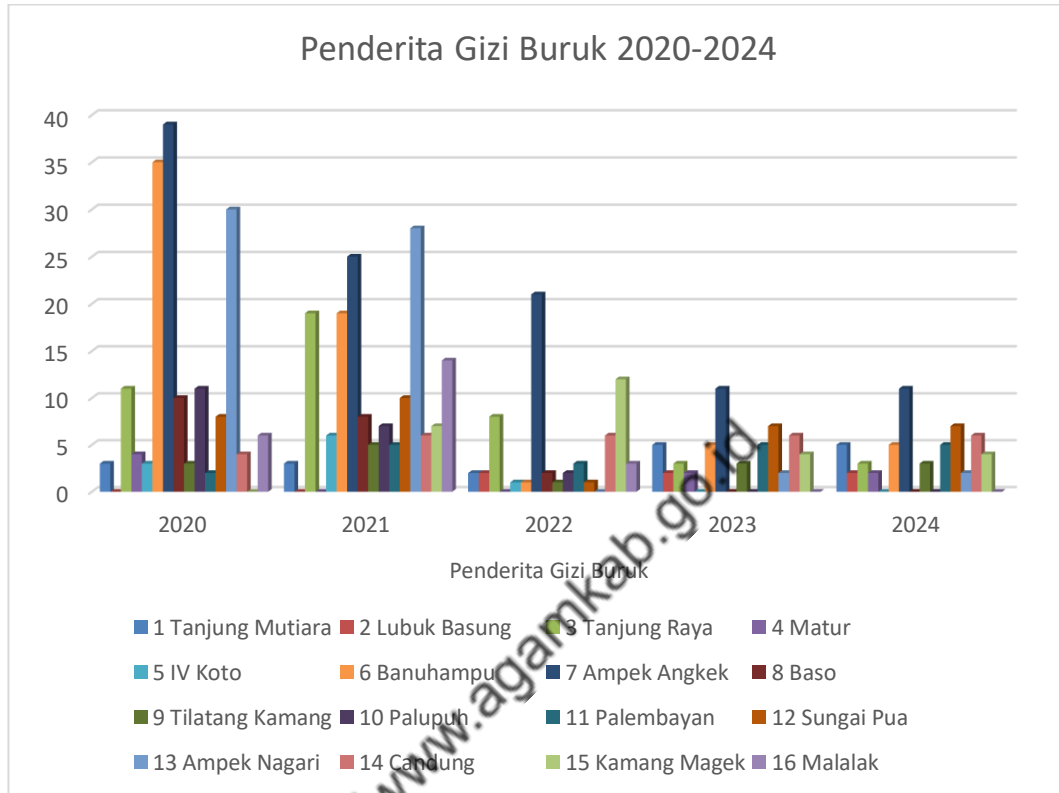
Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Agam pada tahun 2024 sebanyak 78 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Tanjung Raya (13 balita) dan Ampek Angkek (12 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan Sungai Pua (0 balita), dan Palupuh (0 balita).

Tabel 4.5 Jumlah Penderita Gizi Buruk per Kecamatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanjung Mutiara	3	3	2	5	9
2	Lubuk Basung	0	0	2	2	9
3	Tanjung Raya	11	19	8	3	13
4	Matur	4	0	0	2	2
5	IV Koto	3	6	1	0	2
6	Banuhampu	35	19	1	5	4
7	Ampek Angkek	39	25	21	11	12
8	Baso	10	8	2	0	2
9	Tilatang Kamang	3	5	1	3	1
10	Palupuh	11	7	2	0	0
11	Palembayan	2	5	3	5	3
12	Sungai Pua	8	10	1	7	0
13	Ampek Nagari	30	28	0	2	3
14	Candung	4	6	6	6	8
15	Kamang Magek	0	7	12	4	4
16	Malalak	6	14	3	0	6
Jumlah		169	162	65	55	78

Gambar 4.3 Grafik Jumlah Penderita Gizi Buruk 2020-2024



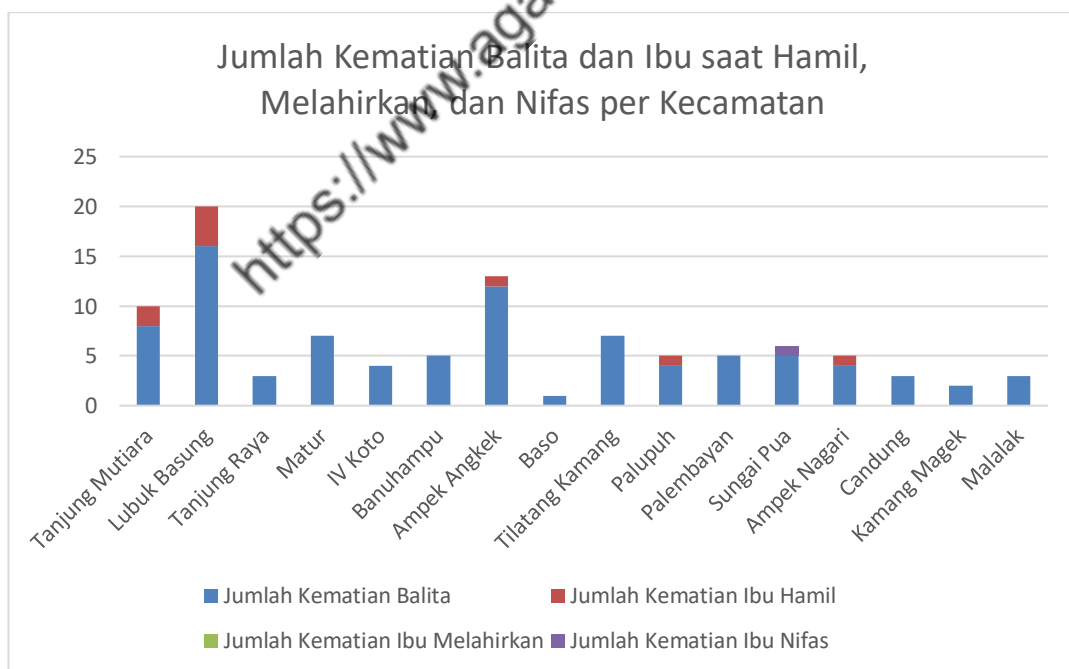
Angka kematian balita dan ibu merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Agam adalah 89 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Lubuk Basung (16 jiwa) dan terendah terdapat di Kecamatan Baso (1 jiwa). Angka kematian ibu saat hamil sebanyak 9 jiwa, sedangkan saat melahirkan sebanyak 0 jiwa, dan saat nifas sebanyak 1 jiwa. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Hamil, Melahirkan, dan Nifas per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu			Total
			Hamil	Melahirkan	Nifas	
1	Tanjung Mutiara	8	2	0	0	10
2	Lubuk Basung	16	4	0	0	20
3	Tanjung Raya	3	0	0	0	3
4	Matur	7	0	0	0	7

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu			Total
			Hamil	Melahirkan	Nifas	
5	IV Koto	4	0	0	0	4
6	Banuhampu	5	0	0	0	5
7	Ampek Angkek	12	1	0	0	13
8	Baso	1	0	0	0	1
9	Tilatang Kamang	7	0	0	0	7
10	Palupuh	4	1	0	0	5
11	Palembayan	5	0	0	0	5
12	Sungai Pua	5	0	0	1	6
13	Ampek Nagari	4	1	0	0	5
14	Candung	3	0	0	0	3
15	Kamang Magek	2	0	0	0	2
16	Malalak	3	0	0	0	3
Total		89	9	0	1	98

Gambar 4.4 Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Hamil, Melahirkan, dan Nifas per Kecamatan



4.4 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam 2021 – 2026 menetapkan beberapa program terkait pembangunan bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan perempuan dalam strategi membangun sumber daya manusia, antara lain :

- a. Meningkatkan akses dan mutu layanan Kesehatan;
- b. Pengembangan system penyediaan air minum dan penanganan Kawasan kumuh;
- c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan tata kelola kependudukan;
- d. Menurunkan jumlah PMKS dan meningkatkan perlindungan sosial;
- e. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan kepada perempuan dan anak;
- f. Meningkatkan daya saing tenaga kerja; dan
- g. Meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Masalah gizi kronis (*stunting*) masih tetap tinggi di Kabupaten Agam, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama *stunting* dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya

adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak

di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan). Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.
- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui

walaupun anak sakit.

- Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
- Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
- Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.

b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan

dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

<https://www.agamkeb.go.id>

BAB V

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab I, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Gambar 5.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1 Kondisi Ketahanan Pangan

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, nagari dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (nagari) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (nagari) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (nagari) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (nagari) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

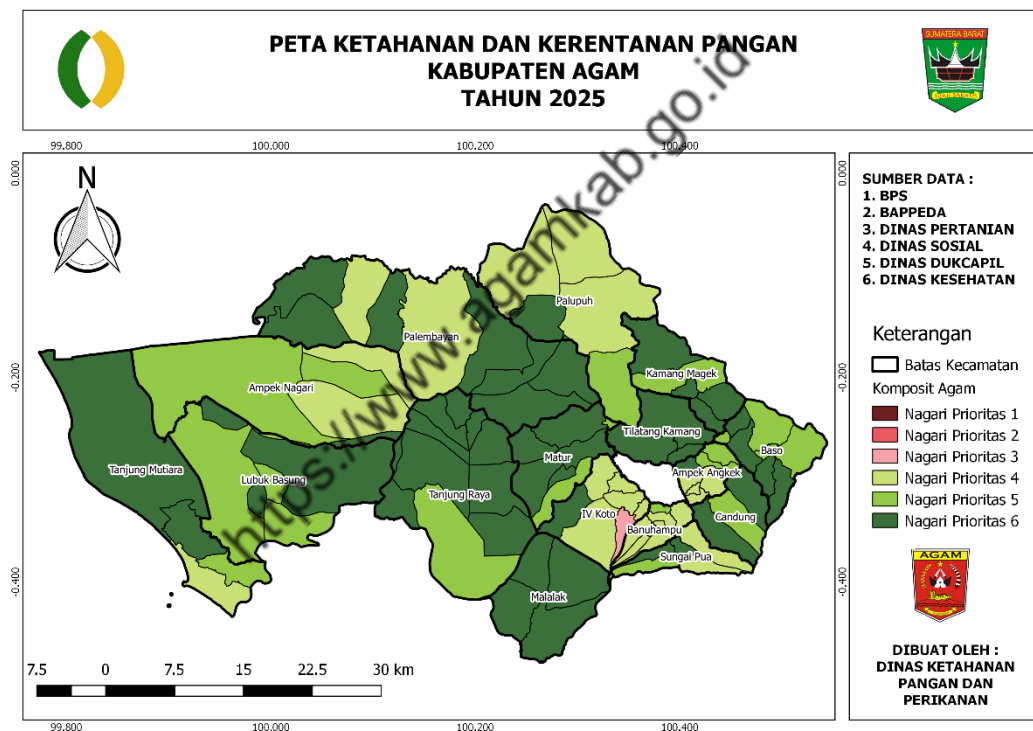
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 92 nagari yang ada di Kabupaten Agam maka didapatkan 0 nagari (Prioritas 1), 0 nagari (Prioritas 2), 1 nagari (Prioritas 3), 24 nagari (Prioritas 4), 20 nagari (Prioritas 5) dan 47 nagari (Prioritas 6). Secara rinci sebaran jumlah nagari berdasarkan prioritas bisa dilihat

di tabel 5.1

Tabel 5.1 Sebaran Jumlah Nagari Berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Nagari	Persentase
1	0	0,00
2	0	0,00
3	1	1,09
4	24	26,09
5	20	21,74
6	47	51,09

Gambar 5.1 Peta Komposit Kabupaten Agam



Nagari rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat 1 nagari yakni di wilayah Kecamatan IV Koto Nagari Koto Tuo.

5.2 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

Nagari Prioritas 3 adalah Nagari yang memiliki tingkat kerentanan yang agak aman pangan dari pada nagari prioritas 1 dan 2. Dengan demikian, prioritas

6 adalah nagari yang cenderung tahan pangan. Nagari dipetakan dalam gradasi warna merah untuk kelompok prioritas 1, 2, dan 3 sedangkan gradasi warna hijau untuk prioritas 4, 5, dan 6.

Penting untuk diingat, bahwa tidak semua rumah tangga di nagari-nagari prioritas tinggi (prioritas 2-3) tergolong rawan pangan, demikian juga tidak semua rumah tangga di nagari-nagari prioritas rendah (prioritas 4, 5, dan 6) tergolong tahan pangan. Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi nagari yang lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.

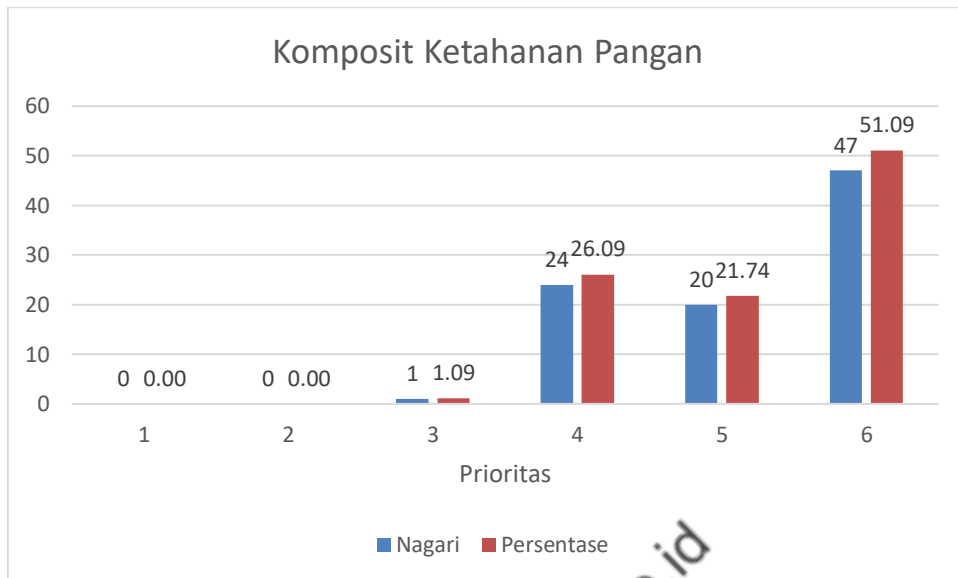
Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan, 92 Nagari di 16 kecamatan di Kabupaten Agam dikelompokkan menjadi enam kelompok prioritas sebagai berikut : tidak ada nagari pada prioritas 1 dan 2, 1 Nagari (Nagari Koto Tuo di Kecamatan IV Koto) pada prioritas 3 (1,09 persen), 24 nagari pada prioritas 4 (26,09 persen), 20 nagari pada prioritas 5 (21,74 persen), dan 47 nagari pada prioritas 6 (51,09 persen). Oleh karena itu, terdapat 1 nagari di Kabupaten Agam yang tergolong dalam nagari rawan pangan.

Nagari rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) Rasio Penduduk Tidak Sejahtera, (2) Rasio Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan, dan (3) Rasio Luas Lahan Pertanian.

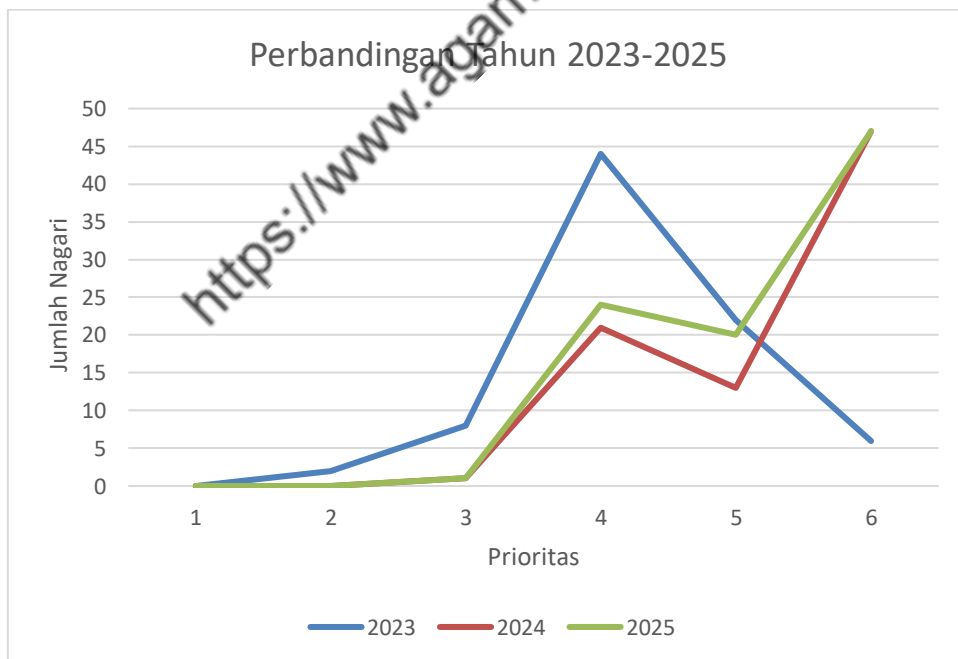
Diseluruh nagari, karakteristik utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan adalah :

- a. Rasio Luas Lahan Pertanian adalah 20 poin;
- b. Rasio Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan adalah 125 poin;
- c. Rasio Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Rendah adalah 80 poin;
- d. Rasio Desa Tanpa Akses Penghubung Memadai adalah 0 poin;
- e. Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih adalah 0 poin; dan
- f. Rasio Tenaga Kesehatan adalah 0 poin.

Gambar 5.2 Grafik Komposit Ketahanan Pangan 2025



Gambar 5.3 Grafik Perbandingan Komposit Ketahanan Pangan Tahun 2023-2025



BAB VI

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (nagari), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah nagari diprioritaskan pada:

- a. Nagari prioritas 3 berada di Kecamatan IV Koto (Nagari Koto Tuo);
- b. Nagari-nagari yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain;
- c. Nagari-nagari di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan; dan
- d. Nagari-nagari pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di nagari seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan local;
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru;
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan; dan
- e. Penyediaan tenaga kesehatan.

Penurunan kemiskinan yang berkesinambungan dan kemajuan program-program pemerintah lainnya telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Agam. Namun demikian, kemajuan ini memiliki resiko stagnasi jika tantangan utama tidak ditangani. Terdapat 3 faktor utama yang memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah, yaitu: i) meningkatkan akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, terutama untuk rumah tangga miskin; ii) akselerasi intervensi untuk pencegahan kekurangan gizi. Hal ini untuk menyikapi perubahan kompleksitas masalah kedaulatan pangan, dari hanya kurang pangan ke *Multiple Burden Malnutrition*; dan iii) mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

Sub Bab dibawah ini akan menjelaskan tentang rekomendasi yang terkait dengan 3 faktor utama di atas. Ketiga faktor tersebut saling terkait dalam meletakkan aspek gizi menjadi tema sentral yang bersinggungan erat dengan

kedua aspek lainnya. Hal ini mencerminkan pentingnya pengarusutamaan pendekatan yang berbasis gizi untuk program dan kebijakan ketahanan pangan dan gizi.

6.1 Akses Ekonomi

Isu kemiskinan merupakan dampak dari permasalahan pembangunan yang muncul dari berbagai bidang seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, infrastruktur yang belum merata, masih tingginya penyandang masalah sosial dan tentunya kinerja ekonomi yang belum mampu memberdayakan penduduk miskin sehingga keluar dari kemiskinan, maka untuk penanggulangannya memerlukan strategi dan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi baik antar bidang pembangunan maupun antar tingkatan lembaga pemerintahan.

Dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,83 persen pada 2024, maka program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung rumah tangga miskin dalam mendapatkan akses pangan yang memadai. Program jangka panjang juga telah dilakukan yang mencakup penguatan dan diversifikasi mata pencaharian serta perluasan infrastruktur dasar dan pelayanan. Selain itu, perlu peningkatan alokasi anggaran untuk program bantuan sosial dan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sensitivitas gizi dari program, maka program tersebut dapat memiliki dampak penting pada akses pangan.

Peningkatan sistem distribusi pangan terutama bagi masyarakat di wilayah daerah terpencil (khususnya di Kecamatan Palupuh) perlu dilakukan karena distribusi pangan menjadi kendala pada musim-musim tertentu. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan sarana dan prasarana transportasi seperti jalan serta pembangunan pasar tradisional dan memperkuat kelembagaan pasar. Stabilisasi pasokan dan harga pangan juga perlu diperhatikan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk

melindungi petani produsen beras dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga pasar yang terlalu tinggi.

Tinjauan dan perbaikan insentif untuk produksi pangan, termasuk jaminan harga, subsidi dan pembatasan perdagangan, dapat membantu memastikan bahwa produksi pangan bergizi tinggi, seperti komoditas kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan memperoleh prioritas yang seperti produksi pangan pokok. Meningkatkan produksi hasil pertanian tersebut mungkin memerlukan biaya yang lebih tinggi, sehingga diperlukan insentif bagi petani untuk menghasilkan bahan pangan yang bergizi. Pada akhirnya, hal ini akan membantu mengurangi risiko kekurangan gizi bagi masyarakat terutama bagi mereka yang berada pada status rentan dengan dukungan jaring pengaman sosial yang memadai.

6.2 Dampak terhadap Gizi

Di Kabupaten Agam, permasalahan kekurangan gizi bukan hanya masalah penduduk miskin. Proporsi anak-anak yang *stunting* juga cenderung lebih besar dari proporsi penduduk miskin. Untuk penduduk tidak miskin tetapi kurang gizi, hambatan untuk mencapai status yang lebih bergizi belum tentu terkait pada akses ekonomi atau program pengentasan kemiskinan pemerintah, akan tetapi juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap praktek pola makan dan gizi yang baik serta pola asuh yang kurang tepat. Sebaliknya, untuk penduduk miskin yang kurang gizi akan menghadapi tambahan permasalahan untuk akses ekonomi dan sosial.

Pendekatan multi-sektoral untuk mengurangi dan mencegah kekurangan gizi di Kabupaten Agam sangat penting dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta sektor swasta. Koordinasi lintas sektor antar lembaga pemerintah sangat perlu ditingkatkan guna mengatasi hambatan kelembagaan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah. Koordinasi yang baik dapat

memperbaiki sensitivitas gizi dari program kesejahteraan, pertanian, maupun program perubahan iklim yang ada.

Ada banyak peluang untuk meningkatkan sensitivitas gizi dalam program-program pertanian. Program penyuluhan pertanian dapat lebih diarahkan kepada memberi masukan dan membantu petani dalam budidaya, penanganan pasca panen dan penyimpanan berbagai tanaman pangan bukan hanya di lahan pertanian tetapi juga dipekarangan rumah, terutama untuk kecamatan dan nagari yang termasuk rentan terhadap kondisi rawan pangan. Sektor pertanian akan mendapat manfaat dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih diarahkan ke spesies dan varietas tanaman pangan yang relatif memiliki nilai gizi tinggi. Program-program ini dapat juga bekerjasama dengan kelompok tani yang telah ada untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan dan gizi kepada masyarakat. Dengan melibatkan kaum perempuan secara lebih luas dapat bertanggung jawab dalam produksi pangan, pembelian, persiapan, distribusi dalam keluarga dan pemberian makanan, terutama pada masyarakat petani baik dalam desain program pertanian maupun sebagai peserta program, juga berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.

Di luar program-program pemerintah, peran sektor swasta dalam meningkatkan status gizi di Agam semakin penting mengingat sektor swasta dapat meningkatkan ketersediaan bahan pangan olahan yang umumnya tinggi lemak dan gula dengan harga yang relatif murah. Berkaitan dengan pendidikan, keterjangkauan dan peningkatan kesadaran tentang makanan bergizi dan seimbang harus terus menjadi strategi utama untuk mengatasi kesenjangan gizi di Agam. Untuk melengkapi strategi program gizi tersebut, pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk membuat dan mendistribusikan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Program jaring pengaman sosial dan program pencegahan gizi juga dapat berperan penting dalam merangsang sektor swasta untuk memproduksi makanan bergizi yang sesuai standar internasional

yang dirancang khusus untuk kelompok rentan. Selain itu, perlunya menambahkan komponen gizi ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya dalam bentuk kupon gizi untuk membantu memberikan insentif untuk gizi yang baik bagi rumah tangga miskin.

6.3 Perubahan Iklim

Perubahan iklim tetap menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi rumah tangga yang mata pencahariannya bergantung pada produksi pertanian. Mengingat iklim makin tidak menentu,antisipasi dampak perubahan iklim seperti penyimpangan curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas perubahan iklim, peningkatan resiko hama tanaman yang berdampak negatif ke petani, membuat sulit bagi para petani untuk memperkirakan kalender pertanian. Hal ini berdampak pada rendahnya produksi dan produktifitas tanaman yang pada akhirnya akan mengganggu mata pencaharian petani secara keseluruhan.

Agam terus menghadapi bencana, tidak hanya dalam skala besar dan tiba-tiba (*sudden onset*) tapi juga bencana yang dapat diprediksi (*slow onset*) yang terkait dengan perubahan iklim. Misalnya, kekeringan, banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh curah hujan ekstrim yang berdampak terhadap memburuknya kerawanan pangan yang ada, sehingga membutuhkan tanggap darurat yang menyerap sumber daya keuangan dan sumber daya manusia baik di tingkat lokal kabupaten maupun di tingkat provinsi.

Keberlanjutan pasokan air dan jasa lingkungan lainnya merupakan hal penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Pengelolaan air dapat diperkuat melalui peningkatan perencanaan tata ruang dan sistem penggunaan lahan, pengelolaan konservasi dan kawasan ekosistem penting, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, dan percepatan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk

mendukung kegiatan pertanian (termasuk irigasi, bendungan, dam) dengan menggunakan teknologi iklim yang sudah terbukti. Peluang lainnya termasuk meningkatkan sistem peringatan dini untuk bencana yang terprediksi (*slowonset*) dan mendadak (*sudden-onset*) terkait dengan perubahan iklim, menciptakan program insentif untuk penelitian dan pengembangan daya tahan tanaman terhadap kondisi iklim dan hama tanaman yang baru.

Akses ekonomi, dampak gizi dan sensitifitas terhadap perubahan iklim merupakan 3 faktor utama yang mempengaruhi pencapaian ketahanan pangan dan gizi di Agam. Dengan kondisi seperti sekarang ini, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian iklim, maka Kabupaten Agam akan menghadapi tantangan yang besar. Hal ini membutuhkan program-program pemerintah yang lebih fokus pada pengurangan kemiskinan, program gizi-sensitif, diversifikasi pangan dan strategi adaptasi iklim. Melalui peningkatan dialog dan koordinasi lintas sektor, serta lebih banyak pada upaya untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya sektor publik dan swasta, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, setara, sejahtera dan tahan terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana lainnya.

6.4 Implikasi Kebijakan

Untuk menjawab 3 (tiga) tantangan diatas yaitu akses ekonomi, gizi, dan iklim, maka Pemerintah Kabupaten Agam perlu untuk melakukan :

1. Menjawab masalah kekurangan gizi (*undernutrition*), maka pemerintah perlu melakukan penyesuaian arah dan fokus kebijakan dari ketahanan pangan menuju Ketahanan Pangan dan Gizi, terutama di kecamatan-kecamatan atau nagari yang rentan atas kondisi rawan pangan. Pemerintah sebaiknya melakukan kaji ulang fokus pangan pokok, seperti dengan memasukkan pangan lokal (umbi-umbian, jagung konsumsi, ikan, sayuran, dan buah lokal).
2. Pemerintah dapat melakukan integrasi kebijakan pangan dan gizi, seperti : kebijakan pertanian sensitif gizi dan kesehatan, kebijakan gizi dan kesehatan

berbasis pangan lokal, serta kebijakan perdagangan dan industri sensitif pangan dan gizi,

3. Dukungan dari tingkat nasional, pemerintah pusat dapat melakukan sistem pangan terpadu, melalui :
 - a. Pendekatan multidimensi; (i) meningkatkan produksi pangan primer; (ii) mengurangi kehilangan pascapanen dan konsumsi; (iii) pengembangan budaya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
 - b. Pengembangan sistem pertanian ekologis multikomoditas, seperti Integrasi Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Ternak Ikan Perhutanan.
 - c. Pengembangan rantai pasok pangan berbasis IPTEK dan sensitif gizi.

6.5 Tantangan Ketahanan Pangan

Di Kabupaten Agam, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan utama bagi ketahanan pangan, diantaranya adalah :

1. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Agam dari tahun 2021-2024 mencapai 1,6 persen; sementara pertumbuhan produksi tanaman pangan dalam lima tahun terakhir hanya 1,87 persen untuk padi, -14,46 persen untuk jagung, -34,43 persen untuk ubi kayu, - 39,23 persen untuk ubi jalar. Rendahnya atau bahkan menurunnya produksi tanaman pangan ini ditengarai karena beberapa faktor seperti fluktuasi curah hujan dan terus berkurangnya lahan pertanian yang tersedia.
2. Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian juga merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Tingginya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan perumahan dapat mengurangi luasan lahan pertanian, khususnya pangan dari tahun ke tahun.
3. Rata - rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Agam pada tahun 2023 adalah sekitar 0,72 hektar per rumah

tangga petani (ST 2023). Dengan luas lahan yang sangat kecil tersebut, maka peningkatan produktivitas lahan tetap menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Agam untuk mengamankan produksi padi/beras dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan peningkatan daya saing komoditas pertanian.

4. Selain itu, tingginya persentase petani gurem berisiko mempengaruhi ketahanan pangan di Kabupaten Agam. Berdasarkan ST 2023 hampir 70,2 persen (57.926 rumah tangga) dari 82.505 rumah tangga usaha pertanian merupakan rumah tangga petani gurem (BPS, Kabupaten Agam dalam Angka, 2025)
5. Faktor lain yang terus menjadi penghambat pengembangan dibidang pertanian Adalah :
 - a. Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksploitasi berlebihan, anomali iklim dan degradasi lahan;
 - b. Belum optimalnya infrastruktur pertanian;
 - c. Tingkat kehilangan hasil (*losses*) yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;
 - d. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani;
 - e. Belum optimalnya kelembagaan petani; dan
 - f. Relatif terbatasnya tingkat pendidikan tani.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2025). *Kabupaten Agam dalam Angka*. Lubuk Basung: BPS.
- BPS. (2021-2025). *Kabupaten Agam dalam Angka*. Lubuk Basung: BPS.
- BPS. (2025). *Kecamatan dalam Angka*. Lubuk Basung: BPS.
- BPS. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian*. Lubuk Basung: BPS.
- BPS. (2015). *Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Agam*. Lubuk Basung: BPS.
- Badan Pangan Nasional. (2025). *Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Badan Pangan Nasional
- Badan Pangan Nasional. (2022). *Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*. Jakarta: Badan Pangan Nasional
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021- 2026
- Suryana, A. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol 32, No 2.:123-135
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- Diskominfo. (2025). *Statistik Sektoral Kabupaten Agam*. Lubuk Basung: Diskominfo.

LAMPIRAN

<https://www.agamkab.go.id>

PERHITUNGAN DATA INDIKATOR INDIVIDU

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA-Desa) 2025

Kabupaten :

Agam

					Arah Persepsi Indikator	Positif (+)	Positif (+)	Negatif (-)	Negatif (-)	Negatif (-)	Negatif (-)	Negatif (-)
					Aspek	Ketersediaan	Ketersediaan	Akses	Akses	Pemanfaatan	Pemanfaatan	Pemanfaatan
No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa BPS	Kode Desa Kemendagri	Nama Desa	1. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	2. Rasio Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	3. Rasio Jmlh Pddk tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk	4. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	6. Rasio Tenkes	6. Rasio Jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
1	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010001	13.06.01.2001	TIKU SELATAN	0,1016	0,0519	0,0150	1	0,0000	0,0314	0,0314
2	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010002	13.06.01.2002	TIKU UTARA	0,2821	0,0489	0,0145	1	0,0000	0,0394	0,0394
3	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010003	13.06.01.2003	TIKU LIMO JORONG	0,7352	0,1099	0,0008	1	0,0000	0,0539	0,0539
4	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010004	13.06.01.2004	DURIAN KAPEH DARUSSALAM	0,2114	0,0472	0,0000	1	0,0000	0,0199	0,0199
5	LUBUK BASUNG	1307020	1307020001	13.06.02.2005	MANGGOPOH	0,4201	0,0290	0,0118	1	0,0000	0,0487	0,0487
6	LUBUK BASUNG	1307020	1307020002	13.06.02.2002	GARAGAHAN	0,2288	0,0401	0,0091	1	0,0000	0,0656	0,0656
7	LUBUK BASUNG	1307020	1307020003	13.06.02.2004	KAMPUANG TANGAH	0,1415	0,0692	0,0026	1	0,0000	0,0049	0,0049
8	LUBUK BASUNG	1307020	1307020004	13.06.02.2003	KAMPUNG PINANG	0,0934	0,0749	0,0031	1	0,0000	0,0059	0,0059
9	LUBUK BASUNG	1307020	1307020005	13.06.02.2001	LUBUK BASUNG	0,2257	0,0890	0,0046	1	0,0000	0,0083	0,0083
10	AMPEK NAGARI	1307021	1307021001	13.06.13.2003	BAWAN	0,5588	0,0411	0,0116	1	0,0000	0,0710	0,0710
11	AMPEK NAGARI	1307021	1307021002	13.06.13.2004	SITANANG	1,0836	0,0324	0,0171	1	0,0000	0,0743	0,0743

12	AMPEK NAGARI	1307021	1307021003	13.06.13.2001	BATU KAMBING	0,4514	0,0985	0,0149	1	0,0000	0,0205	0,0205
13	AMPEK NAGARI	1307021	1307021004	13.06.13.2002	SITALANG	0,6626	0,0347	0,0453	1	0,0000	0,0761	0,0761
14	TANJUNG RAYA	1307030	1307030001	13.06.03.2001	TANJUNG SANI	0,6394	0,0360	0,0111	1	0,0000	0,1175	0,1175
15	TANJUNG RAYA	1307030	1307030002	13.06.03.2002	SUNGAI BATANG	0,3907	0,0599	0,0052	1	0,0000	0,0469	0,0469
16	TANJUNG RAYA	1307030	1307030003	13.06.03.2003	MANINJAU	0,3320	0,0895	0,0011	1	0,0000	0,0366	0,0366
17	TANJUNG RAYA	1307030	1307030004	13.06.03.2004	BAYUA	0,2303	0,0938	0,0062	1	0,0000	0,0439	0,0439
18	TANJUNG RAYA	1307030	1307030005	13.06.03.2007	DUO KOTO	0,1846	0,0965	0,0000	1	0,0000	0,0167	0,0167
19	TANJUNG RAYA	1307030	1307030006	13.06.03.2010	PANINJAUAN	0,1810	0,0628	0,0000	1	0,0000	0,0234	0,0234
20	TANJUNG RAYA	1307030	1307030007	13.06.03.2006	KOTO KACIAK	0,2985	0,0665	0,0049	1	0,0000	0,0280	0,0280
21	TANJUNG RAYA	1307030	1307030008	13.06.03.2008	KOTO GADANG ANAM KOTO	0,4039	0,0564	0,0040	1	0,0000	0,0569	0,0569
22	TANJUNG RAYA	1307030	1307030009	13.06.03.2009	KOTO MALINTANG	0,4505	0,1074	0,0029	1	0,0000	0,0416	0,0416
23	TANJUNG RAYA	1307030	1307030010	13.06.03.2011	DALKO	0,5116	0,0921	0,0000	1	0,0000	0,0271	0,0271
24	MATUR	1307040	1307040001	13.06.04.2002	MATUA MUDIAK	0,1310	0,1312	0,0114	1	0,0000	0,0232	0,0232
25	MATUR	1307040	1307040002	13.06.04.2005	PARIK PANJANG	0,2375	0,0914	0,0000	1	0,0000	0,0625	0,0625
26	MATUR	1307040	1307040003	13.06.04.2006	PANTA PAUAH	0,2130	0,0411	0,0124	1	0,0000	0,0574	0,0574
27	MATUR	1307040	1307040004	13.06.04.2001	MATUA HILIA	0,2379	0,0293	0,0020	1	0,0000	0,0267	0,0267
28	MATUR	1307040	1307040005	13.06.04.2003	TIGO BALAI	0,3548	0,0264	0,0054	1	0,0000	0,0209	0,0209
29	MATUR	1307040	1307040006	13.06.04.2004	LAWANG	0,5086	0,0503	0,0062	1	0,0000	0,0540	0,0540
30	IV KOTO	1307050	1307050001	13.06.05.2004	KOTO TUO	0,0918	0,0468	0,0174	1	0,0000	0,0112	0,0112
31	IV KOTO	1307050	1307050002	13.06.05.2003	BALINGKA	0,1948	0,0489	0,0195	1	0,0000	0,0364	0,0364
32	IV KOTO	1307050	1307050003	13.06.05.2002	SUNGAI LANDIA	0,4876	0,0952	0,0083	1	0,0000	0,0804	0,0804
33	IV KOTO	1307050	1307050004	13.06.05.2006	KOTO PANJANG	0,3408	0,0488	0,0416	1	0,0000	0,0449	0,0449
34	IV KOTO	1307050	1307050005	13.06.05.2007	SIANOK ANAM SUKU	0,0955	0,0628	0,0088	1	0,0000	0,0125	0,0125
35	IV KOTO	1307050	1307050006	13.06.05.2008	KOTO GADANG	0,1261	0,0643	0,0131	1	0,0000	0,0264	0,0264

36	IV KOTO	1307050	1307050007	13.06.05.2005	GUGUAK TABEK SAROJO	0,0379	0,0356	0,0057	1	0,0000	0,0036	0,0036
37	MALALAK	1307051	1307051001	13.06.16.2003	MALALAK SELATAN	0,6955	0,0480	0,0044	1	0,0000	0,0712	0,0712
38	MALALAK	1307051	1307051002	13.06.16.2004	MALALAK BARAT	0,5854	0,0576	0,0000	1	0,0000	0,0560	0,0560
39	MALALAK	1307051	1307051003	13.06.16.2002	MALALAK TIMUR	0,8045	0,0823	0,0018	1	0,0000	0,0881	0,0881
40	MALALAK	1307051	1307051004	13.06.16.2001	MALALAK UTARA	0,2337	0,0614	0,0000	1	0,0000	0,0262	0,0262
41	BANUHAM PU	1307061	1307061001	13.06.06.2003	PAKAN SINAYAN	0,0514	0,0621	0,0054	1	0,0000	0,0047	0,0047
42	BANUHAM PU	1307061	1307061002	13.06.06.2007	SUNGAI TANANG	0,0500	0,0754	0,0077	1	0,0000	0,0021	0,0021
43	BANUHAM PU	1307061	1307061003	13.06.06.2001	PADANG LUA	0,0260	0,1196	0,0034	1	0,0000	0,0016	0,0016
44	BANUHAM PU	1307061	1307061004	13.06.06.2006	CINGKARIANG	0,0630	0,0681	0,0109	1	0,0000	0,0025	0,0025
45	BANUHAM PU	1307061	1307061005	13.06.06.2005	LADANG LAWEH	0,0382	0,0492	0,0021	1	0,0000	0,0026	0,0026
46	BANUHAM PU	1307061	1307061006	13.06.06.2002	TALUAK AMPEK SUKU	0,0219	0,1074	0,0000	1	0,0000	0,0009	0,0009
47	BANUHAM PU	1307061	1307061007	13.06.06.2004	KUBANG PUTIAH	0,0434	0,0698	0,0034	1	0,0000	0,0015	0,0015
48	SUNGAI PUA	1307062	1307062001	13.06.12.2004	BATU PALANO	0,0892	0,0228	0,0064	1	0,0000	0,0116	0,0116
49	SUNGAI PUA	1307062	1307062002	13.06.12.2001	PADANG LAWEH	0,0520	0,0332	0,0000	1	0,0000	0,0134	0,0134
50	SUNGAI PUA	1307062	1307062003	13.06.12.2003	BATAGAK	0,1353	0,0387	0,0020	1	0,0000	0,0492	0,0492
51	SUNGAI PUA	1307062	1307062004	13.06.12.2005	SARIAK	0,2100	0,0471	0,0000	1	0,0000	0,0570	0,0570
52	SUNGAI PUA	1307062	1307062005	13.06.12.2002	SUNGAI PUA	0,0554	0,0301	0,0014	1	0,0000	0,0130	0,0130
53	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070001	13.06.07.2001	BATU TABA	0,0269	0,0527	0,0039	1	0,0000	0,0021	0,0021
54	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070002	13.06.07.2006	PASIA	0,0183	0,0575	0,0000	1	0,0000	0,0009	0,0009
55	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070003	13.06.07.2008	BALAI GURAH	0,0644	0,0347	0,0036	1	0,0000	0,0040	0,0040
56	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070004	13.06.07.2005	AMPANG GADANG	0,0296	0,0239	0,0000	1	0,0000	0,0033	0,0033

57	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070005	13.06.07.2002	BIARO GADANG	0,0726	0,0912	0,0000	1	0,0000	0,0031	0,0031
58	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070006	13.06.07.2003	LAMBAH	0,0603	0,0569	0,0000	1	0,0000	0,0029	0,0029
59	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070007	13.06.07.2004	PANAMPUANG	0,0698	0,0300	0,0000	1	0,0000	0,0040	0,0040
60	CANDUAN G	1307071	1307071001	13.06.14.2003	BUKIK BATABUAH	0,1026	0,1202	0,0021	1	0,0000	0,0140	0,0140
61	CANDUAN G	1307071	1307071002	13.06.14.2002	LASI	0,1355	0,0172	0,0038	1	0,0000	0,0044	0,0044
62	CANDUAN G	1307071	1307071003	13.06.14.2001	CANDUANG KOTO LAWEH	0,1498	0,0149	0,0004	1	0,0000	0,0322	0,0322
63	BASO	1307080	1307080001	13.06.08.2001	KOTO TINGGI	0,1625	0,0108	0,0056	1	0,0000	0,0062	0,0062
64	BASO	1307080	1307080002	13.06.08.2005	PADANG TAROK	0,1276	0,0142	0,0026	1	0,0000	0,0545	0,0545
65	BASO	1307080	1307080003	13.06.08.2004	SIMARASOK	0,1293	0,0106	0,0036	1	0,0000	0,0158	0,0158
66	BASO	1307080	1307080004	13.06.08.2002	TABEK PANJANG	0,1289	0,0376	0,0007	1	0,0000	0,0135	0,0135
67	BASO	1307080	1307080005	13.06.08.2006	SALO	0,1909	0,0392	0,0000	1	0,0000	0,0310	0,0310
68	BASO	1307080	1307080006	13.06.08.2007	KOTO BARU	0,0938	0,0747	0,0034	1	0,0000	0,0182	0,0182
69	BASO	1307080	1307080007	13.06.08.2009	KOTO GADANG	0,1225	0,0377	0,0008	1	0,0000	0,0266	0,0266
70	BASO	1307080	1307080008	13.06.08.2008	SUNGAI CUBADAK	0,0756	0,0698	0,0017	1	0,0000	0,0011	0,0011
71	TILATANG KAMANG	1307090	1307090001	13.06.09.2003	GADUT	0,1471	0,0721	0,0023	1	0,0000	0,0099	0,0099
72	TILATANG KAMANG	1307090	1307090002	13.06.09.2004	KAPAU	0,1316	0,0340	0,0023	1	0,0000	0,0024	0,0024
73	TILATANG KAMANG	1307090	1307090003	13.06.09.2001	KOTO TANGAH	0,1861	0,0476	0,0014	1	0,0000	0,0083	0,0083
74	KAMANG MAGEK	1307091	1307091001	13.06.15.2001	MAGEK	0,1509	0,0550	0,0045	1	0,0000	0,0343	0,0343
75	KAMANG MAGEK	1307091	1307091002	13.06.15.2002	KAMANG HILIA	0,1260	0,0368	0,0009	1	0,0000	0,0082	0,0082
76	KAMANG MAGEK	1307091	1307091003	13.06.15.2003	KAMANG MUDIAK	0,2610	0,0197	0,0074	1	0,0000	0,4154	0,4154
77	KAMANG MAGEK	1307091	1307091004	13.06.15.2004	KAMANG TANGAH ANAM SUKU	0,2300	0,0744	0,0029	1	0,0000	0,0082	0,0082
78	KAMANG MAGEK	1307091	1307091005	13.06.15.2005	PAUH KAMANG MUDIAK	0,2534	0,0589	0,0021	1	0,0000	0,2738	0,2738

79	PALEMBAYAN	1307100	1307100001	13.06.11.2001	BARINGIN	0,2351	0,0498	0,0021	1	0,0000	0,0581	0,0581
80	PALEMBAYAN	1307100	1307100002	13.06.11.2003	SUNGAI PUAR	0,3304	0,0289	0,0000	1	0,0000	0,1014	0,1014
81	PALEMBAYAN	1307100	1307100003	13.06.11.2002	SIPINANG	0,3384	0,0955	0,0000	1	0,0000	0,4422	0,4422
82	PALEMBAYAN	1307100	1307100004	13.06.11.2004	AMPEK KOTO PALEMBAYAN	0,5117	0,0348	0,0043	1	0,0000	0,0361	0,0361
83	PALEMBAYAN	1307100	1307100005	13.06.11.2005	TIGO KOTO SILUNGKANG	0,2677	0,0644	0,0202	1	0,0000	0,1104	0,1104
84	PALEMBAYAN	1307100	1307100006	13.06.11.2006	SALAREH AIA	0,4141	0,0311	0,0158	1	0,0000	0,1151	0,1151
85	PALEMBAYAN	1307100	1307100007	13.06.11.2007	SALAREH AIA TIMUR	0,3228	0,0452	0,0000	1	0,0000	0,0377	0,0377
86	PALEMBAYAN	1307100	1307100008	13.06.11.2009	SALAREH AIA BARAT	0,5285	0,0214	0,0000	1	0,0000	0,0311	0,0311
87	PALEMBAYAN	1307100	1307100009	13.06.11.2008	SALAREH AIA UTARA	0,4523	0,0349	0,0000	1	0,0000	0,0247	0,0247
88	PALUPUH	1307110	1307110001	13.06.10.2001	KOTO RANTANG	0,5019	0,0250	0,0115	2	0,0000	0,1072	0,1072
89	PALUPUH	1307110	1307110002	13.06.10.2002	PASIA LAWEH	0,4309	0,0289	0,0168	2	0,0000	0,1062	0,1062
90	PALUPUH	1307110	1307110003	13.06.10.2003	PAGADIH	0,9771	0,0217	0,0849	2	0,0000	0,1704	0,1704
91	PALUPUH	1307110	1307110004	13.06.10.2004	NAN TUJUAH	0,6155	0,0322	0,0268	2	0,0000	0,1453	0,1453
92	PALUPUH	1307110	1307110005	13.06.10.2005	NAN LIMO	0,6239	0,0378	0,0000	2	0,0000	0,2074	0,2074

Kabupaten :			
Agam			
		1. Luas Lahan Pertanian	2. Jumlah Sarana & Prasarana Penyedia Pangan
Sumber		KESEPAKATAN	KESEPAKATAN
Tahun		2024	2024

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa BPS	Kode Desa Kemendagri	Nama Desa	1. Data yang Dipakai di FSVA (Ha)	2. Data yang Dipakai di FSVA (Unit)
1	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010001	13.06.01.2001	TIKU SELATAN	1.336,00	197
2	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010002	13.06.01.2002	TIKU UTARA	1.614,00	85
3	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010003	13.06.01.2003	TIKU LIMO JORONG	8.270,30	344
4	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010004	13.06.01.2004	DURIAN KAPEH DARUSSALAM	939,00	56
5	LUBUK BASUNG	1307020	1307020001	13.06.02.2005	MANGGOPOH	9.942,20	200
6	LUBUK BASUNG	1307020	1307020002	13.06.02.2002	GARAGAHAN	1.858,00	105
7	LUBUK BASUNG	1307020	1307020003	13.06.02.2004	KAMPUANG TANGAH	1.076,00	163
8	LUBUK BASUNG	1307020	1307020004	13.06.02.2003	KAMPUNG PINANG	421,00	105
9	LUBUK BASUNG	1307020	1307020005	13.06.02.2001	LUBUK BASUNG	9.297,80	1.131
10	AMPEK NAGARI	1307021	1307021001	13.06.13.2003	BAWAN	11.627,00	232
11	AMPEK NAGARI	1307021	1307021002	13.06.13.2004	SITANANG	2.534,45	22
12	AMPEK NAGARI	1307021	1307021003	13.06.13.2001	BATU KAMBING	2.093,06	141
13	AMPEK NAGARI	1307021	1307021004	13.06.13.2002	SITALANG	2.076,00	32
14	TANJUNG RAYA	1307030	1307030001	13.06.03.2001	TANJUNG SANI	3.287,82	59
15	TANJUNG RAYA	1307030	1307030002	13.06.03.2002	SUNGAI BATANG	1.787,00	89
16	TANJUNG RAYA	1307030	1307030003	13.06.03.2003	MANINJAU	1.180,50	108
17	TANJUNG RAYA	1307030	1307030004	13.06.03.2004	BAYUA	1.484,00	188
18	TANJUNG RAYA	1307030	1307030005	13.06.03.2007	DUO KOTO	606,18	102
19	TANJUNG RAYA	1307030	1307030006	13.06.03.2010	PANINJAUAN	411,00	43
20	TANJUNG RAYA	1307030	1307030007	13.06.03.2006	KOTO KACIAK	1.211,00	85
21	TANJUNG RAYA	1307030	1307030008	13.06.03.2008	KOTO GADANG ANAM KOTO	998,50	43
22	TANJUNG RAYA	1307030	1307030009	13.06.03.2009	KOTO MALINTANG	1.843,00	135
23	TANJUNG RAYA	1307030	1307030010	13.06.03.2011	DALKO	1.385,00	75
24	MATUR	1307040	1307040001	13.06.04.2002	MATUA MUDIAK	781,30	255
25	MATUR	1307040	1307040002	13.06.04.2005	PARIK PANJANG	137,50	18
26	MATUR	1307040	1307040003	13.06.04.2006	PANTA PAUAH	429,50	27
27	MATUR	1307040	1307040004	13.06.04.2001	MATUA HILIA	818,00	34
28	MATUR	1307040	1307040005	13.06.04.2003	TIGO BALAI	1.307,95	33
29	MATUR	1307040	1307040006	13.06.04.2004	LAWANG	2.039,80	63
30	IV KOTO	1307050	1307050001	13.06.05.2004	KOTO TUO	390,50	65

31	IV KOTO	1307050	1307050002	13.06.05.2003	BALINGKA	1.429,00	108
32	IV KOTO	1307050	1307050003	13.06.05.2002	SUNGAI LANDIA	1.176,50	82
33	IV KOTO	1307050	1307050004	13.06.05.2006	KOTO PANJANG	1.040,00	51
34	IV KOTO	1307050	1307050005	13.06.05.2007	SIANOK ANAM SUKU	271,00	60
35	IV KOTO	1307050	1307050006	13.06.05.2008	KOTO GADANG	327,00	54
36	IV KOTO	1307050	1307050007	13.06.05.2005	GUGUAK TABEK SAROJO	160,00	50
37	MALALAK	1307051	1307051001	13.06.16.2003	MALALAK SELATAN	1.905,00	41
38	MALALAK	1307051	1307051002	13.06.16.2004	MALALAK BARAT	1.570,00	51
39	MALALAK	1307051	1307051003	13.06.16.2002	MALALAK TIMUR	2.231,00	78
40	MALALAK	1307051	1307051004	13.06.16.2001	MALALAK UTARA	598,79	54
41	BANUHAMPU	1307061	1307061001	13.06.06.2003	PAKAN SINAYAN	285,02	98
42	BANUHAMPU	1307061	1307061002	13.06.06.2007	SUNGAI TANANG	124,02	56
43	BANUHAMPU	1307061	1307061003	13.06.06.2001	PADANG LUA	169,02	223
44	BANUHAMPU	1307061	1307061004	13.06.06.2006	CINGKARIANG	353,02	117
45	BANUHAMPU	1307061	1307061005	13.06.06.2005	LADANG LAWEH	215,03	83
46	BANUHAMPU	1307061	1307061006	13.06.06.2002	TALUAK AMPEK SUKU	108,03	163
47	BANUHAMPU	1307061	1307061007	13.06.06.2004	KUBANG PUTIAH	355,03	179
48	SUNGAI PUA	1307062	1307062001	13.06.12.2004	BATU PALANO	280,00	21
49	SUNGAI PUA	1307062	1307062002	13.06.12.2001	PADANG LAWEH	200,00	35
50	SUNGAI PUA	1307062	1307062003	13.06.12.2003	BATAGAK	541,40	46
51	SUNGAI PUA	1307062	1307062004	13.06.12.2005	SARIAK	470,80	33
52	SUNGAI PUA	1307062	1307062005	13.06.12.2002	SUNGAI PUA	818,00	129
53	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070001	13.06.07.2001	BATU TABA	181,20	104
54	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070002	13.06.07.2006	PASIA	57,20	51
55	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070003	13.06.07.2008	BALAI GURAH	392,10	66
56	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070004	13.06.07.2005	AMPANG GADANG	274,70	67
57	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070005	13.06.07.2002	BIARO GADANG	565,60	223
58	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070006	13.06.07.2003	LAMBAH	277,00	85
59	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070007	13.06.07.2004	PANAMPUANG	557,20	75
60	CANDUANG	1307071	1307071001	13.06.14.2003	BUKIK BATABUAH	967,49	350
61	CANDUANG	1307071	1307071002	13.06.14.2002	LASI	915,52	35
62	CANDUANG	1307071	1307071003	13.06.14.2001	CANDUANG KOTO LAWEH	1.462,25	47
63	BASO	1307080	1307080001	13.06.08.2001	KOTO TINGGI	921,00	21
64	BASO	1307080	1307080002	13.06.08.2005	PADANG TAROK	1.086,00	38
65	BASO	1307080	1307080003	13.06.08.2004	SIMARASOK	863,00	22
66	BASO	1307080	1307080004	13.06.08.2002	TABEK PANJANG	923,00	90
67	BASO	1307080	1307080005	13.06.08.2006	SALO	261,00	19
68	BASO	1307080	1307080006	13.06.08.2007	KOTO BARU	165,00	41
69	BASO	1307080	1307080007	13.06.08.2009	KOTO GADANG	461,00	45
70	BASO	1307080	1307080008	13.06.08.2008	SUNGAI CUBADAK	222,00	63
71	TILATANG KAMANG	1307090	1307090001	13.06.09.2003	GADUT	2.381,00	370
72	TILATANG KAMANG	1307090	1307090002	13.06.09.2004	KAPAU	401,00	34
73	TILATANG KAMANG	1307090	1307090003	13.06.09.2001	KOTO TANGAH	3.427,80	289
74	KAMANG MAGEK	1307091	1307091001	13.06.15.2001	MAGEK	734,00	93

75	KAMANG MAGEK	1307091	1307091002	13.06.15.2002	KAMANG HILIA	697,77	68
76	KAMANG MAGEK	1307091	1307091003	13.06.15.2003	KAMANG MUDIAK	1.629,68	41
77	KAMANG MAGEK	1307091	1307091004	13.06.15.2004	KAMANG TANGAH ANAM SUKU	643,00	62
78	KAMANG MAGEK	1307091	1307091005	13.06.15.2005	PAUH KAMANG MUDIAK	709,40	51
79	PALEMBAYAN	1307100	1307100001	13.06.11.2001	BARINGIN	685,73	48
80	PALEMBAYAN	1307100	1307100002	13.06.11.2003	SUNGAI PUAR	673,00	18
81	PALEMBAYAN	1307100	1307100003	13.06.11.2002	SIPINANG	313,00	30
82	PALEMBAYAN	1307100	1307100004	13.06.11.2004	AMPEK KOTO PALEMBAYAN	2.362,00	56
83	PALEMBAYAN	1307100	1307100005	13.06.11.2005	TIGO KOTO SILUNGKANG	2.244,00	162
84	PALEMBAYAN	1307100	1307100006	13.06.11.2006	SALAREH AIA	1.756,80	41
85	PALEMBAYAN	1307100	1307100007	13.06.11.2007	SALAREH AIA TIMUR	1.437,80	57
86	PALEMBAYAN	1307100	1307100008	13.06.11.2009	SALAREH AIA BARAT	2.134,60	22
87	PALEMBAYAN	1307100	1307100009	13.06.11.2008	SALAREH AIA UTARA	1.699,60	34
88	PALUPUH	1307110	1307110001	13.06.10.2001	KOTO RANTANG	1.480,00	23
89	PALUPUH	1307110	1307110002	13.06.10.2002	PASIA LAWEH	2.203,00	46
90	PALUPUH	1307110	1307110003	13.06.10.2003	PAGADIH	1.923,00	12
91	PALUPUH	1307110	1307110004	13.06.10.2004	NAN TUJUAH	1.880,50	32
92	PALUPUH	1307110	1307110005	13.06.10.2005	NAN LIMO	1.458,00	29

Kabupaten :			
Agam			
		3. Jumlah Pddk Tingkat Kesejahteraan Terendah	4. Desa Tanpa Akses Penghubung Memadai
Sumber		KESEPAKATAN	KESEPAKATAN
Tahun		2024	2024

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa BPS	Kode Desa Kemendagri	Nama Desa	3. Data yang dipakai di FSVA (Jiwa)	4. Data yang dipakai di FSVA
1	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010001	13.06.01.2001	TIKU SELATAN	197	1
2	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010002	13.06.01.2002	TIKU UTARA	83	1
3	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010003	13.06.01.2003	TIKU LIMO JORONG	9	1
4	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010004	13.06.01.2004	DURIAN KAPEH DARUSSALAM	0	1
5	LUBUK BASUNG	1307020	1307020001	13.06.02.2005	MANGGOPOH	280	1
6	LUBUK BASUNG	1307020	1307020002	13.06.02.2002	GARAGAHAN	74	1
7	LUBUK BASUNG	1307020	1307020003	13.06.02.2004	KAMPUANG TANGAH	20	1
8	LUBUK BASUNG	1307020	1307020004	13.06.02.2003	KAMPUNG PINANG	14	1
9	LUBUK BASUNG	1307020	1307020005	13.06.02.2001	LUBUK BASUNG	191	1
10	AMPEK NAGARI	1307021	1307021001	13.06.13.2003	BAWAN	241	1
11	AMPEK NAGARI	1307021	1307021002	13.06.13.2004	SITANANG	40	1
12	AMPEK NAGARI	1307021	1307021003	13.06.13.2001	BATU KAMBING	69	1
13	AMPEK NAGARI	1307021	1307021004	13.06.13.2002	SITALANG	142	1
14	TANJUNG RAYA	1307030	1307030001	13.06.03.2001	TANJUNG SANI	57	1
15	TANJUNG RAYA	1307030	1307030002	13.06.03.2002	SUNGAI BATANG	24	1
16	TANJUNG RAYA	1307030	1307030003	13.06.03.2003	MANINJAU	4	1
17	TANJUNG RAYA	1307030	1307030004	13.06.03.2004	BAYUA	40	1
18	TANJUNG RAYA	1307030	1307030005	13.06.03.2007	DUO KOTO	0	1
19	TANJUNG RAYA	1307030	1307030006	13.06.03.2010	PANINJAUAN	0	1
20	TANJUNG RAYA	1307030	1307030007	13.06.03.2006	KOTO KACIAK	20	1
21	TANJUNG RAYA	1307030	1307030008	13.06.03.2008	KOTO GADANG ANAM KOTO	10	1
22	TANJUNG RAYA	1307030	1307030009	13.06.03.2009	KOTO MALINTANG	12	1
23	TANJUNG RAYA	1307030	1307030010	13.06.03.2011	DALKO	0	1
24	MATUR	1307040	1307040001	13.06.04.2002	MATUA MUDIAK	68	1
25	MATUR	1307040	1307040002	13.06.04.2005	PARIK PANJANG	0	1
26	MATUR	1307040	1307040003	13.06.04.2006	PANTA PAUAH	25	1
27	MATUR	1307040	1307040004	13.06.04.2001	MATUA HILIA	7	1
28	MATUR	1307040	1307040005	13.06.04.2003	TIGO BALAI	20	1
29	MATUR	1307040	1307040006	13.06.04.2004	LAWANG	25	1

30	IV KOTO	1307050	1307050001	13.06.05.2004	KOTO TUO	74	1
31	IV KOTO	1307050	1307050002	13.06.05.2003	BALINGKA	143	1
32	IV KOTO	1307050	1307050003	13.06.05.2002	SUNGAI LANDIA	20	1
33	IV KOTO	1307050	1307050004	13.06.05.2006	KOTO PANJANG	127	1
34	IV KOTO	1307050	1307050005	13.06.05.2007	SIANOK ANAM SUKU	25	1
35	IV KOTO	1307050	1307050006	13.06.05.2008	KOTO GADANG	34	1
36	IV KOTO	1307050	1307050007	13.06.05.2005	GUGUAK TABEK SAROJO	24	1
37	MALALAK	1307051	1307051001	13.06.16.2003	MALALAK SELATAN	12	1
38	MALALAK	1307051	1307051002	13.06.16.2004	MALALAK BARAT	0	1
39	MALALAK	1307051	1307051003	13.06.16.2002	MALALAK TIMUR	5	1
40	MALALAK	1307051	1307051004	13.06.16.2001	MALALAK UTARA	0	1
41	BANUHAMPU	1307061	1307061001	13.06.06.2003	PAKAN SINAYAN	30	1
42	BANUHAMPU	1307061	1307061002	13.06.06.2007	SUNGAI TANANG	19	1
43	BANUHAMPU	1307061	1307061003	13.06.06.2001	PADANG LUA	22	1
44	BANUHAMPU	1307061	1307061004	13.06.06.2006	CINGKARIANG	61	1
45	BANUHAMPU	1307061	1307061005	13.06.06.2005	LADANG LAWEH	12	1
46	BANUHAMPU	1307061	1307061006	13.06.06.2002	TALUAK AMPEK SUKU	0	1
47	BANUHAMPU	1307061	1307061007	13.06.06.2004	KUBANG PUTIAH	28	1
48	SUNGAI PUA	1307062	1307062001	13.06.12.2004	BATU PALANO	20	1
49	SUNGAI PUA	1307062	1307062002	13.06.12.2001	PADANG LAWEH	0	1
50	SUNGAI PUA	1307062	1307062003	13.06.12.2003	BATAGAK	8	1
51	SUNGAI PUA	1307062	1307062004	13.06.12.2005	SARIAK	0	1
52	SUNGAI PUA	1307062	1307062005	13.06.12.2002	SUNGAI PUA	20	1
53	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070001	13.06.07.2001	BATU TABA	26	1
54	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070002	13.06.07.2006	PASIA	0	1
55	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070003	13.06.07.2008	BALAI GURAH	22	1
56	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070004	13.06.07.2005	AMPANG GADANG	0	1
57	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070005	13.06.07.2002	BIARO GADANG	0	1
58	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070006	13.06.07.2003	LAMBAH	0	1
59	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070007	13.06.07.2004	PANAMPUANG	0	1
60	CANDUANG	1307071	1307071001	13.06.14.2003	BUKIK BATABUAH	20	1
61	CANDUANG	1307071	1307071002	13.06.14.2002	LASI	26	1
62	CANDUANG	1307071	1307071003	13.06.14.2001	CANDUANG KOTO LAWEH	4	1
63	BASO	1307080	1307080001	13.06.08.2001	KOTO TINGGI	32	1
64	BASO	1307080	1307080002	13.06.08.2005	PADANG TAROK	22	1
65	BASO	1307080	1307080003	13.06.08.2004	SIMARASOK	24	1
66	BASO	1307080	1307080004	13.06.08.2002	TABEK PANJANG	5	1
67	BASO	1307080	1307080005	13.06.08.2006	SALO	0	1
68	BASO	1307080	1307080006	13.06.08.2007	KOTO BARU	6	1
69	BASO	1307080	1307080007	13.06.08.2009	KOTO GADANG	3	1
70	BASO	1307080	1307080008	13.06.08.2008	SUNGAI CUBADAK	5	1
71	TILATANG KAMANG	1307090	1307090001	13.06.09.2003	GADUT	38	1
72	TILATANG KAMANG	1307090	1307090002	13.06.09.2004	KAPAU	7	1
73	TILATANG KAMANG	1307090	1307090003	13.06.09.2001	KOTO TANGAH	26	1

74	KAMANG MAGEK	1307091	1307091001	13.06.15.2001	MAGEK	22	1
75	KAMANG MAGEK	1307091	1307091002	13.06.15.2002	KAMANG HILIA	5	1
76	KAMANG MAGEK	1307091	1307091003	13.06.15.2003	KAMANG MUDIAK	46	1
77	KAMANG MAGEK	1307091	1307091004	13.06.15.2004	KAMANG TANGAH ANAM SUKU	8	1
78	KAMANG MAGEK	1307091	1307091005	13.06.15.2005	PAUH KAMANG MUDIAK	6	1
79	PALEMBAYAN	1307100	1307100001	13.06.11.2001	BARINGIN	6	1
80	PALEMBAYAN	1307100	1307100002	13.06.11.2003	SUNGAI PUAR	0	1
81	PALEMBAYAN	1307100	1307100003	13.06.11.2002	SIPINANG	0	1
82	PALEMBAYAN	1307100	1307100004	13.06.11.2004	AMPEK KOTO PALEMBAYAN	20	1
83	PALEMBAYAN	1307100	1307100005	13.06.11.2005	TIGO KOTO SILUNGKANG	169	1
84	PALEMBAYAN	1307100	1307100006	13.06.11.2006	SALAREH AIA	67	1
85	PALEMBAYAN	1307100	1307100007	13.06.11.2007	SALAREH AIA TIMUR	0	1
86	PALEMBAYAN	1307100	1307100008	13.06.11.2009	SALAREH AIA BARAT	0	1
87	PALEMBAYAN	1307100	1307100009	13.06.11.2008	SALAREH AIA UTARA	0	1
88	PALUPUH	1307110	1307110001	13.06.10.2001	KOTO RANTANG	34	2
89	PALUPUH	1307110	1307110002	13.06.10.2002	PASIA LAWEH	86	2
90	PALUPUH	1307110	1307110003	13.06.10.2003	PAGADIH	167	2
91	PALUPUH	1307110	1307110004	13.06.10.2004	NAN TUJUAH	82	2
92	PALUPUH	1307110	1307110005	13.06.10.2005	NAN LIMO	0	2

Kabupaten :
Agam

5. Jumlah RT
Tanpa Akses Air
Bersih

6. Jumlah
Tenaga
Kesehatan

Sumber

KESEPAKATAN

Tahun

2024

2024

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa BPS	Kode Desa Kemendagri	Nama Desa	5. Data yang dipakai di FSVA (RT)	6. Data yang dipakai di FSVA (Orang)
1	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010001	13.06.01.2001	TIKU SELATAN	0	10
2	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010002	13.06.01.2002	TIKU UTARA	0	6
3	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010003	13.06.01.2003	TIKU LIMO JORONG	0	25
4	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010004	13.06.01.2004	DURIAN KAPEH DARUSSALAM	0	8
5	LUBUK BASUNG	1307020	1307020001	13.06.02.2005	MANGGOPOH	0	24
6	LUBUK BASUNG	1307020	1307020002	13.06.02.2002	GARAGAHAN	0	4
7	LUBUK BASUNG	1307020	1307020003	13.06.02.2004	KAMPUANG TANGAH	0	30
8	LUBUK BASUNG	1307020	1307020004	13.06.02.2003	KAMPUNG PINANG	0	10
9	LUBUK BASUNG	1307020	1307020005	13.06.02.2001	LUBUK BASUNG	0	139
10	AMPEK NAGARI	1307021	1307021001	13.06.13.2003	BAWAN	0	24
11	AMPEK NAGARI	1307021	1307021002	13.06.13.2004	SITANANG	0	5
12	AMPEK NAGARI	1307021	1307021003	13.06.13.2001	BATU KAMBING	0	15
13	AMPEK NAGARI	1307021	1307021004	13.06.13.2002	SITALANG	0	4
14	TANJUNG RAYA	1307030	1307030001	13.06.03.2001	TANJUNG SANI	0	5
15	TANJUNG RAYA	1307030	1307030002	13.06.03.2002	SUNGAI BATANG	0	6
16	TANJUNG RAYA	1307030	1307030003	13.06.03.2003	MANINJAU	0	7
17	TANJUNG RAYA	1307030	1307030004	13.06.03.2004	BAYUA	0	7
18	TANJUNG RAYA	1307030	1307030005	13.06.03.2007	DUO KOTO	0	7
19	TANJUNG RAYA	1307030	1307030006	13.06.03.2010	PANINJAUAN	0	3
20	TANJUNG RAYA	1307030	1307030007	13.06.03.2006	KOTO KACIAK	0	7
21	TANJUNG RAYA	1307030	1307030008	13.06.03.2008	KOTO GADANG ANAM KOTO	0	3
22	TANJUNG RAYA	1307030	1307030009	13.06.03.2009	KOTO MALINTANG	0	7
23	TANJUNG RAYA	1307030	1307030010	13.06.03.2011	DALKO	0	6
24	MATUR	1307040	1307040001	13.06.04.2002	MATUA MUDIAK	0	7
25	MATUR	1307040	1307040002	13.06.04.2005	PARIK PANJANG	0	1
26	MATUR	1307040	1307040003	13.06.04.2006	PANTA PAUAH	0	2
27	MATUR	1307040	1307040004	13.06.04.2001	MATUA HILIA	0	6
28	MATUR	1307040	1307040005	13.06.04.2003	TIGO BALAI	0	8
29	MATUR	1307040	1307040006	13.06.04.2004	LAWANG	0	5
30	IV KOTO	1307050	1307050001	13.06.05.2004	KOTO TUO	0	7

31	IV KOTO	1307050	1307050002	13.06.05.2003	BALINGKA	0	5
32	IV KOTO	1307050	1307050003	13.06.05.2002	SUNGAI LANDIA	0	2
33	IV KOTO	1307050	1307050004	13.06.05.2006	KOTO PANJANG	0	3
34	IV KOTO	1307050	1307050005	13.06.05.2007	SIANOK ANAM SUKU	0	4
35	IV KOTO	1307050	1307050006	13.06.05.2008	KOTO GADANG	0	2
36	IV KOTO	1307050	1307050007	13.06.05.2005	GUGUAK TABEK SAROJO	0	8
37	MALALAK	1307051	1307051001	13.06.16.2003	MALALAK SELATAN	0	4
38	MALALAK	1307051	1307051002	13.06.16.2004	MALALAK BARAT	0	4
39	MALALAK	1307051	1307051003	13.06.16.2002	MALALAK TIMUR	0	4
40	MALALAK	1307051	1307051004	13.06.16.2001	MALALAK UTARA	0	7
41	BANUHAMPU	1307061	1307061001	13.06.06.2003	PAKAN SINAYAN	0	11
42	BANUHAMPU	1307061	1307061002	13.06.06.2007	SUNGAI TANANG	0	8
43	BANUHAMPU	1307061	1307061003	13.06.06.2001	PADANG LUA	0	21
44	BANUHAMPU	1307061	1307061004	13.06.06.2006	CINGKARIANG	0	20
45	BANUHAMPU	1307061	1307061005	13.06.06.2005	LADANG LAWEH	0	17
46	BANUHAMPU	1307061	1307061006	13.06.06.2002	TALUAK AMPEK SUKU	0	37
47	BANUHAMPU	1307061	1307061007	13.06.06.2004	KUBANG PUTIAH	0	36
48	SUNGAI PUA	1307062	1307062001	13.06.12.2004	BATU PALANO	0	3
49	SUNGAI PUA	1307062	1307062002	13.06.12.2001	PADANG LAWEH	0	2
50	SUNGAI PUA	1307062	1307062003	13.06.12.2003	BATAGAK	0	2
51	SUNGAI PUA	1307062	1307062004	13.06.12.2005	SARIAK	0	2
52	SUNGAI PUA	1307062	1307062005	13.06.12.2002	SUNGAI PUA	0	13
53	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070001	13.06.07.2001	BATU TABA	0	12
54	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070002	13.06.07.2006	PASIA	0	10
55	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070003	13.06.07.2008	BALAI GURAH	0	17
56	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070004	13.06.07.2005	AMPANG GADANG	0	12
57	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070005	13.06.07.2002	BIARO GADANG	0	21
58	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070006	13.06.07.2003	LAMBAH	0	11
59	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070007	13.06.07.2004	PANAMPUANG	0	17
60	CANDUANG	1307071	1307071001	13.06.14.2003	BUKIK BATABUAH	0	8
61	CANDUANG	1307071	1307071002	13.06.14.2002	LASI	0	35
62	CANDUANG	1307071	1307071003	13.06.14.2001	CANDUANG KOTO LAWEH	0	8
63	BASO	1307080	1307080001	13.06.08.2001	KOTO TINGGI	0	8
64	BASO	1307080	1307080002	13.06.08.2005	PADANG TAROK	0	3
65	BASO	1307080	1307080003	13.06.08.2004	SIMARASOK	0	9
66	BASO	1307080	1307080004	13.06.08.2002	TABEK PANJANG	0	13
67	BASO	1307080	1307080005	13.06.08.2006	SALO	0	1
68	BASO	1307080	1307080006	13.06.08.2007	KOTO BARU	0	1
69	BASO	1307080	1307080007	13.06.08.2009	KOTO GADANG	0	4
70	BASO	1307080	1307080008	13.06.08.2008	SUNGAI CUBADAK	0	14
71	TILATANG KAMANG	1307090	1307090001	13.06.09.2003	GADUT	0	37
72	TILATANG KAMANG	1307090	1307090002	13.06.09.2004	KAPAU	0	23
73	TILATANG KAMANG	1307090	1307090003	13.06.09.2001	KOTO TANGAH	0	65
74	KAMANG MAGEK	1307091	1307091001	13.06.15.2001	MAGEK	0	3
75	KAMANG MAGEK	1307091	1307091002	13.06.15.2002	KAMANG HILIA	0	20
76	KAMANG MAGEK	1307091	1307091003	13.06.15.2003	KAMANG MUDIAK	0	1

77	KAMANG MAGEK	1307091	1307091004	13.06.15.2004	KAMANG TANGAH ANAM SUKU	0	5
78	KAMANG MAGEK	1307091	1307091005	13.06.15.2005	PAUH KAMANG MUDIAK	0	1
79	PALEMBAYAN	1307100	1307100001	13.06.11.2001	BARINGIN	0	4
80	PALEMBAYAN	1307100	1307100002	13.06.11.2003	SUNGAI PUAR	0	4
81	PALEMBAYAN	1307100	1307100003	13.06.11.2002	SIPINANG	0	1
82	PALEMBAYAN	1307100	1307100004	13.06.11.2004	AMPEK KOTO PALEMBAYAN	0	17
83	PALEMBAYAN	1307100	1307100005	13.06.11.2005	TIGO KOTO SILUNGKANG	0	8
84	PALEMBAYAN	1307100	1307100006	13.06.11.2006	SALAREH AIA	0	2
85	PALEMBAYAN	1307100	1307100007	13.06.11.2007	SALAREH AIA TIMUR	0	5
86	PALEMBAYAN	1307100	1307100008	13.06.11.2009	SALAREH AIA BARAT	0	9
87	PALEMBAYAN	1307100	1307100009	13.06.11.2008	SALAREH AIA UTARA	0	9
88	PALUPUH	1307110	1307110001	13.06.10.2001	KOTO RANTANG	0	4
89	PALUPUH	1307110	1307110002	13.06.10.2002	PASIA LAWEH	0	7
90	PALUPUH	1307110	1307110003	13.06.10.2003	PAGADIH	0	2
91	PALUPUH	1307110	1307110004	13.06.10.2004	NAN TUJUAH	0	3
92	PALUPUH	1307110	1307110005	13.06.10.2005	NAN LIMO	0	2

<https://www.agamkab.go.id>

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa BPS	Kode Desa Kemendagri	Nama Desa	a. Data yang dipakai di FSVA (Ha)	b. Data yang dipakai di FSVA (Jiwa)
1	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010001	13.06.01.2001	TIKU SELATAN	31,42	13.146
2	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010002	13.06.01.2002	TIKU UTARA	23,62	5.721
3	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010003	13.06.01.2003	TIKU LIMO JORONG	134,79	11.249
4	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010004	13.06.01.2004	DURIAN KAPEH DARUSSALAM	15,9	4.441
5	LUBUK BASUNG	1307020	1307020001	13.06.02.2005	MANGGOPOH	116,85	23.664
6	LUBUK BASUNG	1307020	1307020002	13.06.02.2002	GARAGAHAN	26,25	8.121
7	LUBUK BASUNG	1307020	1307020003	13.06.02.2004	KAMPUANG TANGAH	14,68	7.605
8	LUBUK BASUNG	1307020	1307020004	13.06.02.2003	KAMPUNG PINANG	5,91	4.507
9	LUBUK BASUNG	1307020	1307020005	13.06.02.2001	LUBUK BASUNG	114,71	41.196
10	AMPEK NAGARI	1307021	1307021001	13.06.13.2003	BAWAN	170,43	20.806
11	AMPEK NAGARI	1307021	1307021002	13.06.13.2004	SITANANG	37,15	2.339
12	AMPEK NAGARI	1307021	1307021003	13.06.13.2001	BATU KAMBING	30,68	4.637
13	AMPEK NAGARI	1307021	1307021004	13.06.13.2002	SITALANG	30,43	3.133
14	TANJUNG RAYA	1307030	1307030001	13.06.03.2001	TANJUNG SANI	58,75	5.142
15	TANJUNG RAYA	1307030	1307030002	13.06.03.2002	SUNGAI BATANG	28,13	4.574
16	TANJUNG RAYA	1307030	1307030003	13.06.03.2003	MANINJAU	25,6	3.556
17	TANJUNG RAYA	1307030	1307030004	13.06.03.2004	BAYUA	30,74	6.445
18	TANJUNG RAYA	1307030	1307030005	13.06.03.2007	DUO KOTO	11,69	3.284
19	TANJUNG RAYA	1307030	1307030006	13.06.03.2010	PANINJAUAN	7,03	2.271
20	TANJUNG RAYA	1307030	1307030007	13.06.03.2006	KOTO KACIAK	19,59	4.057
21	TANJUNG RAYA	1307030	1307030008	13.06.03.2008	KOTO GADANG ANAM KOTO	17,08	2.472
22	TANJUNG RAYA	1307030	1307030009	13.06.03.2009	KOTO MALINTANG	29,14	4.091
23	TANJUNG RAYA	1307030	1307030010	13.06.03.2011	DALKO	16,28	2.707
24	MATUR	1307040	1307040001	13.06.04.2002	MATUA MUDIAK	16,27	5.966
25	MATUR	1307040	1307040002	13.06.04.2005	PARIK PANJANG	6,25	579
26	MATUR	1307040	1307040003	13.06.04.2006	PANTA PAUAH	11,48	2.016
27	MATUR	1307040	1307040004	13.06.04.2001	MATUA HILIA	16	3.439
28	MATUR	1307040	1307040005	13.06.04.2003	TIGO BALAI	16,69	3.686
29	MATUR	1307040	1307040006	13.06.04.2004	LAWANG	27	4.011
30	IV KOTO	1307050	1307050001	13.06.05.2004	KOTO TUO	7,81	4.253

31	IV KOTO	1307050	1307050002	13.06.05.2003	BALINGKA	18,2	7.334
32	IV KOTO	1307050	1307050003	13.06.05.2002	SUNGAI LANDIA	16,07	2.413
33	IV KOTO	1307050	1307050004	13.06.05.2006	KOTO PANJANG	13,46	3.052
34	IV KOTO	1307050	1307050005	13.06.05.2007	SIANOK ANAM SUKU	5,01	2.837
35	IV KOTO	1307050	1307050006	13.06.05.2008	KOTO GADANG	5,27	2.593
36	IV KOTO	1307050	1307050007	13.06.05.2005	GUGUAK TABEK SAROJO	2,9	4.225
37	MALALAK	1307051	1307051001	13.06.16.2003	MALALAK SELATAN	28,49	2.739
38	MALALAK	1307051	1307051002	13.06.16.2004	MALALAK BARAT	22,4	2.682
39	MALALAK	1307051	1307051003	13.06.16.2002	MALALAK TIMUR	35,23	2.773
40	MALALAK	1307051	1307051004	13.06.16.2001	MALALAK UTARA	18,37	2.562
41	BANUHAMPU	1307061	1307061001	13.06.06.2003	PAKAN SINAYAN	5,21	5.544
42	BANUHAMPU	1307061	1307061002	13.06.06.2007	SUNGAI TANANG	1,7	2.482
43	BANUHAMPU	1307061	1307061003	13.06.06.2001	PADANG LUA	3,42	6.496
44	BANUHAMPU	1307061	1307061004	13.06.06.2006	CINGKARIANG	5,07	5.607
45	BANUHAMPU	1307061	1307061005	13.06.06.2005	LADANG LAWEH	4,42	5.636
46	BANUHAMPU	1307061	1307061006	13.06.06.2002	TALUAK AMPEK SUKU	3,41	4.927
47	BANUHAMPU	1307061	1307061007	13.06.06.2004	KUBANG PUTIAH	5,22	8.172
48	SUNGAI PUA	1307062	1307062001	13.06.12.2004	BATU PALANO	3,47	3.138
49	SUNGAI PUA	1307062	1307062002	13.06.12.2001	PADANG LAWEH	2,68	3.847
50	SUNGAI PUA	1307062	1307062003	13.06.12.2003	BATAGAK	9,84	4.002
51	SUNGAI PUA	1307062	1307062004	13.06.12.2005	SARIAK	11,4	2.242
52	SUNGAI PUA	1307062	1307062005	13.06.12.2002	SUNGAI PUA	16,9	14.757
53	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070001	13.06.07.2001	BATU TABA	2,57	6.744
54	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070002	13.06.07.2006	PASIA	0,9	3.120
55	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070003	13.06.07.2008	BALAI GURAH	6,76	6.086
56	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070004	13.06.07.2005	AMPANG GADANG	4	9.286
57	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070005	13.06.07.2002	BIARO GADANG	6,43	7.789
58	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070006	13.06.07.2003	LAMBAH	3,2	4.595
59	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070007	13.06.07.2004	PANAMPUANG	6,8	7.988
60	CANDUANG	1307071	1307071001	13.06.14.2003	BUKIK BATABUAH	11,22	9.430
61	CANDUANG	1307071	1307071002	13.06.14.2002	LASI	15,34	6.758
62	CANDUANG	1307071	1307071003	13.06.14.2001	CANDUANG KOTO LAWEH	25,73	9.760
63	BASO	1307080	1307080001	13.06.08.2001	KOTO TINGGI	4,97	5.667
64	BASO	1307080	1307080002	13.06.08.2005	PADANG TAROK	16,34	8.511
65	BASO	1307080	1307080003	13.06.08.2004	SIMARASOK	14,25	6.673
66	BASO	1307080	1307080004	13.06.08.2002	TABEK PANJANG	17,59	7.158
67	BASO	1307080	1307080005	13.06.08.2006	SALO	3,1	1.367
68	BASO	1307080	1307080006	13.06.08.2007	KOTO BARU	1,82	1.759
69	BASO	1307080	1307080007	13.06.08.2009	KOTO GADANG	10,63	3.762
70	BASO	1307080	1307080008	13.06.08.2008	SUNGAI CUBADAK	1,6	2.936
71	TILATANG KAMANG	1307090	1307090001	13.06.09.2003	GADUT	36,45	16.188
72	TILATANG KAMANG	1307090	1307090002	13.06.09.2004	KAPAU	5,54	3.046
73	TILATANG KAMANG	1307090	1307090003	13.06.09.2001	KOTO TANGAH	53,87	18.423
74	KAMANG MAGEK	1307091	1307091001	13.06.15.2001	MAGEK	10,3	4.864
75	KAMANG MAGEK	1307091	1307091002	13.06.15.2002	KAMANG HILIA	16,31	5.540

76	KAMANG MAGEK	1307091	1307091003	13.06.15.2003	KAMANG MUDIAK	41,54	6.244
77	KAMANG MAGEK	1307091	1307091004	13.06.15.2004	KAMANG TANGAH ANAM SUKU	4,08	2.796
78	KAMANG MAGEK	1307091	1307091005	13.06.15.2005	PAUH KAMANG MUDIAK	27,38	2.799
79	PALEMBAYAN	1307100	1307100001	13.06.11.2001	BARINGIN	23,22	2.917
80	PALEMBAYAN	1307100	1307100002	13.06.11.2003	SUNGAI PUAR	40,54	2.037
81	PALEMBAYAN	1307100	1307100003	13.06.11.2002	SIPINANG	44,22	925
82	PALEMBAYAN	1307100	1307100004	13.06.11.2004	AMPEK KOTO PALEMBAYAN	61,37	4.616
83	PALEMBAYAN	1307100	1307100005	13.06.11.2005	TIGO KOTO SILUNGKANG	88,31	8.381
84	PALEMBAYAN	1307100	1307100006	13.06.11.2006	SALAREH AIA	23,02	4.242
85	PALEMBAYAN	1307100	1307100007	13.06.11.2007	SALAREH AIA TIMUR	18,84	4.454
86	PALEMBAYAN	1307100	1307100008	13.06.11.2009	SALAREH AIA BARAT	27,97	4.039
87	PALEMBAYAN	1307100	1307100009	13.06.11.2008	SALAREH AIA UTARA	22,27	3.758
88	PALUPUH	1307110	1307110001	13.06.10.2001	KOTO RANTANG	42,87	2.949
89	PALUPUH	1307110	1307110002	13.06.10.2002	PASIA LAWEH	74,32	5.113
90	PALUPUH	1307110	1307110003	13.06.10.2003	PAGADIH	34,08	1.968
91	PALUPUH	1307110	1307110004	13.06.10.2004	NAN TUJUAH	43,59	3.055
92	PALUPUH	1307110	1307110005	13.06.10.2005	NAN LIMO	41,48	2.337

Kabupaten :			
Agam			
		c. Jumlah Rumah Tangga	d. Tingkat Kepadatan Penduduk
Sumber		KESEPAKATAN	KESEPAKATAN
Tahun		2024	2024

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa BPS	Kode Desa Kemendagri	Nama Desa	c. Data yang dipakai di FSVA (RT)	d. Data yang dipakai di FSVA (Jiwa/Km2)
1	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010001	13.06.01.2001	TIKU SELATAN	3.797	3.797,00
2	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010002	13.06.01.2002	TIKU UTARA	1.738	1.738,00
3	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010003	13.06.01.2003	TIKU LIMO JORONG	3.129	3.129,00
4	TANJUNG MUTIARA	1307010	1307010004	13.06.01.2004	DURIAN KAPEH DARUSSALAM	1.187	1.187,00
5	LUBUK BASUNG	1307020	1307020001	13.06.02.2005	MANGGOPOH	6.903	6.903,00
6	LUBUK BASUNG	1307020	1307020002	13.06.02.2002	GARAGAHAN	2.619	2.619,00
7	LUBUK BASUNG	1307020	1307020003	13.06.02.2004	KAMPUANG TANGAH	2.355	2.355,00
8	LUBUK BASUNG	1307020	1307020004	13.06.02.2003	KAMPUNG PINANG	1.402	1.402,00
9	LUBUK BASUNG	1307020	1307020005	13.06.02.2001	LUBUK BASUNG	12.706	12.706,00
10	AMPEK NAGARI	1307021	1307021001	13.06.13.2003	BAWAN	5.638	5.638,00
11	AMPEK NAGARI	1307021	1307021002	13.06.13.2004	SITANANG	679	679,00
12	AMPEK NAGARI	1307021	1307021003	13.06.13.2001	BATU KAMBING	1.432	1.432,00
13	AMPEK NAGARI	1307021	1307021004	13.06.13.2002	SITALANG	922	922,00
14	TANJUNG RAYA	1307030	1307030001	13.06.03.2001	TANJUNG SANI	1.641	1.641,00
15	TANJUNG RAYA	1307030	1307030002	13.06.03.2002	SUNGAI BATANG	1.485	1.485,00
16	TANJUNG RAYA	1307030	1307030003	13.06.03.2003	MANINJAU	1.207	1.207,00
17	TANJUNG RAYA	1307030	1307030004	13.06.03.2004	BAYUA	2.005	2.005,00
18	TANJUNG RAYA	1307030	1307030005	13.06.03.2007	DUO KOTO	1.057	1.057,00
19	TANJUNG RAYA	1307030	1307030006	13.06.03.2010	PANINJAUAN	685	685,00
20	TANJUNG RAYA	1307030	1307030007	13.06.03.2006	KOTO KACIAK	1.278	1.278,00
21	TANJUNG RAYA	1307030	1307030008	13.06.03.2008	KOTO GADANG ANAM KOTO	763	763,00
22	TANJUNG RAYA	1307030	1307030009	13.06.03.2009	KOTO MALINTANG	1.257	1.257,00
23	TANJUNG RAYA	1307030	1307030010	13.06.03.2011	DALKO	814	814,00
24	MATUR	1307040	1307040001	13.06.04.2002	MATUA MUDIAK	1.944	1.944,00
25	MATUR	1307040	1307040002	13.06.04.2005	PAKIK PANJANG	197	197,00
26	MATUR	1307040	1307040003	13.06.04.2006	PANTA PAUAH	657	657,00
27	MATUR	1307040	1307040004	13.06.04.2001	MATUA HILIA	1.162	1.162,00
28	MATUR	1307040	1307040005	13.06.04.2003	TIGO BALAI	1.249	1.249,00
29	MATUR	1307040	1307040006	13.06.04.2004	LAWANG	1.253	1.253,00
30	IV KOTO	1307050	1307050001	13.06.05.2004	KOTO TUO	1.389	1.389,00
31	IV KOTO	1307050	1307050002	13.06.05.2003	BALINGKA	2.208	2.208,00

32	IV KOTO	1307050	1307050003	13.06.05.2002	SUNGAI LANDIA	861	861,00
33	IV KOTO	1307050	1307050004	13.06.05.2006	KOTO PANJANG	1.045	1.045,00
34	IV KOTO	1307050	1307050005	13.06.05.2007	SIANOK ANAM SUKU	956	956,00
35	IV KOTO	1307050	1307050006	13.06.05.2008	KOTO GADANG	840	840,00
36	IV KOTO	1307050	1307050007	13.06.05.2005	GUGUAK TABEK SAROJO	1.404	1.404,00
37	MALALAK	1307051	1307051001	13.06.16.2003	MALALAK SELATAN	855	855,00
38	MALALAK	1307051	1307051002	13.06.16.2004	MALALAK BARAT	885	885,00
39	MALALAK	1307051	1307051003	13.06.16.2002	MALALAK TIMUR	948	948,00
40	MALALAK	1307051	1307051004	13.06.16.2001	MALALAK UTARA	879	879,00
41	BANUHAMPU	1307061	1307061001	13.06.06.2003	PAKAN SINAYAN	1.578	1.578,00
42	BANUHAMPU	1307061	1307061002	13.06.06.2007	SUNGAI TANANG	743	743,00
43	BANUHAMPU	1307061	1307061003	13.06.06.2001	PADANG LUA	1.865	1.865,00
44	BANUHAMPU	1307061	1307061004	13.06.06.2006	CINGKARIANG	1.719	1.719,00
45	BANUHAMPU	1307061	1307061005	13.06.06.2005	LADANG LAWEH	1.686	1.686,00
46	BANUHAMPU	1307061	1307061006	13.06.06.2002	TALUAK AMPEK SUKU	1.518	1.518,00
47	BANUHAMPU	1307061	1307061007	13.06.06.2004	KUBANG PUTIAH	2.566	2.566,00
48	SUNGAI PUA	1307062	1307062001	13.06.12.2004	BATU PALANO	922	922,00
49	SUNGAI PUA	1307062	1307062002	13.06.12.2001	PADANG LAWEH	1.054	1.054,00
50	SUNGAI PUA	1307062	1307062003	13.06.12.2003	BATAGAK	1.189	1.189,00
51	SUNGAI PUA	1307062	1307062004	13.06.12.2005	SARIAK	701	701,00
52	SUNGAI PUA	1307062	1307062005	13.06.12.2002	SUNGAI PUA	4.286	4.286,00
53	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070001	13.06.07.2001	BATU TABA	1.973	1.973,00
54	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070002	13.06.07.2006	RASIA	887	887,00
55	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070003	13.06.07.2008	BALAI GURAH	1.901	1.901,00
56	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070004	13.06.07.2005	AMPANG GADANG	2.801	2.801,00
57	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070005	13.06.07.2002	BIARO GADANG	2.445	2.445,00
58	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070006	13.06.07.2003	LAMBAH	1.493	1.493,00
59	AMPEK ANGKEK	1307070	1307070007	13.06.07.2004	PANAMPUANG	2.497	2.497,00
60	CANDUANG	1307071	1307071001	13.06.14.2003	BUKIK BATABUAH	2.911	2.911,00
61	CANDUANG	1307071	1307071002	13.06.14.2002	LASI	2.040	2.040,00
62	CANDUANG	1307071	1307071003	13.06.14.2001	CANDUANG KOTO LAWEH	3.164	3.164,00
63	BASO	1307080	1307080001	13.06.08.2001	KOTO TINGGI	1.944	1.944,00
64	BASO	1307080	1307080002	13.06.08.2005	PADANG TAROK	2.680	2.680,00
65	BASO	1307080	1307080003	13.06.08.2004	SIMARASOK	2.081	2.081,00
66	BASO	1307080	1307080004	13.06.08.2002	TABEK PANJANG	2.396	2.396,00
67	BASO	1307080	1307080005	13.06.08.2006	SALO	485	485,00
68	BASO	1307080	1307080006	13.06.08.2007	KOTO BARU	549	549,00
69	BASO	1307080	1307080007	13.06.08.2009	KOTO GADANG	1.195	1.195,00
70	BASO	1307080	1307080008	13.06.08.2008	SUNGAI CUBADAK	902	902,00
71	TILATANG KAMANG	1307090	1307090001	13.06.09.2003	GADUT	5.135	5.135,00
72	TILATANG KAMANG	1307090	1307090002	13.06.09.2004	KAPAU	999	999,00
73	TILATANG KAMANG	1307090	1307090003	13.06.09.2001	KOTO TANGAH	6.073	6.073,00
74	KAMANG MAGEK	1307091	1307091001	13.06.15.2001	MAGEK	1.691	1.691,00
75	KAMANG MAGEK	1307091	1307091002	13.06.15.2002	KAMANG HILIA	1.846	1.846,00
76	KAMANG MAGEK	1307091	1307091003	13.06.15.2003	KAMANG MUDIAK	2.085	2.085,00

77	KAMANG MAGEK	1307091	1307091004	13.06.15.2004	KAMANG TANGAH ANAM SUKU	833	833,00
78	KAMANG MAGEK	1307091	1307091005	13.06.15.2005	PAUH KAMANG MUDIAK	866	866,00
79	PALEMBAYAN	1307100	1307100001	13.06.11.2001	BARINGIN	964	964,00
80	PALEMBAYAN	1307100	1307100002	13.06.11.2003	SUNGAI PUAR	623	623,00
81	PALEMBAYAN	1307100	1307100003	13.06.11.2002	SIPINANG	314	314,00
82	PALEMBAYAN	1307100	1307100004	13.06.11.2004	AMPEK KOTO PALEMBAYAN	1.609	1.609,00
83	PALEMBAYAN	1307100	1307100005	13.06.11.2005	TIGO KOTO SILUNGKANG	2.517	2.517,00
84	PALEMBAYAN	1307100	1307100006	13.06.11.2006	SALAREH AIA	1.317	1.317,00
85	PALEMBAYAN	1307100	1307100007	13.06.11.2007	SALAREH AIA TIMUR	1.260	1.260,00
86	PALEMBAYAN	1307100	1307100008	13.06.11.2009	SALAREH AIA BARAT	1.026	1.026,00
87	PALEMBAYAN	1307100	1307100009	13.06.11.2008	SALAREH AIA UTARA	973	973,00
88	PALUPUH	1307110	1307110001	13.06.10.2001	KOTO RANTANG	920	920,00
89	PALUPUH	1307110	1307110002	13.06.10.2002	PASIA LAWEH	1.590	1.590,00
90	PALUPUH	1307110	1307110003	13.06.10.2003	PAGADIH	554	554,00
91	PALUPUH	1307110	1307110004	13.06.10.2004	NAN TUJUAH	994	994,00
92	PALUPUH	1307110	1307110005	13.06.10.2005	NAN LIMO	767	767,00

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	TANJUNG MUTIARA	1307010	13.06.01.2001	TIKU SELATAN	6	3	1	4	6	6	65.91	91	4
2	TANJUNG MUTIARA	1307010	13.06.01.2002	TIKU UTARA	6	3	1	4	6	6	72.53	67	5
3	TANJUNG MUTIARA	1307010	13.06.01.2003	TIKU LIMO JORONG	6	6	4	4	6	6	89.38	1	6
4	TANJUNG MUTIARA	1307010	13.06.01.2004	DURIAN KAPEH DARUS	6	3	5	4	6	6	85.62	12	6
5	LUBUK BASUNG	1307020	13.06.02.2005	MANGGOPOH	6	1	1	4	6	6	73.54	63	5
6	LUBUK BASUNG	1307020	13.06.02.2002	GARAGAHAN	6	2	1	4	6	6	76.81	52	5
7	LUBUK BASUNG	1307020	13.06.02.2004	KAMPUANG TANGAH	6	4	1	4	6	6	82.87	27	6
8	LUBUK BASUNG	1307020	13.06.02.2003	KAMPUNG PINANG	6	4	1	4	6	6	77.46	49	5
9	LUBUK BASUNG	1307020	13.06.02.2001	LUBUK BASUNG	6	5	1	4	6	6	84.39	20	6
10	AMPEK NAGARI	1307021	13.06.13.2003	BAWAN	6	2	1	4	6	6	74.64	59	5
11	AMPEK NAGARI	1307021	13.06.13.2004	SITANANG	6	1	1	4	6	6	68.98	83	4
12	AMPEK NAGARI	1307021	13.06.13.2001	BATU KAMBING	6	5	1	4	6	6	75.73	56	5
13	AMPEK NAGARI	1307021	13.06.13.2002	SITALANG	6	1	1	4	6	6	68.06	85	4
14	TANJUNG RAYA	1307030	13.06.03.2001	TANJUNG SANI	6	2	1	4	6	6	74.72	58	5
15	TANJUNG RAYA	1307030	13.06.03.2002	SUNGAI BATANG	6	3	1	4	6	6	81.75	33	6
16	TANJUNG RAYA	1307030	13.06.03.2003	MANINJAU	6	5	3	4	6	6	87.62	6	6
17	TANJUNG RAYA	1307030	13.06.03.2004	BAYUA	6	5	1	4	6	6	83.30	26	6
18	TANJUNG RAYA	1307030	13.06.03.2007	DUO KOTO	6	5	5	4	6	6	89.15	2	6
19	TANJUNG RAYA	1307030	13.06.03.2010	PANINJAUAN	6	4	5	4	6	6	86.74	8	6
20	TANJUNG RAYA	1307030	13.06.03.2006	KOTO KACIAK	6	4	1	4	6	6	82.51	30	6
21	TANJUNG RAYA	1307030	13.06.03.2008	KOTO GADANG ANAM	6	3	1	4	6	6	82.59	29	6
22	TANJUNG RAYA	1307030	13.06.03.2009	KOTO MALINTANG	6	5	1	4	6	6	87.25	7	6
23	TANJUNG RAYA	1307030	13.06.03.2011	DALKO	6	5	5	4	6	6	88.83	4	6
24	MATUR	1307040	13.06.04.2002	MATUA MUDIAK	6	6	1	4	6	6	78.13	47	6
25	MATUR	1307040	13.06.04.2005	PAKIK PANJANG	6	5	5	4	6	6	88.78	5	6
26	MATUR	1307040	13.06.04.2006	PANTA PAUAH	6	2	1	4	6	6	73.89	62	5
27	MATUR	1307040	13.06.04.2001	MATUA HILIA	6	1	2	4	6	6	82.48	31	6
28	MATUR	1307040	13.06.04.2003	TIGO BALAI	6	1	1	4	6	6	79.19	44	6
29	MATUR	1307040	13.06.04.2004	LAWANG	6	3	1	4	6	6	80.16	42	6
30	IV KOTO	1307050	13.06.05.2004	KOTO TUO	6	3	1	4	6	6	62.25	92	3
31	IV KOTO	1307050	13.06.05.2003	BALINGKA	6	3	1	4	6	6	69.08	80	4
32	IV KOTO	1307050	13.06.05.2002	SUNGAI LANDIA	6	5	1	4	6	6	81.50	35	6
33	IV KOTO	1307050	13.06.05.2006	KOTO PANJANG	6	3	1	4	6	6	69.07	81	4
34	IV KOTO	1307050	13.06.05.2007	SIANOK ANAM SUKU	6	4	1	4	6	6	71.63	68	4
35	IV KOTO	1307050	13.06.05.2008	KOTO GADANG	6	4	1	4	6	6	71.25	70	4
36	IV KOTO	1307050	13.06.05.2005	GUGUAK TABEK SAROI	2	2	1	4	6	6	66.09	90	4
37	MALALAK	1307051	13.06.16.2003	MALALAK SELATAN	6	3	1	4	6	6	81.68	34	6
38	MALALAK	1307051	13.06.16.2004	MALALAK BARAT	6	3	5	4	6	6	86.37	11	6
39	MALALAK	1307051	13.06.16.2002	MALALAK TIMUR	6	4	2	4	6	6	86.49	10	6
40	MALALAK	1307051	13.06.16.2001	MALALAK UTARA	6	3	5	4	6	6	86.64	9	6
41	BANUHAMPU	1307061	13.06.06.2003	PAKAN SINAYAN	3	3	1	4	6	6	69.75	78	4
42	BANUHAMPU	1307061	13.06.06.2007	SUNGAI TANANG	3	4	1	4	6	6	68.49	84	4
43	BANUHAMPU	1307061	13.06.06.2001	PADANG LUA	2	6	1	4	6	6	72.86	65	5
44	BANUHAMPU	1307061	13.06.06.2006	CINGKARIANG	4	4	1	4	6	6	66.48	89	4
45	BANUHAMPU	1307061	13.06.06.2005	LADANG LAWEH	2	3	2	4	6	6	70.33	74	4
46	BANUHAMPU	1307061	13.06.06.2002	TALUAK AMPEK SUKU	1	5	5	4	6	6	74.61	60	5
47	BANUHAMPU	1307061	13.06.06.2004	KUBANG PUTIAH	3	4	1	4	6	6	71.21	71	4
48	SUNGAI PUA	1307062	13.06.12.2004	BATU PALANO	5	1	1	4	6	6	70.29	75	4
49	SUNGAI PUA	1307062	13.06.12.2001	PADANG LAWEH	3	1	5	4	6	6	72.67	66	5

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
50	SUNGAI PUA	1307062	13.06.12.2003	BATAGAK	6	2	2	4	6	6	80.57	39	6
51	SUNGAI PUA	1307062	13.06.12.2005	SARIAK	6	3	5	4	6	6	85.61	13	6
52	SUNGAI PUA	1307062	13.06.12.2002	SUNGAI PUA	4	1	3	4	6	6	71.60	69	4
53	AMPEK ANGKEK	1307070	13.06.07.2001	BATU TABA	2	3	1	4	6	6	67.74	87	4
54	AMPEK ANGKEK	1307070	13.06.07.2006	PASIA	1	3	5	4	6	6	70.64	73	4
55	AMPEK ANGKEK	1307070	13.06.07.2008	BALAI GURAH	4	1	1	4	6	6	70.88	72	4
56	AMPEK ANGKEK	1307070	13.06.07.2005	AMPANG GADANG	2	1	5	4	6	6	69.50	79	4
57	AMPEK ANGKEK	1307070	13.06.07.2002	BIARO GADANG	4	5	5	4	6	6	79.13	45	6
58	AMPEK ANGKEK	1307070	13.06.07.2003	LAMBAH	4	3	5	4	6	6	75.30	57	5
59	AMPEK ANGKEK	1307070	13.06.07.2004	PANAMPUANG	4	1	5	4	6	6	74.44	61	5
60	CANDUANG	1307071	13.06.14.2003	BUKIK BATABUAH	6	6	2	4	6	6	82.63	28	6
61	CANDUANG	1307071	13.06.14.2002	LASI	6	1	1	4	6	6	77.37	50	5
62	CANDUANG	1307071	13.06.14.2001	CANDUANG KOTO LAW	6	1	4	4	6	6	81.96	32	6
63	BASO	1307080	13.06.08.2001	KOTO TINGGI	6	1	1	4	6	6	78.19	46	6
64	BASO	1307080	13.06.08.2005	PADANG TAROK	6	1	1	4	6	6	77.50	48	5
65	BASO	1307080	13.06.08.2004	SIMARASOK	6	1	1	4	6	6	76.77	54	5
66	BASO	1307080	13.06.08.2002	TABEK PANJANG	6	2	4	4	6	6	80.96	37	6
67	BASO	1307080	13.06.08.2006	SALO	6	2	5	4	6	6	85.05	15	6
68	BASO	1307080	13.06.08.2007	KOTO BARU	6	4	1	4	6	6	77.21	51	5
69	BASO	1307080	13.06.08.2009	KOTO GADANG	6	2	4	4	6	6	80.16	41	6
70	BASO	1307080	13.06.08.2008	SUNGAI CUBADAK	5	4	2	4	6	6	76.39	55	5
71	TILATANG KAMANG	1307090	13.06.09.2003	GADUT	6	4	2	4	6	6	83.96	23	6
72	TILATANG KAMANG	1307090	13.06.09.2004	KAPAU	6	1	2	4	6	6	79.56	43	6
73	TILATANG KAMANG	1307090	13.06.09.2001	KOTO TANGAH	6	3	3	4	6	6	84.36	21	6
74	KAMANG MAGEK	1307091	13.06.15.2001	MAGEK	6	3	1	4	6	6	81.18	36	6
75	KAMANG MAGEK	1307091	13.06.15.2002	KAMANG HILIA	6	2	3	4	6	6	80.39	40	6
76	KAMANG MAGEK	1307091	13.06.15.2003	KAMANG MUDIAK	6	1	1	4	6	5	76.81	53	5
77	KAMANG MAGEK	1307091	13.06.15.2004	KAMANG TANGAH ANA	6	4	1	4	6	6	84.96	16	6
78	KAMANG MAGEK	1307091	13.06.15.2005	PAUH KAMANG MUDI	6	3	2	4	6	6	84.44	19	6
79	PALEMBAYAN	1307100	13.06.11.2001	BARINGIN	6	3	2	4	6	6	83.93	24	6
80	PALEMBAYAN	1307100	13.06.11.2003	SUNGAI PUAR	6	1	5	4	6	6	84.31	22	6
81	PALEMBAYAN	1307100	13.06.11.2002	SIPINANG	6	5	5	4	6	5	88.93	3	6
82	PALEMBAYAN	1307100	13.06.11.2004	AMPEK KOTO PALEMB	6	1	1	4	6	6	80.79	38	6
83	PALEMBAYAN	1307100	13.06.11.2005	TIGO KOTO SILUNGKAN	6	4	1	4	6	6	70.18	76	4
84	PALEMBAYAN	1307100	13.06.11.2006	SALAREH AIA	6	1	1	4	6	6	70.08	77	4
85	PALEMBAYAN	1307100	13.06.11.2007	SALAREH AIA TIMUR	6	3	5	4	6	6	85.48	14	6
86	PALEMBAYAN	1307100	13.06.11.2009	SALAREH AIA BARAT	6	1	5	4	6	6	83.78	25	6
87	PALEMBAYAN	1307100	13.06.11.2008	SALAREH AIA UTARA	6	2	5	4	6	6	84.75	18	6
88	PALUPUH	1307110	13.06.10.2001	KOTO RANTANG	6	1	1	3	6	6	73.53	64	5
89	PALUPUH	1307110	13.06.10.2002	PASIA LAWEH	6	1	1	3	6	6	68.99	82	4
90	PALUPUH	1307110	13.06.10.2003	PAGADIH	6	1	1	3	6	6	67.11	88	4
91	PALUPUH	1307110	13.06.10.2004	NAN TUJUAH	6	1	1	3	6	6	67.88	86	4
92	PALUPUH	1307110	13.06.10.2005	NAN LIMO	6	2	5	3	6	6	84.91	17	6